



# LKPJ

## LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN 2022

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BLITAR

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022 sesuai waktu yang ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 71 Ayat (2) Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan dokumen yang menjadi salah satu komponen dari siklus akuntabilitas yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2021-2026 serta dokumen Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022, DPA SKPD Tahun 2022 ini, merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja yang tercermin dari hasil pencapaian kinerja sesuai Tujuan, Sasaran dan Program yang ditetapkan.

Sebagai salah satu dokumen evaluasi kinerja, melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang peningkatan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sehingga dalam perumusan kebijakan dan program ke depannya dapat lebih tepat sasaran dan implementatif. Selain itu, melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini akan dapat dicermati kendala yang ada dalam pencapaian kinerja, mengetahui penyebab kegagalan sekaligus merumuskan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, guna mendukung Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Blitar Tahun 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar, seluruh Perangkat Daerah termasuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar juga berperan serta dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) masing-masing Perangkat Daerah.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022 ini disusun, dengan harapan semua pihak yang mendukungnya mampu melakukan evaluasi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik di masa mendatang. Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi masukan yang konstruktif bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini. Semoga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama dalam meningkatkan pelayanan urusan perpustakaan dan karsipan.

Blitar, 10 Februari 2023

KEPALA DINAS

PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KOTA BLITAR



Drs. SUYATNO

Pembina  
NIP. 19730430 199303 1 004

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.....	5
1.4. Maksud dan Tujuan .....	10
<b>BAB II PERENCANAAN ORGANISASI.....</b>	<b>11</b>
2.1 Rencana Strategis .....	11
2.2 Kondisi Sarana Prasarana .....	19
2.3 Target Indikator Kinerja OPD dalam RKPD dan SPM.....	24
<b>BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (WAJIB, PILIHAN DAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN) .....</b>	<b>63</b>
3.1 Tujuan .....	63
3.2 Sasaran .....	74
3.3 Program dan Kegiatan .....	85
3.4 Capaian Kinerja Program Sesuai Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja .....	92
3.4.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan Target Kinerja yang Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	92
3.4.2 Capaian Kinerja Program sesuai dengan Target Kinerja yang	

Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021-2026.....	109
3.5 Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan sesuai Target dalam Dokumen Anggaran OPD sesuai dengan Urusan Pemerintahan.....	111
3.5.1 Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan sesuai Target dalam Dokumen Anggaran OPD Tahun 2022.....	111
3.5.2 Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan sesuai Target dalam Dokumen Anggaran OPD Tahun 2021-2026.....	125
3.6 Permasalahan dan Solusi.....	131
3.7 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan.....	139
3.8 Penghargaan Yang Diterima .....	147
<b>BAB IV TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD KOTA BLITAR ATAS LKPJ WALIKOTA BLITAR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021.....</b>	<b>148</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>155</b>
1. Kesimpulan .....	155
2. Saran Perbaikan .....	157

**Lampiran (Capaian Masing-masing Bidang)**

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar
Tabel 2.2	Matrik Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar
Tabel 2.4	Sarana Prasarana s.d. Tahun 2022
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar
Tabel 2.6	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar
Tabel 2.7	Rencana Kinerja Tahunan Tahun Anggaran 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar
Tabel 2.8	Perubahan Rencana Kinerja Tahunan Tahun Anggaran 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar
Tabel 2.9	Rekapitulasi Perubahan Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022
Tabel 2.10	Kegiatan Yang Tidak Mengalami Perubahan Pagu Anggaran pada Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2022
Tabel 2.11	Sub Kegiatan Yang Mengalami Pengurangan Pagu Anggaran pada Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2022
Tabel 2.12	Sub Kegiatan Yang Mengalami Penambahan Pagu Anggaran pada Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2022
Tabel 2.13	Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2022
Table 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU Eselon II) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022 Urusan Perpustakaan
Tabel 3.2	Realisasi Tujuan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022 Urusan Kearsipan
Tabel 3.3	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Blitar Tahun 2022
Table 3.4	Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Interpretasi Kota Blitar Tahun 2022
Tabel 3.5	Capaian Indikator Sasaran Urusan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022
Tabel 3.6	Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU Eselon II) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022 Urusan Kearsipan

Table 3.7	Rekapitulasi Anggaran Tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar
Tabel 3.8	Realisasi Penyerapan Anggaran Urusan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022
Tabel 3.9	Realisasi Penyerapan Anggaran Urusan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022
Tabel 3.10	Capaian Indikator Program Urusan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022
Tabel 3.11	Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022 Urusan Perpustakaan
Tabel 3.12	Capaian Indikator Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022 Urusan Kearsipan
Tabel 3.13	Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022 Urusan Kearsipan
Tabel 3.14	Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021-2026 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Urusan Perpustakaan
Tabel 3.15	Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021-2026 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Urusan Kearsipan
Tabel 3.16	Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022 Urusan Perpustakaan
Tabel 3.17	Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022 Urusan Kearsipan
Tabel 3.18	Capaian Kinerja Keluaran Masing-masing Kegiatan Sesuai Target dalam Dokumen Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2021-2026 Urusan Perpustakaan
Tabel 3.19	Capaian Kinerja Keluaran Masing-masing Kegiatan Sesuai Target dalam Dokumen Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2021-2026 Urusan Kearsipan
Tabel 4.1	Target dan Realisasi Arsip yang Diselamatkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022

**DAFTAR GRAFIK**

- Grafik 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
- Grafik 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- Grafik 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang
- Grafik 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
- Grafik 4.1 Grafik Tren Indeks Minat Baca Kota Blitar
- Grafik 4.2 Tingkat Kegemaran Membaca Kota Blitar Tahun 2022
- Grafik 4.3 Grafik Tren Arsip Daerah yang Diselamatkan dan Dilestarikan  
(akumulasi lembar/tahun)

**DAFTAR BAGAN**

- Bagan 1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar
- Bagan 2.1 Keterkaitan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar dengan RPJMD Kota Blitar

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 LATAR BELAKANG**

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya ditujukan untuk lebih mendorong terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu, melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu tujuan utama otonomi daerah adalah untuk menciptakan *good governance*, yaitu kepemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas serta penegakan hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kepemimpinan yang transparan dan akuntabel agar berbagai kebijakan yang diimplementasikan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 69 Ayat (1) dicantumkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun pada Pasal 71 Ayat (2) Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang merupakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang didasarkan pada Peraturan Walikota Blitar Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 39)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan RKPD Tahun 2022. Pelaksanaan RKPD tahun 2022 merupakan periode pertama dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 dengan tema “ **KOTA BLITAR KEREN: Unggul, Makmur, dan Bermartabat**”. Oleh karena itu, pencapaian kinerja dalam LKPJ Tahun 2022 ini didasarkan pada target yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Kota Blitar Tahun 2022 serta target RPJMD Tahun 2021-2026.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022 ini didasarkan pada pencapaian target Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan serta target dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022 yang merupakan bentuk pertanggungjawaban konkret atas pelaksanaan tugas pokok fungsi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja selama 1 (satu) tahun anggaran. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022 merupakan laporan atas kemajuan penyelenggaraan pemerintahan urusan perpustakaan dan karsipan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Blitar yang telah dicapai serta sebagai evaluasi untuk peningkatan kinerja yang berkesinambungan periode selanjutnya.

## **1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

### **1. SUSUNAN ORGANISASI**

Seiring dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) dan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

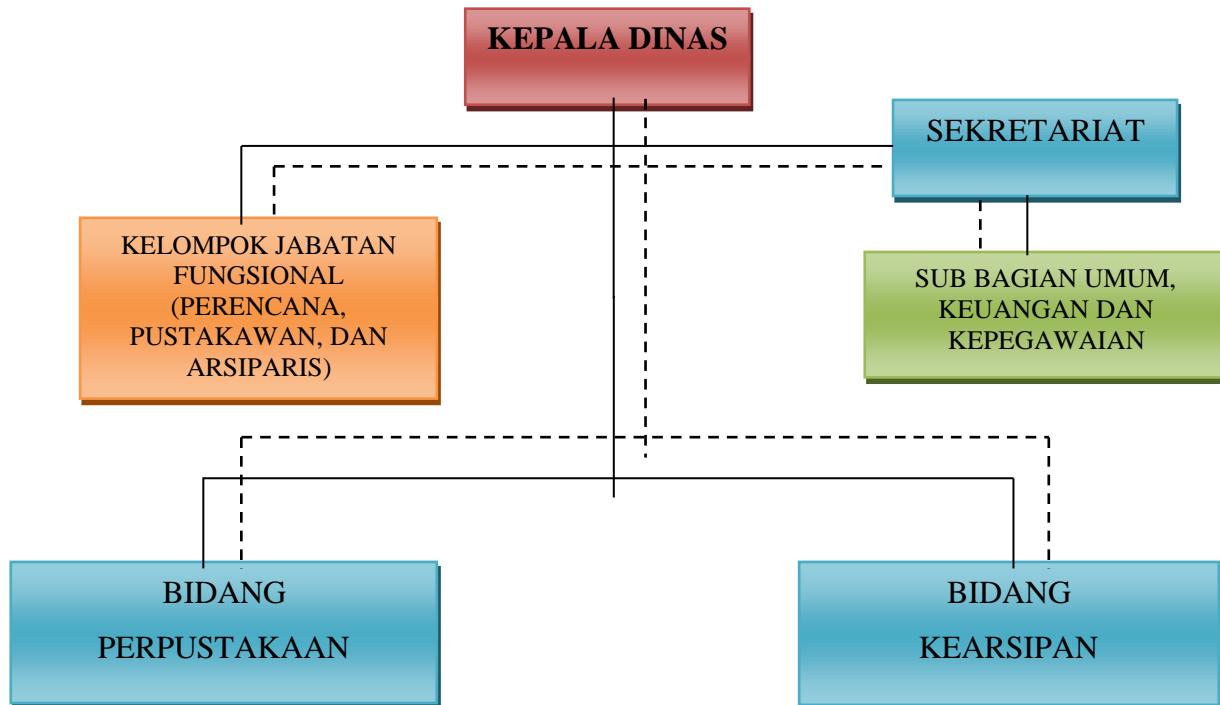
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7), dilakukan penyesuaian kembali terhadap susunan Perangkat Daerah berdasarkan pembagian kewenangan dan urusan pemerintahan. Kelembagaan baru kemudian ditetapkan dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 51), dimana susunan organisasi hanya terdiri dari 2 level yaitu Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/JPT (eselon II) dan Administrator (eselon III).

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 51), susunan organisasi berupa Dinas yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

Susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian
3. Bidang Perpustakaan
4. Bidang Kearsipan
5. Kelompok Jabatan Fungsional (Perencana, Pustakawan dan Arsiparis)

**Bagan 1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar**



## 2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan karsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perpustakaan dan karsipan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perpustakaan dan karsipan;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan karsipan;
- e. Pengkajian dan pengembangan sistem perpustakaan dan karsipan;
- f. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga/Dinas/instansi terkait bidang perpustakaan dan karsipan;

- g. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;
- h. Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Kearsipan dan pembentukan Jaringan Informasi Kearsipan;
- i. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
- j. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- k. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan dinas;
- l. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- m. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- n. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan;
- o. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- p. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang tugasnya;

### **1.3 JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL**

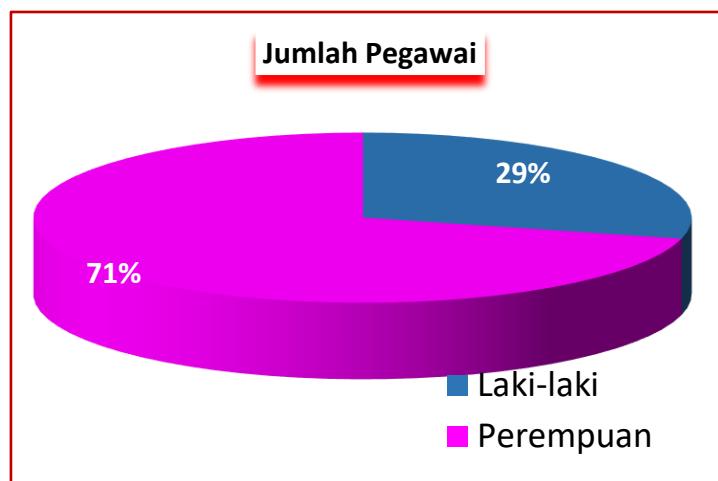
Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangan tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar didukung oleh 31 (tiga puluh satu) personil yang dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai (orang)
1	Laki-laki	9
2	Perempuan	22
	<b>JUMLAH</b>	<b>31</b>

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, 2022

**Grafik 1.1**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**



Kualifikasi atau tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pelaksanaan unit organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Untuk mengetahui tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

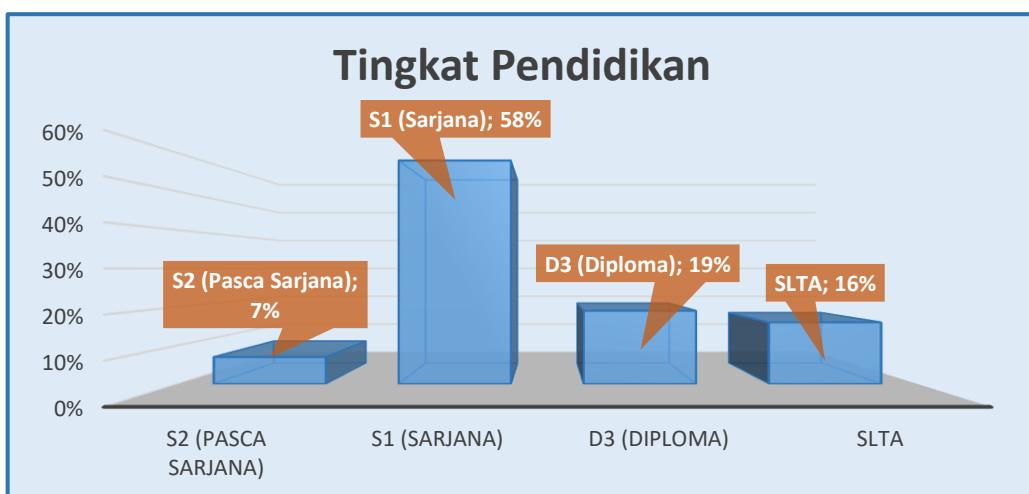
**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Pendidikan	Jumlah Pegawai		Jumlah
		L	P	
1	Pasca Sarjana ( S – 2 )	-	2	2
2	Sarjana (S-1)	5	13	18
3	D-III	1	5	6

No.	Pendidikan	Jumlah Pegawai		Jumlah
		L	P	
4	D-II	-	-	-
5	D-I	-	-	-
6	SLTA	3	2	5
	<b>JUMLAH</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>31</b>

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, 2022

**Grafik 1.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**



Pangkat dan golongan ruang pegawai mempunyai keterkaitan dengan karier pegawai, dimana karier pegawai dapat mendukung tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan data yang ada, pangkat dan golongan ruang pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar terlihat dalam tabel berikut ini :

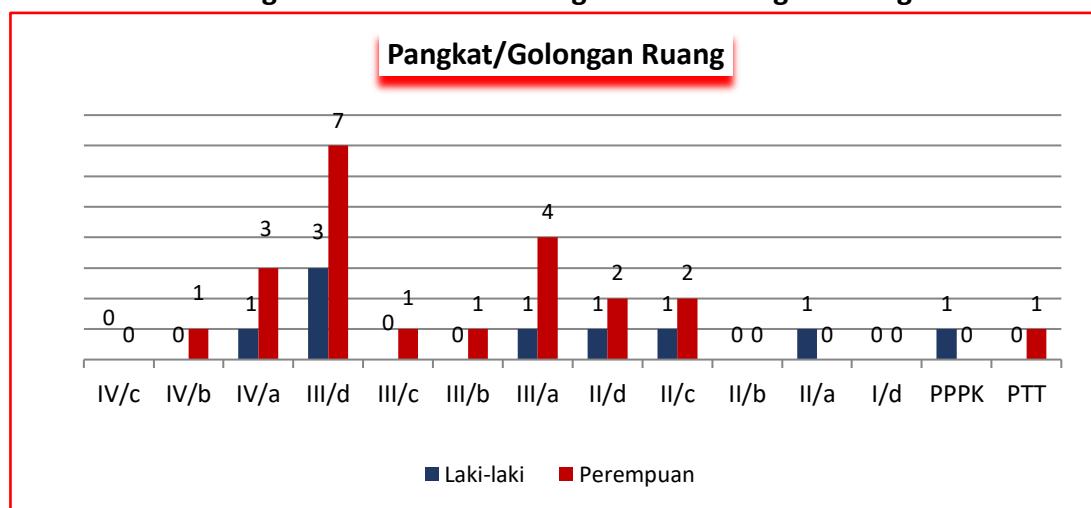
**Tabel 1.3**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang**

No.	Pangkat dan Golongan Ruang	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pembina Utama Muda (IVc)	0	0	0
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	0	1	1
3	Pembina (IV/a)	1	3	4

No.	Pangkat dan Golongan Ruang	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
4	Penata Tingkat I (III/d)	3	7	10
5	Penata (III/c)	0	1	1
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	0	1	1
7	Penata Muda (III/a)	1	4	5
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	1	2	3
9	Pengatur (II/c)	1	2	3
10	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	0	0	0
11	Pengatur Muda (II/a)	1	0	1
12	PPPK	1	0	1
13	PTT	0	1	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>31</b>

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, 2022

**Grafik 1.3**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang**



Didalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu unit organisasi dibedakan antara jabatan struktural dan jabatan non struktural. Pemegang jabatan non struktural masih dibedakan antara jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu. Ketiga jabatan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting didalam mendukung tugas dan fungsi organisasi.

Untuk melihat jumlah pemangku jabatan baik struktural maupun pemangku jabatan non struktural pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar ditunjukkan dengan tabel berikut ini :

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan**

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai		Jumlah
		L	P	
1.	Jabatan Struktural	1	4	5
2.	Jabatan Fungsional Umum (Staf) termasuk 1 PTT/non ASN	2	5	7
3.	Jabatan Fungsional Tertentu :	6	13	19
a.	Perencana Ahli Muda	0	1	1
b.	Pustakawan :	3	8	11
	- Pustakawan Ahli Madya	0	1	1
	- Pustakawan Ahli Muda	0	3	3
	- Pustakawan Ahli Pertama	2	2	4
	- Pustakawan Penyelia	0	1	1
	- Pustakawan Mahir	0	1	1
	- Pustakawan Terampil	1	0	1
c.	- Arsiparis :	3	4	7
	- Arsiparis Ahli Muda	3	1	4
	- Arsiparis Ahli Pertama	0	1	1
	- Arsiparis Terampil	0	2	2
	- <b>JUMLAH</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>31</b>

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, 2022

Grafik 1.4  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan



#### 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Blitar Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan anggaran yang memuat program dan kegiatan dalam mencapai sasaran pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Blitar, yang disusun berpedoman kepada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Blitar Tahun 2022, Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Blitar Tahun 2022, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Blitar Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2022.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Blitar Tahun 2022 adalah :

1. Memberikan informasi capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Blitar kepada Walikota Blitar;
2. Sebagai salah satu pendukung Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Blitar Akhir Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar.

**BAB II**  
**PERENCANAAN ORGANISASI**

**2.1 RENCANA STRATEGIS**

Perangkat Daerah menyusun perencanaan strategis perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2021-2026 yang disusun pada dasarnya dimaksudkan agar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar mampu menjawab tuntutan lokal, regional, nasional dan global, sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.

Untuk mendukung terwujudnya visi Walikota/Wakil Walikota terpilih periode 2021-2026 yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu **“KOTA BLITAR KEREN : Unggul, Makmur dan Bermartabat”** maka dirumuskan dalam 5 misi pembangunan yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2021-2026.

Adapun Misi Kota Blitar Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter.
3. Meningkatkan berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital.
4. Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan.
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.

Selain visi dan misi Kepala Daerah, Kota Blitar memiliki program pembangunan daerah yang bersifat prioritas yang disebut sebagai Sapta Program Prioritas. Sapta Program Prioritas sekaligus memuat Program Unggulan Inovatif yang mengakselerasi pembangunan dan pelayanan publik sesuai kebutuhan daerah dan kontekstual berdasarkan perkembangan sosial yang semakin dinamis. Pembangunan dan pelayanan publik diharapkan semakin responsif dan tepat sasaran untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar juga mengampu salah satu Sapta Program Prioritas/Program Unggulan Inovatif Kota Blitar Tahun 2021-2026 yaitu Program ke-empat atau **Program Blitar Cerdas**. Program Blitar Cerdas antara lain berupa pendidikan gratis yang bermutu dan berkualitas dengan ditunjang bantuan peralatan/sarana pendidikan, bantuan dan beasiswa bagi SMA/Sederajat dan mahasiswa, termasuk untuk mengakses perguruan tinggi, **penguatan kegemaran membaca dan literasi melalui perpustakaan keliling dan pojok baca**, serta fasilitasi pendidikan non-formal.

Mengingat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengampu 2 (dua) urusan wajib non pelayanan dasar yaitu Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan, maka tujuan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar mengacu pada 2 (dua) misi dan tujuan yang berbeda pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Urusan Perpustakaan tercantum dalam misi 2 tujuan 3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter.
2. Urusan Kearsipan tercantum dalam misi 5 tujuan 9 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah dari Pemerintah Kota Blitar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar secara aktif ikut mewujudkan Visi dan Misi Kota Blitar selama 5 (lima) tahun dengan tetap berorientasi pada hasil yang ingin dicapai mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 yang secara sistematis dan berkesinambungan harus memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Untuk itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar

berupaya menata semua komponen yang terlibat dalam mendukung pelaksanaannya baik personil, sarana prasarana, anggaran yang tersedia serta piranti lunak lainnya untuk dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

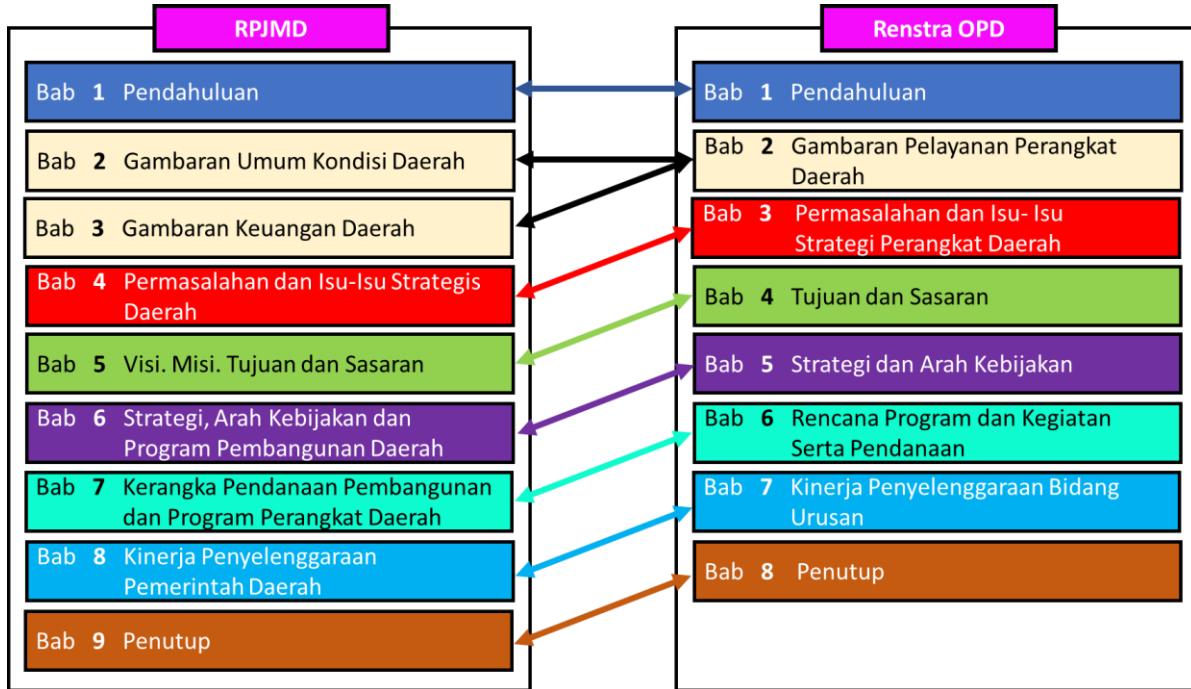
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar telah menyusun Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2021-2026 sebagai pedoman dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar pada Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2026 dengan memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026 dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026.

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026, maka dilaksanakan penyusunan perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2021-2026, dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Sebagai tindaklanjut terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- b. Perubahan Perwali Tupoksi beberapa Perangkat Daerah sebagai akibat adanya penyetaraan jabatan;
- c. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan terkait DAK Tahun Anggaran 2022 dan DBHCHT.

Adapun keterkaitan antara Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2021-2026 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Bagan 2.1 berikut :

**Bagan 2.1**  
**Keterkaitan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar**  
**Dengan RPJMD Kota Blitar**



**VISI KOTA BLITAR 2021-2026 “ Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN : UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT ”**

RPJMD MISI Ke – 2	RENSTRA TAHUN 2021 - 2026
MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KEREN, BERDAYA SAING, SEHAT JASMANI-ROHANI, CERDAS DAN BERKARAKTER.	<b>TUJUAN 1:</b> Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat
<b>TUJUAN Ke - 3</b>  Meningkatnya derajat kesehatan dan daya saing sdm	<b>SASARAN 1 :</b> Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat
<b>SASARAN Ke - 5</b>  Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	<b>RENSTRA TAHUN 2021 - 2026</b>
RPJMD MISI Ke – 5	<b>TUJUAN 1:</b> Meningkatnya tata kearsipan pemerintahan daerah
MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.	<b>SASARAN 1 :</b> Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip daerah
<b>TUJUAN Ke - 9</b>  Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi	
<b>SASARAN Ke - 6</b>  Meningkatnya tata kearsipan pemerintahan daerah	

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) tersebut, diwujudkan melalui strategi dan arah kebijakan sesuai masing-masing urusan sebagaimana dalam Tabel 2.1 berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**  
**Renstra Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Blitar**

<b>VISI : Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN : Unggul, Makmur, Bermartabat</b>			
<b>MISI II : MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KEREN, BERDAYA SAING, SEHAT JASMANI-ROHANI, CERDAS DAN BERKARAKTER</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat	Peningkatan kegemaran membaca dan literasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perumusan dan implementasi regulasi daerah bidang perpustakaan</li><li>2. Peningkatan fasilitas dan pelayanan perpustakaan</li><li>3. Pengembangan taman baca masyarakat (TBM)</li><li>4. Peningkatan layanan perpustakaan berbasis digital</li><li>5. Peningkatan koleksi buku perpustakaan</li></ol>
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah berbasis kinerja.</li><li>2. Meningkatkan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif</li></ol>

<b>MISI V : MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya tata kearsipan pemerintahan daerah	Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip daerah	Peningkatan kualitas pelayanan kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas pelayanan arsip daerah berbasis TIK</li> <li>2. Peningkatan perlindungan dan penyelamatan arsip daerah</li> <li>3. Peningkatan pembinaan dan pengawasan kearsipan</li> </ol>

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan Perangkat Daerah. Indikator-indikator yang digunakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Dalam Tabel 2.2 berikut ini disajikan Matrik Rencana Strategis (Renstra) beserta Indikator Kinerja dan target selama 5 (lima) tahun sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Matrik Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar**

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGHITUNGAN	TARGET TAHUNAN				
			2022	2023	2024	2025	2026
<i>Tujuan Urusan Perpustakaan :</i>							
Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	47	48	48,5	49	49,5
<i>Sasaran Urusan Perpustakaan :</i>							
Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Hasil Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Nilai Evaluasi SAKIP	84 (A)	84 (A)	84 (A)	84 (A)	84 (A)

## **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKpj) TAHUN 2022**

---

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGHITUNGAN	TARGET TAHUNAN				
			2022	2023	2024	2025	2026
<b>Tujuan Urusan Kearsipan :</b>							
Meningkatnya tata kearsipan pemerintahan daerah	Indeks Kearsipan	Hasil Indeks Kearsipan	35	40	45	50	55
<b>Sasaran Urusan Kearsipan :</b>							
Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip daerah	Percentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian arsip daerah	Jumlah arsip yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian dibagi Jumlah arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian tahun n x 100%	100%	100%	100%	100%	100%

*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, 2022*

Pemerintah Kota Blitar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Perangkat Daerah melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026.

### **1. Urusan Perpustakaan**

Misi kedua : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter.

Tujuan kesatu : Meningkatkan kegemaran membaca masyarakat.

Sasaran kesatu : Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat.

Indikator Sasaran dalam RPJMD tersebut kemudian menjadi Indikator Tujuan dalam Renstra sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2021-2026.

### **2. Urusan Kearsipan**

Misi kelima : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.

Tujuan kesatu : Meningkatnya tata kearsipan pemerintahan daerah.

Sasaran kesatu : Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip daerah.

Indikator Sasaran dalam RPJMD tersebut kemudian menjadi Indikator Tujuan dalam Renstra, namun tidak menjadi Indikator Kinerja Utama. Yang menjadi Indikator

Kinerja Utama Urusan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2021-2026 adalah Sasaran Renstra.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022 diperjanjikan sebagaimana dalam Tabel 2.3 berikut :

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama Tahun 2022**  
**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar**

No	Kinerja Utama / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Target 2022	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	47	Bidang Perpustakaan
2.	Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip daerah	Persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian	Jumlah arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian pada tahun n dibagi Jumlah arsip daerah yang harus dilakukan penyelamatan dan pelestarian pada tahun n x 100%	100%	Bidang Kearsipan

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, 2022

## 2.2 KONDISI SARANA PRASARANA

Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai serta pemenuhannya disesuaikan dengan analisa kebutuhan barang yang telah dibuat dan pemeliharaannya dilakukan oleh masing-masing SKPD pengguna barang.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar terletak di Jalan Veteran No. 75 Blitar. Lokasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sangat strategis yaitu di tengah kota dan

dekat dengan Kantor Walikota Blitar. Untuk menunjang pelaksanaan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar telah tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar berada di 2 lokasi. Sekretariat dan Bidang Perpustakaan berada di Jl. Veteran No. 75, sedangkan Bidang Kearsipan berada di Jl. Ciliwung No. 128 yang untuk sementara juga difungsikan sebagai Depo Arsip.

Gedung di Jl. Veteran terdiri 2 (dua) lantai. Lantai bawah untuk ruangan kerja Kepala Dinas, Sekretariat, Aula, Record Center, dan Mushola. Sedangkan lantai atas untuk Ruang Layanan Umum, Blitar Corner (Ruang koleksi Lokal Conten), Ruang Kepala Bidang Perpustakaan dan Pustakawan Ahli Madya, ruang kerja Pustakawan dan Ruang Literasi Ceria (Layanan Anak).

Gedung di Jl. Ciliwung terdiri dari 4 blok bangunan yaitu Ruang Perkantoran, Ruang yang difungsikan sementara untuk Depo Arsip, Dapur dan Mushola.

2. Kendaraan Operasional, Barang Elektronik, Meubelair dan sarana prasarana terdiri dari :

**Tabel 2.4**  
**Sarana Prasarana s.d. Tahun 2022**

No	Nama Barang	Jumlah	Ket.
1.	Toyota Innova	1 unit	Baik
2.	Toyota Hilux 2.0 (Mobil Perpustakaan Keliling)	1 unit	Baik
3.	Suzuki APV (Mobil Perpustakaan Keliling)	1 unit	Baik
4.	Toyota Hilux 2. PU MT Model Blind/Del. Van (Mobil Perpustakaan Keliling)	1 unit	Baik
5.	Suzuki APV Merah	1 unit	Baik
6.	Viar Box (Kendaraan roda 3)	1 unit	Baik
7.	Sepeda Motor	3 unit	1 Rusak
8.	Dispenser	1 buah	Baik
9.	Meja Eselon III	1 unit	Baik
10.	Meja Eselon IV	9 unit	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Ket.
11.	Meja Staf	12 unit	Baik
12.	Kursi Kerja Eselon III	3 unit	Baik
13.	Kursi Kerja Eselon IV	8 unit	Baik
14.	Kursi Staf	22 unit	Baik
15.	Meja Rapat	7 unit	Baik
16.	Kursi Rapat	58 unit	Baik
17.	Sofa / Kursi Tamu	6 unit	4 Baik, 2 Rusak Berat
18.	Laptop	17 unit	1 Rusak
19.	Televisi	6 unit	1 Rusak
20.	Kamera Digital	4 unit	Baik
21.	PC Komputer	19 unit	6 Rusak
22.	Mesin Faximile	1 buah	Baik
23.	Brankas	2 unit	Baik
24.	Almari Piring	1 unit	1 Rusak
25.	Almari arsip	13 unit	1 Rusak
26.	Almari Buku	5 unit	Baik
27.	Scanner	6 unit	Baik
28.	Printer Dot Matrik	2 unit	Baik
29.	White Board	2 unit	Baik
30.	Rak TV	2 unit	Baik
31.	Mesin Ketik Manual	1 unit	Baik
32.	Printer Scan Copy	4 unit	Baik
33.	Printer	29 unit	3 Rusak
34.	Handycam	2 unit	Baik
35.	Mesin Foto Copy	2 unit	1 Rusak
36.	Sound System	2 set	1 Set Rusak
37.	Almari (Roll O Pack)	5 unit	Baik
38.	Troli	3 unit	Baik

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKpj) TAHUN 2022**

---

No	Nama Barang	Jumlah	Ket.
39.	Tangga	2 unit	1 rusak
40.	Rak Arsip	8 unit	Baik
41.	Rak Buku Perpustakaan	5 unit	Baik
42.	Buku Perpustakaan	12.238 judul (26.049 eksemplar)	Sebagian rusak
43.	Rak Besi Buku	14 unit	Baik
44.	Meja layanan perpustakaan	1 set	Baik
45.	Mesin Penghancur Kertas	4 unit	Baik
46.	Mesin Jilid	1 unit	Baik
47.	Mesin Penyedot Debu	1 unit	Baik
48.	Tripod Handycam	2 unit	Baik
49.	Genset	3 unit	Baik
50.	Audio Recording	1 unit	Baik
51.	AC	16 unit	2 rusak
52.	Mesin Pompa Air + Tandon	2 set	Baik
53.	Telepon	2 unit	Baik
54.	Telepon ruangan	2 unit	Baik
55.	PABX	1 unit	Baik
56.	Kamera CCTV	9 unit	Baik
57.	Tape Wirelles + Mic	1 Set	Baik
58.	Wirelles/microphone	2 Set	Baik
59.	Stand Mic	3 unit	1 Rusak
60.	LCD Proyektor + Layar	2 unit	Baik
61.	Kulkas 2 pintu	2 unit	Baik
62.	Kompor Gas + Tabung Elpiji	1 set	Baik
63.	Karpet Lantai	2 gulung	Baik
64.	Papan nama dinas	1 buah	Baik
65.	Pintu Pagar Besi	1 unit	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Ket.
66.	UPS finger print	4 unit	1 Rusak
67.	Hardisk External	12 unit	Baik
68.	Meja kelengkapan MPK	2 buah	Baik
69.	Kursi kelengkapan MPK	6 buah	Baik
70.	Tangga Shelving	1 buah	Baik
71.	Printer kartu anggota	3 unit	1 rusak
72.	Barcode Scanner	2 buah	Baik
73.	Web Cam	3 buah	Baik
74.	DVD Player	1 buah	Baik
75.	Tenda	2 buah	Baik
76.	Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD)	1 paket	Baik
77.	Exhaust fan	2 unit	Baik
78.	Mesin Penghisap Debu	1 unit	Baik
79.	Pompa Kolam Ikan	1 unit	Baik
80.	Filling Cabinet	14 unit	Baik
81.	Locker Pemustaka	2 unit	Baik
82.	Korden	2 set	Baik
83.	Papan Nama Darma Wanita, Korpri	2 unit	Baik
84.	Papan Data	6 unit	Baik
85.	Server (Bid. Arsip)	1 unit	Baik
86.	Kamera CCTV	2 set	Baik
87.	Karpet Karakter	1 set	Baik
88.	Rak Besi	2 unit	Baik
89.	Kursi Hadap	2 unit	Baik
90.	Kursi Kerja	8 unit	Baik
91.	Almari Etalase	2 unit	Baik
92.	Tempat sampah beroda	2 unit	Baik
93.	Tempat cuci tangan	3 unit	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Ket.
94.	Pemasangan PDAM	2 unit	Baik
95.	PC Server Perpustakaan	1 unit	Baik
96.	TV LED 43 Inc	1 unit	Baik
97.	TV LED 52 Inc	1 unit	Baik
98.	Meubelair POCADI	1 set	Baik
99.	Digital Library Station (Pocadi)	1 unit	Baik
100.	PC all in one (Pocadi)	4 set	Baik
101.	Aplikasi E-Library	1 paket	Baik
102.	PJU Solar Cell	5 set	Baik

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, 2022*

Guna menjaga kondisi sarana prasarana kantor tetap layak pakai diperlukan biaya pemeliharaan. Sedangkan untuk sarana prasarana yang rusak perlu dilakukan pengadaan lagi. Adapun untuk bahan pustaka yang telah rusak dan tidak dapat dilayangkan, perlu dikaji untuk menerbitkan Peraturan Walikota tentang penghapusan bahan pustaka dengan tetap mengakomodir supaya informasi di dalam bahan pustaka tetap dapat dilestarikan.

### **2.3 TARGET INDIKATOR KINERJA OPD DALAM RKPD DAN SPM**

Indikator kinerja merupakan ukuran yang akan memberikan informasi sejauh mana Perangkat Daerah telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Perencanaan kinerja digunakan untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program dan kegiatan instansi pemerintah akan lebih baik. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2021–2026, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar menyusun perencanaan kinerja yang merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja tahun 2022 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Perangkat Daerah untuk mencapai dan melaksanakannya pada tahun 2022.

Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar pada awal tahun 2022 secara terperinci sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2022**  
**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	6,5
2.	Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip daerah	Persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian	100 %
3.	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pembinaan Perpustakaan	648.713.300,00
2.	Program Pengelolaan Arsip	424.605.300,00
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.319.125.564,00
<b>JUMLAH</b>		<b>5.392.444.164,00</b>

Sejalan dengan adanya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar Tahun 2022, pada tanggal 18 Oktober 2022 ditetapkan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022**  
**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	6,5
2.	Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip daerah	Persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian	100%
3.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pembinaan Perpustakaan	781.824.100,00
2.	Program Pengelolaan Arsip	389.457.934,00
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.499.782.828,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.671.064.862,00</b>

Selain Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022, juga ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 yang menjadi pedoman pelaksanaan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana berikut:

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKpj) TAHUN 2022**

---

**Tabel 2.7**  
**Rencana Kinerja Tahunan**  
**Tahun Anggaran 2022**  
**Unit Kerja : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Blitar**

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	6,5	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan	81,2	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	0,3%	392.525.800
				Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	3,2 : 1	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pengembangan lokal content	170 orang	77.344.200
						Pembinaan perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional Perpustakaan	Jumlah laporan Monev Perpustakaan Sekolah	1 dokumen	33.032.700
							Jumlah peserta lomba Perpustakaan sekolah	11 sekolah	
							Jumlah peserta rapat koordinasi monev perpustakaan sekolah	95 orang	

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2022**

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Peningkatan Kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM Perpustakaan Sekolah yang mengikuti peningkatan kompetensi perpustakaan sesuai tipologi standart	95 orang	21.244.000
						Pengelolaan dan pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang sudah dilakukan entry ke aplikasi perpustakaan	1030 eksemplar	112.664.700
							Jumlah bahan pustaka yang tersedia	1030 eksemplar	
						Penyusunan data dan informasi Perpustakaan, Tenaga perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1 dokumen	148.240.200
							Jumlah laporan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	1 dokumen	
							Jumlah laporan SKM Perpustakaan	1 dokumen	
							Jumlah profil perpustakaan binaan yang tersusun	1 dokumen	
						Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pemustaka	56%	256.187.500

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKpj) TAHUN 2022**

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah konten Layada Cedar (Cerita Anak Dalam Jaringan)	12 konten	256.187.500
							Jumlah Parenting Literasi yang terlaksana	6 kali	
							Jumlah pemustaka yang memanfaatkan layanan ekstensi perpustakaan	35.360 pemustaka	
							Jumlah peserta bimbingan pemustaka	200 orang	
							Jumlah peserta Kafe Literasi	100 orang	
							Jumlah peserta lomba minat baca dan lomba peningkatan minat baca	110 orang	
							Jumlah peserta rakor pelayanan perpustakaan	97 orang	
							Jumlah peserta Wisata Buku	1.400 orang	
							Jumlah software perpustakaan yang tersedia	1 aplikasi	

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKpj) TAHUN 2022**

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip daerah	Percentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian	100%	Program Pengelolaan Arsip	Nilai Kepuasan pengguna layanan kearsipan	80,5	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Percentase arsip dinamis yang dilakukan pengelolaan	100%	313.417.700
						Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip daerah yang dilakukan pemeliharaan melalui Fumigasi dan Termit Control	500 m3	197.668.400
							Jumlah arsip daerah yang dilakukan pengolahan dan penataan	105 Meter Linier	
							Jumlah arsip daerah yang dilakukan penyelamatan melalui alih media	20.000 lembar	
							Jumlah fasilitasi sarana kearsipan perangkat daerah	1.100 box	
						Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaporan pembinaan dan pengawasan kearsipan	1 dokumen	115.749.300
							Jumlah perangkat daerah yang telah dilakukan pengawasan kearsipan	10 OPD	

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKpj) TAHUN 2022**

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah perangkat daerah yang telah mendapatkan asistensi kearsipan	10 OPD		
						Jumlah peserta Sosialisasi Kearsipan	150 orang		
						Jumlah rancangan kebijakan kearsipan yang disusun	3 draft		
						Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase arsip yang dimasukkan dalam SIKN (Sistem Informasi Kearsipan Nasional) melalui JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional)	20%	111.187.600
						Penyediaan informasi, akses, dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN	Jumlah arsip daerah yang diolah menjadi informasi	10.000 nomor	111.187.600
							Jumlah laporan SKM Kearsipan yang tersusun	1 dokumen	
							Jumlah penerima layanan kearsipan	150 orang	
							Jumlah peserta workshop kearsipan	75 orang	

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKpj) TAHUN 2022**

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84 (A)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,9 (Baik)	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100%	16.307.100
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	7 dokumen	2.537.800
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun	9 dokumen	13.769.300
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai standart	100%	3.489.129.897
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	28 orang	3.487.929.897
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah jenis laporan Keuangan yang tersusun (Bulanan/semesteran)	7 dokumen	1.200.000

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKpj) TAHUN 2022**

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai standart	100%	59.109.250
						Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	6 event	59.109.250
							Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah	3 publikasi	
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah sesuai standar	100%	486.960.420
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	4 jenis	2.519.400
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	39 macam	21.843.000
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	1208 dos	326.452.020

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKpj) TAHUN 2022**

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia		35 jenis	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	4 jenis	12.507.500
							Jumlah lembar penggandaan	10000 lembar	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	3 bahan bacaan	8.100.000
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsulasi regional dan nasional yang diikuti	42 rakor	115.538.500
						Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	100%	28.578.700
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	3 macam	28.578.700
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standart	100%	50.452.517

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKpj) TAHUN 2022**

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis Jasa Surat Menyurat yang tersedia	1 jenis	1.000.000
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	3 rekening	49.452.517
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	188.587.860
						Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	6 unit	111.015.600
							Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	11 unit	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	4 macam	11.117.800
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	1 unit	47.516.280

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKpj) TAHUN 2022**

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	4 macam	18.938.000
<b>JUMLAH</b>								<b>5.392.444.164</b>	

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKpj) TAHUN 2022**

---

**Tabel 2.8**  
**Perubahan Rencana Kinerja Tahunan**  
**Tahun Anggaran 2022**  
**Unit Kerja : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Blitar**

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	6,5	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan	81,2	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Percentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	0,3%	543.725.700
				Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	3,2:1	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pengembangan lokal content	170 orang	70.344.200
						Pembinaan perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional Perpustakaan	Jumlah laporan Monev Perpustakaan Sekolah	1 dokumen	33.032.700
							Jumlah peserta lomba Perpustakaan sekolah	11 sekolah	
							Jumlah peserta rapat koordinasi monev perpustakaan sekolah	95 orang	

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2022**

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Peningkatan Kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM Perpustakaan Sekolah yang mengikuti peningkatan kompetensi perpustakaan sesuai tipologi standart	95 orang	18.698.900
						Pengelolaan dan pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang sudah dilakukan entry ke aplikasi perpustakaan	490 eksemplar	138.409.700
							Jumlah bahan pustaka yang tersedia	1030 eksemplar	
						Penyusunan data dan informasi Perpustakaan, Tenaga perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1 dokumen	283.240.200
							Jumlah laporan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	1 dokumen	
							Jumlah laporan SKM Perpustakaan	1 dokumen	
							Jumlah profil perpustakaan binaan yang tersusun	1 dokumen	
						Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pemustaka	56%	238.098.400

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKpj) TAHUN 2022**

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah konten Layada Cedar (Cerita Anak Dalam Jaringan)	12 konten	238.098.400
							Jumlah Parenting Literasi yang terlaksana	6 kali	
							Jumlah pemustaka yang memanfaatkan layanan ekstensi perpustakaan	35.360 pemustaka	
							Jumlah peserta bimbingan pemustaka	200 orang	
							Jumlah peserta Kafe Literasi	150 orang	
							Jumlah peserta lomba minat baca dan lomba peningkatan minat baca	56 orang	
							Jumlah peserta rakor pelayanan perpustakaan	97 orang	
							Jumlah peserta Wisata Buku	1.400 orang	
							Jumlah software perpustakaan yang tersedia	1 aplikasi	

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKpj) TAHUN 2022**

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip daerah	Percentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian	100%	Program Pengelolaan Arsip	Nilai Kepuasan pengguna layanan kearsipan	80,5	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Percentase arsip dinamis yang dilakukan pengelolaa	100%	335.397.584
						Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip daerah yang dilakukan pemeliharaan melalui Fumigasi dan Termit Control	460 m3	227.502.284
							Jumlah arsip daerah yang dilakukan pengolahan dan penataan	100 Meter Linier	
							Jumlah arsip daerah yang dilakukan penyelamatan melalui alih media	9740 lembar	
							Jumlah fasilitasi sarana kearsipan perangkat daerah	1.100 box	
						Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaporan pembinaan dan pengawasan kearsipan	1 dokumen	107.895.300
							Jumlah perangkat daerah yang telah dilakukan pengawasan kearsipan	29 OPD	

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKpj) TAHUN 2022**

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah perangkat daerah yang telah mendapatkan asistensi kearsipan	29 OPD		
						Jumlah peserta Sosialisasi Kearsipan	150 orang		
						Jumlah rancangan kebijakan kearsipan yang disusun	3 draft		
						Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase arsip yang dimasukkan dalam SIKN (Sistem Informasi Kearsipan Nasional) melalui JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional)	20%	54.060.350
						Penyediaan informasi, akses, dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN	Jumlah arsip daerah yang diolah menjadi informasi	10.000 nomor	54.060.350
							Jumlah laporan SKM Kearsipan yang tersusun	1 dokumen	
							Jumlah penerima layanan kearsipan	150 orang	
							Jumlah peserta workshop kearsipan	75 orang	

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKpj) TAHUN 2022**

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84 (A)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,9 (Baik)	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100%	7.639.900
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	7 dokumen	2.537.800
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun	9 dokumen	5.102.100
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai standart	100%	3.500.116.576
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	31 orang	3.498.916.576
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah jenis laporan Keuangan yang tersusun (Bulanan/semesteran)	7 dokumen	2.537.800

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKpj) TAHUN 2022**

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai standart	100%	51.511.550
						Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	6 event	51.511.550
							Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah	3 publikasi	
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah sesuai standar	100%	533.144.384
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	4 jenis	2.519.400
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	39 macam	18.975.800
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	1230 dos	328.211.184

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKpj) TAHUN 2022**

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia		35 jenis	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	4 jenis	12.507.500
							Jumlah lembar penggandaan	10000 lembar	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	3 bahan bacaan	6.480.000
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsulasi regional dan nasional yang diikuti	30 rakor	164.450.500
						Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	100%	27.700.000
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	3 macam	27.700.000
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standart	100%	69.959.638

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKpj) TAHUN 2022**

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis Jasa Surat Menyurat yang tersedia	1 jenis	700.000
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	3 rekening	69.259.638
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	309.710.780
						Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	5 unit	131.264.300
							Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	11 unit	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	4 macam	17.092.195
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	1 unit	139.416.285

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKpj) TAHUN 2022**

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	4 macam	21.938.000
<b>JUMLAH</b>								<b>5.671.064.862</b>	

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022 ini memuat tentang kegiatan lanjutan, kegiatan yang dihapus, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Secara ringkas dari total kegiatan sebanyak 11 kegiatan dan 27 sub kegiatan, terdapat 8 sub kegiatan (32%) tidak mengalami perubahan, sebanyak 19 sub kegiatan (68%) mengalami perubahan (10 sub kegiatan mengalami pengurangan dan 9 sub kegiatan mengalami penambahan) di Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022. Adapun rincian perubahan kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.9**  
**Rekapitulasi Perubahan Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja)**  
**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022**

No	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja)			
		Tetap	Bertambah	Berkurang	Jumlah
1.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar	8	9	10	27

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, 2022

Dari tabel diatas, sub kegiatan yang ada dalam APBD Tahun 2022 dan tidak mengalami penambahan maupun pengurangan baik target kinerja maupun pagu indikatif pada Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2022 sebanyak 8 sub kegiatan. Adapun sub kegiatan yang tidak mengalami perubahan pagu anggaran pada Rencana Kerja (Renja) perubahan seperti tersebut dalam dibawah ini :

**Tabel 2.10**  
**Kegiatan Yang Tidak Mengalami Perubahan Pagu Anggaran**  
**Pada Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2022**

No	Sub Kegiatan	PAGU (Rp)		Bertambah / Berkurang
		APBD Penetapan	Perubahan Rencana Kerja (P-Renja)	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.537.800	2.537.800	-

No	Sub Kegiatan	PAGU (Rp)		Bertambah / Berkurang
		APBD Penetapan	Perubahan Rencana Kerja (P-Renja)	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1.200.000	1.200.000	-
3.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.519.400	2.519.400	-
4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.507.500	12.507.500	-
5.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	-
6.	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	47.516.280	47.516.280	-
7.	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	33.032.700	33.032.700	-
8.	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	148.240.200	148.240.200	-

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, 2022

Sub kegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran adalah kegiatan yang mengalami pengurangan baik target kinerja dan pagu indikatif sebanyak 10 sub kegiatan. Hal ini disebabkan karena:

1. Adanya penyesuaian kembali terhadap belanja guna efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan.
2. Pengurangan pagu Zona Integritas karena efisiensi anggaran.
3. Perubahan bentuk aktivitas kegiatan dan menyesuaikan dengan kegiatan Provinsi Jawa Timur sehingga terdapat perubahan target kinerja dan efisiensi anggaran.
4. Pengurangan Pagu Rp 50.000.000,- (Jasa Konsultasi penyusunan Probis Aplikasi Kearsipan Dinamis) dikarenakan Probis dimaksud sudah ditetapkan dalam Keputusan Menpan RB No. 679 tahun 2020 tentang Aplikasi Umum.Bidang Kearsipan Dinamis Peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan SRIKANDI.

Adapun kegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2.11**  
**Sub Kegiatan Yang Mengalami Pengurangan Pagu Anggaran**  
**Pada Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2022**

No	Sub Kegiatan	PAGU (Rp)		Berkurang
		APBD Penetapan	Perubahan Rencana Kerja (Renja)	
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.769.300	5.102.100	(8.667.200)
2.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	59.109.250	51.511.550	(7.597.700)
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.843.000	18.975.800	(2.867.200)
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	326.452.020	325.763.184	(688.836)
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.100.000	6.480.000	(1.620.000)
6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.578.700	27.700.000	(878.700)
7.	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	77.344.200	70.344.200	(7.000.000)
8.	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.244.000	18.698.900	(2.545.100)
9.	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	256.187.500	238.136.200	(18.051.300)
10.	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	111.187.600	61.187.600	(50.000.000)

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, 2022

Sub kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran sebanyak 9 sub kegiatan. Penambahan pagu sub kegiatan tersebut dianggarkan untuk :

1. Penambahan target kinerja dan anggaran pada penyediaan gaji dan tunjangan ASN karena adanya 2 orang CPNS dan 1 orang PPPK.

2. Penambahan pagu penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD karena anggaran perjalanan dinas tidak mencukupi hingga akhir tahun dan masih adanya perjalanan dinas yang urgen untuk dihadiri.
3. Penambahan pagu belanja listrik karena adanya kenaikan TDL.
4. Penambahan anggaran untuk service mobil perpustakaan keliling.
5. Penambahan anggaran untuk servise peralatan kantor.
6. Penambahan anggaran untuk acces point dan instalasi di Ruang Prada Wisesa (aula Dinperpusip).
7. Adanya target bahan pustaka menyesuaikan dengan SSH.
8. Adanya penambahan anggaran dari pergeseran sub kegiatan lainnya untuk fumigasi bahan pustaka persiapan akreditasi perpustakaan.
9. Tambahan pagu untuk pengadaan sarana kearsipan (rekomendasi hasil pengawasan kearsipan eksternal) berupa Thermohigrometer, Troli, Sensor Smoke detector dan Dehumidifier, dimana volume fumigasi dan termit control menyesuaikan luasan lokasi sasaran fumigasi dan termit control serta volume alih media sesuai pagu yang tersedia di DPA SKPD. Adapun target kinerja alih media pada Renstra sejumlah 20.000 lembar akan dipenuhi dari kegiatan rutin non proyek alih media.
10. Tambahan pagu untuk makanan/minuman pengawasan, sosialisasi, asistensi, webinar dan sejenisnya pada sub kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota serta OPD sasaran pengawasan dan asistensi kearsipan bertambah dari 10 OPD menjadi 29 OPD sesuai dengan rekomendasi lisan pada saat Rakornas Pengawasan Kearsipan oleh ANRI.

Sub kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran sebanyak 9 sub kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 2.12**  
**Sub Kegiatan Yang Mengalami Penambahan Pagu Anggaran**  
**Pada Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2022**

No	Sub Kegiatan	PAGU (Rp)		Bertambah
		APBD Penetapan	Perubahan Rencana Kerja (Renja)	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.487.929.897	3.501.016.876	13.086.979
2.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.538.500	168.692.500	53.154.000
3.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.452.517	69.259.638	19.807.121
4.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	111.015.600	123.620.900	12.605.300
5.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.117.800	17.092.195	5.974.395
6.	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.938.000	21.938.000	3.000.000
7.	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	112.664.700	138.409.700	25.745.000
8.	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	197.668.400	226.136.584	28.468.184
9.	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	115.749.300	117.445.200	1.695.900

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, 2022

Kebijakan belanja pada perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022 diarahkan pada:

1. Pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam rangka pencapaian target indikator kinerja daerah pada tahun 2022;

2. Penyesuaian dengan kebijakan dari pemerintah dan kebijakan Pemerintah Kota Blitar lainnya.

Dengan kebijakan belanja tersebut, mengakibatkan perubahan target dan pagu indikatif. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar tahun 2022 terlihat dalam tabel dibawah ini :

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKpj) TAHUN 2022**

---

**Tabel 2.13**  
**Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2022**

KODE					URUSAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		
							RENCANA KERJA (RENJA) 2022	RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2022	RENCANA KERJA (RENJA) 2022	RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2022	BERKURANG/ BERTAMBAH
1			2	3	4	5	6	7	8		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80.9 Indeks	80.9 Indeks	4.319.125.564	4.404.433.723	85.308.159
2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100%	100%	16.307.100	7.639.900	(8.667.200)
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	7 dokumen	7 dokumen	2.537.800	2.537.800	0
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun	9 dokumen	9 dokumen	13.769.300	5.102.100	(8.667.200)

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKpj) TAHUN 2022**

---

KODE					URUSAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		
							RENCANA KERJA (RENJA) 2022	RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2022	RENCANA KERJA (RENJA) 2022	RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2022	BERKURANG/ BERTAMBAH
1			2	3	4	5	6	7	8		
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai standart	100%	100%	3.489.129.897	3.502.216.876	13.086.979
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	28 orang	31 orang	3.487.929.897	3.501.016.876	13.086.979
2	23	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan yang tersusun (Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD)	7 dokumen	7 dokumen	1.200.000	1.200.000	0
2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai standart	100%	100%	59.109.250	51.511.550	(7.597.700)
2	23	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundangan Undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	6 event	6 event	59.109.250	51.511.550	(7.597.700)
						Jumlah Publikasi Program/kegiatan Perangkat Daerah	3 publikasi	3 publikasi			
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah sesuai standar	100%	100%	486.960.420	534.938.384	47.977.964

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKpj) TAHUN 2022**

---

KODE					URUSAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		
							RENCANA KERJA (RENJA) 2022	RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2022	RENCANA KERJA (RENJA) 2022	RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2022	BERKURANG/ BERTAMBAH
1			2	3	4	5	6	7	8		
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	4 jenis	4 jenis	2.519.400	2.519.400	0
2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	39 macam	39 macam	21.843.000	18.975.800	(2.867.200)
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	1208 dos	1230 dos	326.452.020	325.763.184	(688.836)
						Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	35 jenis	35 jenis			
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	4 jenis	4 jenis	12.507.500	12.507.500	0
						Jumlah lembar penggandaan	10000 lembar	10000 lembar			
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	3 bahan bacaan	3 bahan bacaan	8.100.000	6.480.000	(1.620.000)
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	42 rakor	30 rakor	115.538.500	168.692.500	53.154.000

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKpj) TAHUN 2022**

---

KODE					URUSAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		
							RENCANA KERJA (RENJA) 2022	RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2022	RENCANA KERJA (RENJA) 2022	RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2022	BERKURANG/ BERTAMBAH
1			2	3	4	5	6	7	8		
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	100%	100%	28.578.700	27.700.000	(878.700)
2	23	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	3 macam	3 macam	28.578.700	27.700.000	(878.700)
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standart	100%	100%	50.452.517	70.259.638	19.807.121
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia	1 jenis	1 jenis	1.000.000	1.000.000	0
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	3 rekening	3 rekening	49.452.517	69.259.638	19.807.121
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar	100%	100%	188.587.680	210.167.375	21.579.695
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	6 unit	5 unit	111.015.600	123.620.900	12.605.300

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKpj) TAHUN 2022**

---

KODE					URUSAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		
							RENCANA KERJA (RENJA) 2022	RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2022	RENCANA KERJA (RENJA) 2022	RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2022	BERKURANG/ BERTAMBAH
1			2	3	4	5	6	7	8		
					Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	11 unit	11 unit				
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	4 macam	4 macam	11.117.800	17.092.195	5.974.395
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	1 unit	1 unit	47.516.280	47.516.280	0
2	23	01	2.09	11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	4 macam	4 macam	18.938.000	21.938.000	3.000.000
2	23	02			<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>Nilai kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan</b>	<b>81,2 indeks</b>	<b>81,2 indeks</b>	<b>648.713.300</b>	<b>646.861.900</b>	<b>(1.851.400)</b>
						Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	3,2 : 1 Rasio	3,2 : 1 Rasio			
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	0.3 %	0.3 %	392.525.800	408.725.700	16.199.900
2	23	02	2.01	03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pengembangan lokal content	170 orang	170 orang	77.344.200	70.344.200	(7.000.000)

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKpj) TAHUN 2022**

---

KODE					URUSAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		
							RENCANA KERJA (RENJA) 2022	RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2022	RENCANA KERJA (RENJA) 2022	RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2022	BERKURANG/ BERTAMBAH
1			2	3	4	5	6	7	8		
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah laporan Monev Perpustakaan Sekolah	1 dokumen	1 dokumen	33.032.700	33.032.700	0
						Jumlah peserta Lomba Perpustakaan Sekolah	11 sekolah	11 sekolah			
						Jumlah peserta rapat koordinasi monev perpustakaan sekolah	95 orang	95 orang			
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Perpustakaan Sekolah yang mengikuti peningkatan kompetensi perpustakaan sesuai tipologi standart	95 orang	95 orang	21.244.000	18.698.900	(2.545.100)
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang sudah dilakukan entry ke aplikasi perpustakaan	490 eksemplar	860 eksemplar	112.664.700	138.409.700	25.745.000
						Jumlah bahan pustaka yang tersedia	1030 eksemplar	860 eksemplar			

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKpj) TAHUN 2022**

---

KODE					URUSAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		
							RENCANA KERJA (RENJA) 2022	RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2022	RENCANA KERJA (RENJA) 2022	RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2022	BERKURANG/ BERTAMBAH
1			2	3	4	5	6	7	8		
2	23	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	148.240.200	148.240.200	0
						Jumlah laporan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	1 dokumen	1 dokumen			
						Jumlah Laporan SKM Perpustakaan	1 dokumen	1 dokumen			
						Jumlah profil perpustakaan binaan yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen			
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Peningkatan Pemustaka	56%	56%	256.187.500	238.136.200	(18.051.300)
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah konten Layada Cedar (Cerita Anak Dalam Jaringan)	12 konten	12 konten	256.187.500	238.136.200	(18.051.300)
						Jumlah Parenting Literasi yang terlaksana	6 kali	6 kali			
						Jumlah pemustaka yang memanfaatkan layanan ekstensi perpustakaan	35360 pemustaka	35360 pemustaka			

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKpj) TAHUN 2022**

---

KODE			URUSAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU				
					RENCANA KERJA (RENJA) 2022	RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2022	RENCANA KERJA (RENJA) 2022	RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2022	BERKURANG/ BERTAMBAH		
1			2	3	4	5	6	7	8		
				Jumlah peserta bimbingan pemustaka	200 orang	200 orang					
				Jumlah peserta Kafe Literasi	100 orang	150 orang					
				Jumlah peserta lomba minat baca dan lomba peningkatan minat baca	110 orang	56 orang					
				Jumlah peserta rakor pelayanan perpustakaan	97 orang	97 orang					
				Jumlah peserta Wisata Buku	1400 orang	1400 orang					
				Jumlah software perpustakaan yang tersedia	1 aplikasi	1 aplikasi					
2	24	02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Nilai kepuasan pengguna layanan kearsipan	80,5 Indeks	80,5 Indeks	424.605.300	404.769.384	(19.835.916)	
2	24	02	2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip dinamis yang dilakukan pengelolaan	100%	100%	313.417.700	343.581.784	30.164.084	
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip daerah yang dilakukan pemeliharaan melalui	500 m3	460 m3	197.668.400	226.136.584	28.468.184

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKpj) TAHUN 2022**

---

KODE					URUSAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		
							RENCANA KERJA (RENJA) 2022	RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2022	RENCANA KERJA (RENJA) 2022	RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2022	BERKURANG/ BERTAMBAH
1		2	3	4	5	6	7	8			
					Fumigasi dan Termite Control						
					Jumlah arsip daerah yang dilakukan pengolahan dan penataan	105 Meter Linier	105 Meter Linier				
					Jumlah arsip daerah yang dilakukan penyelamatan melalui alih media	20000 lembar	9740 lembar				
					Jumlah fasilitasi sarana kearsipan perangkat daerah	1100 box	1100 box				
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaporan pembinaan dan pengawasan kearsipan	1 dokumen	1 dokumen	115.749.300	117.445.200	1.695.900
					Jumlah perangkat daerah yang telah dilakukan pengawasan kearsipan	10 OPD	29 OPD				
					Jumlah perangkat daerah yang telah mendapatkan asistensi kearsipan	10 OPD	29 OPD				

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKpj) TAHUN 2022**

---

KODE				URUSAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		
						RENCANA KERJA (RENJA) 2022	RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2022	RENCANA KERJA (RENJA) 2022	RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2022	BERKURANG/ BERTAMBAH
1			2	3	4	5	6	7	8	
					Jumlah peserta Sosialisasi Kearsipan	150 orang	150 orang			
					Jumlah rancangan kebijakan kearsipan yang disusun	3 draft	3 draft			
2	24	02	2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Percentase arsip yang dimasukkan dalam SIKN (Sistem Informasi Kearsipan Nasional) melalui JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional)	20%	20%	111.187.600	61.187.600	(50.000.000)
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah arsip daerah yang diolah menjadi informasi	10000 nomor	111.187.600	61.187.600	(50.000.000)
					Jumlah laporan SKM Kearsipan yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen			
					Jumlah penerima layanan Kearsipan	150 orang	150 orang			
					Jumlah peserta Workshop Kearsipan	75 orang	75 orang			

### **BAB III**

#### **PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (WAJIB, PILIHAN DAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN)**

##### **3.1. TUJUAN**

Tujuan dari Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah adalah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program/kegiatan yang mendukungnya. Indikator kinerja program/kegiatan dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek-aspek yang relevan, sehingga ditentukan indikator kinerja program/kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar berdasarkan kelompok tujuan dan sasaran.

Realisasi tujuan yang akan diuraikan disini merupakan capaian kinerja dari tujuan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022 sesuai pembagian urusan pemerintahan daerah serta mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan RPJMD Kota Blitar 2021-2026.

Pengukuran Capaian Kinerja merupakan komitmen keberhasilan atas kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan/atau sasaran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar dan sebab-sebab tercapai dan tidaknya kinerja yang diharapkan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian

kinerja serta indikator kinerja.

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Blitar pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

***Urusan Perpustakaan***

Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa indikator kinerja kunci urusan pemerintahan bidang perpustakaan, salah satu outcome yang harus dicapai adalah Tingkat Kegemaran Membaca.

Menindaklanjuti aturan tersebut, pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Blitar Tahun 2021-2026, maka tahun 2022 merupakan tahun pertama untuk penghitungan Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kota Blitar.

Pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Blitar periode sebelumnya yaitu tahun 2016-2021 masih dilakukan pengukuran Indeks Minat Baca. Kegemaran membaca seseorang dimulai dari adanya minat membaca, dimana ketika minat membaca telah memenuhi diri seseorang sehingga sangat senang membaca, maka menjadi kegemaran membaca. Tingkat kegemaran membaca adalah sikap ketertarikan seseorang pada kegiatan membaca dari berbagai media yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Adapun nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat adalah nilai yang menunjukkan tingkatan kegemaran membaca masyarakat.

Survei Tingkat Kegemaran Membaca merupakan bagian dari upaya dalam rangka memonitor kondisi gemar membaca masyarakat dan mendapatkan gambaran kondisi tingkat kegemaran membaca masyarakat Kota Blitar setiap tahun sehingga dapat dijadikan rekomendasi untuk menentukan kebijakan daerah dan strategi pengembangan literasi serta sejahteranaya kontribusi masyarakat dalam menumbuhkembangkan gemar membaca dan ke depannya akan menjadi budaya baca masyarakat Kota Blitar.

Guna mewujudkan misi ke-2 Walikota Blitar di dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar berupaya untuk mewujudkan misi tersebut melalui meningkatkan kegemaran membaca masyarakat.

Aktivitas membaca masyarakat Kota Blitar diukur melalui 5 (lima) indikator yang sudah ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) sejak tahun 2021 yaitu:

Kriteria	Indikator
Nilai tingkat kegemaran membaca	1. Frekuensi membaca
	2. Durasi membaca
	3. Jumlah bahan bacaan
	4. Frekuensi Akses Internet
	5. Durasi Akses Internet

Adapun nilai konversi dan kategori Tingkat Kegemaran Membaca untuk melakukan analisa terhadap hasil perhitungan Indeks Kegemaran Membaca, dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Nilai presepsi	Nilai Konversi	Kategori
1	0 - 20,00	Sangat rendah
2	20,01 - 40,00	Rendah
3	40,01 - 60,00	Sedang
4	60,01 - 80,00	Tinggi
5	80,01 – 100	Sangat Tinggi

Sasaran Strategis Urusan Perpustakaan diambil dari Tujuan Renstra yaitu Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat dan capaian sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU Eselon II)**  
**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022**  
**Urusan Perpustakaan**

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Rumus Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	%	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6	7	
1	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	47	47,49	101,04	Tercapai

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, 2022*

Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kota Blitar pada tahun 2022 dari target sebesar 47 terealisasi sebesar 47,49 atau kategori **SEDANG**. Keberhasilan ini disebabkan oleh terjalin kerjasama yang baik antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar dengan Perangkat Daerah se Kota Blitar dalam rangka menumbuh-kembangkan kegemaran membaca. Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat Kota Blitar masuk kategori SEDANG, sehingga masih diperlukan regulasi dan kebijakan yang mengarah pada peningkatan kegemaran membaca masyarakat

Berbagai kegiatan peningkatan budaya literasi masyarakat telah dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar sebagai upaya untuk meningkatkan kegemaran membaca masyarakat Kota Blitar pada tahun 2022 dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain :

- 1) Layanan teknis : pengembangan, pengolahan, penyimpanan, perawatan koleksi perpustakaan serta otomasi dan kerjasama perpustakaan.
- 2) Layanan di tempat : layanan umum, layanan Blitar Corner (buku-buku local konten dan buku-buku karya penulis *mBlitar*), layanan referensi dan literasi ceria (ruang layanan anak).
- 3) Layanan ekstensi : LTPS (Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah), layanan mobil perpustakaan keliling, layanan Bulk Loan (paket pinjam buku) pada Pojok Baca Kelurahan/Kecamatan/OPD layanan publik dan taman baca yang dikelola oleh kelompok masyarakat.

Berdasarkan surat Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional RI Indonesia Nomor : 6830/4/PPM.00.00/XII.2022 tanggal 8 Desember 2022 perihal Hibah Pojok Baca Digital (POCADI) dan Surat Keputusan Kepala Perpusnas RI Nomor 234 Tahun 2022 tentang Penetapan Perpustakaan Provinsi/Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Pojok Baca Digital Tahap II Tahun 2022 bahwa Kota Blitar termasuk salah satu dari 30 daerah yang menerima hibah Pojok Baca Digital (POCADI) dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Blitar khususnya bidang literasi. Sesuai hasil rapat koordinasi di Ruang Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar bersama Dinas Pendidikan Kota Blitar tanggal 14 Desember 2022, Pojok Baca Digital ini diletakkan di Taman Baca (Manca) Kebon Rojo Kota Blitar. Hibah Pojok Baca Digital (POCADI) dari Perpustakaan Nasional RI berupa 350 judul (700 eksemplar) buku, 4 set PC All in One, 1 unit Digital Library Station POCADI dan 1 set Meubelair POCADI.

- 4) Layanan online : keanggotaan online, katalog online, e-book, sirkulasi pesan ambil/antar, Cedar (Cerita Anak Dalam Jaringan) yang ditayangkan melalui Instagram dan Youtube Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar.  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar telah memiliki 2 akun e-book yang dapat di akses melalui playstore yaitu e-perpustakaan Kota Blitar (buku-buku elektronik terbitan selain Gramedia) dan E-Library Kota Blitar (buku-buku elektronik terbitan Gramedia).
- 5) Pengembangan gemar membaca : Wisata Buku untuk siswa TK dan SD/MI, Lomba Bercerita untuk siswa SD/MI, Lomba Implementasi Budaya Baca untuk siswa SMP/MTs, bedah buku local content, Bimbingan Pemustaka SMP/MTs, Kafe Literasi (KAngen Fokus ngobrol-nE Literasi), Workshop Kepenulisan, Lomba Kepenulisan tentang Kota Blitar dalam rangka menggali potensi kepenulisan tentang kearifan lokal Kota Blitar sekaligus menambah koleksi *Local Content* dan Penerbitan Naskah *Local Content*. Bedah buku local content dengan mengambil judul buku *Grebeg Pancasila : Jejak Pemberani Blitar dari Masa ke Masa* yang ditulis oleh Purwanto (Budayawan) dengan narasumber pembedah : Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, MS. (Anggota DPR RI

dan mantan Walikota Blitar periode 2000-2010) dan Much. Taufik, SH.,M.AP. (Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Provinsi Jawa Timur).

Sedangkan Lomba Menulis Buku tentang Kota Blitar tahun 2022 dimenangkan oleh naskah berjudul Bosho Camondan-Bahasa Pergaulan dan Bahasa Perjuangan (juara 1), Jejak Sejenak di Bumi Balitar : Kisah Para Arya di Kota Patria (juara 2) dan Santren : Tentang Mistis, Asal Usul, Sosok Kyai Der Pingidan Kyai Abdul Djamal (juara 3).

Pada tahun 2022 mulai dirintis inovasi kegiatan Parenting Literasi yang melibatkan orang tua dalam pengenalan gemar membaca sejak dini.

- 6) Pembinaan Perpustakaan : monev perpustakaan sekolah, lomba perpustakaan sekolah tingkat SMP/MTs, sosialisasi kepustakawan, peningkatan kapasitas pengelolaan perpustakaan sekolah, pendataan perpustakaan binaan dan penyusunan profil perpustakaan sekolah.

Berdasarkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penetapan Perpustakaan Kabupaten/Kota dan Perpustakaan Desa Penerima Bantuan Peningkatan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Tahun 2002, Kota Blitar terpilih menjadi salah satu mitra dan penerima bantuan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) bersama 4 Kota dan 2 Kabupaten di Jawa Timur serta 89 Kabupaten/Kota se Indonesia.

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) merupakan bagian dari program prioritas nasional dengan tujuan untuk memperkuat peran perpustakaan umum (Perpustakaan Kabupaten/Kota) dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia yang unggul melalui peningkatan kemampuan literasi untuk mewujudkan Indonesia maju, dengan tagline Literasi untuk Kesejahteraan.

Bantuan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dari Perpustakaan Nasional RI yang diterima Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar berupa 3 unit personal komputer, 1 unit server dan 750 judul (1.500 eksemplar) buku.

Berbagai kegiatan tersebut diatas merupakan upaya untuk mengenalkan budaya baca sejak dini, menumbuhkan kegemaran membaca masyarakat serta meningkatkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi guna mewujudkan **BLITAR MASTER (Blitar Literasi menuju Masyarakat Cerdas dan Berkarakter)**.

### ***Urusan Karsipan***

Dalam rangka mewujudkan misi ke-5 Walikota Blitar yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi, Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Blitar berupaya untuk mewujudkan misi tersebut melalui Indeks Karsipan.

Meningkatnya tata karsipan pemerintahan daerah dengan indikator Indeks Karsipan merupakan Tujuan dari Renstra Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Blitar tahun 2021-2026 Urusan Karsipan, dengan target 35 pada tahun 2022.

Realisasi Tujuan Renstra tahun 2022 Urusan Karsipan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.2**

**Realisasi Tujuan Renstra Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Blitar Tahun 2022**  
**Urusan Karsipan**

No.	Tujuan Renstra	Indikator Kinerja	Rumus Penghitungan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya tata karsipan pemerintahan daerah	Indeks Karsipan	Hasil Indeks Karsipan	35	80,17 ( A )	229,06%

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Blitar, 2022*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Karsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia menyelenggarakan pengawasan karsipan terhadap Kementerian dan Lembaga tingkat pusat, Perguruan Tinggi serta Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan oleh Pusat Akreditasi Karsipan, serta Pemerintah Provinsi melaksanakan pengawasan karsipan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Lembaga Karsipan Daerah Provinsi.

Berdasarkan Pengumuman ANRI Nomor : AK.01.02/2.5/2022 tentang Hasil Pengawasan Karsipan Tahun 2022, Indeks Karsipan Kota Blitar memperoleh nilai sebesar 80,17 dengan kategori "A" (Memuaskan).

Peningkatan predikat capaian Indeks Karsipan tahun 2022 dengan keterangan sebagai berikut :

- 1) Tercapainya pemenuhan bukti dukung pada aspek Kebijakan, Pengelolaan Arsip Inaktif (PAI), dan aspek Sumber Daya Manusia dan Kearsipan (terpenuhinya arsiparis pada 8 OPD).
- 2) Indeks Kearsipan Tahun 2022 diperoleh dari agregrat nilai Pengawasan Internal (40%), dan Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal (60%), sedangkan pada tahun 2021 Indeks Kearsipan hanya diambil dari nilai pengawasan karsipan eksternal.

Upaya-upaya untuk meningkatkan Indeks Kearsipan pada Pemerintah Kota Blitar pada tahun 2022 sebagai berikut :

Guna mendukung Gerakan PETA (Gerakan Penyadaran Tertib Arsip), menuju BLITAR SATRIA (Blitar Sadar Tertib Arsip) dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu :

- a) Sosialisasi, pembinaan dan pemasarakatan karsipan, melalui kegiatan :
  - Sosialisasi Pengelolaan Arsip Keluarga (*Personal File*) bagi Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kepanjenkidul dalam rangka memberikan pengenalan karsipan guna menumbuh-kembangkan masyarakat sadar tertib arsip melalui pembudayaan pengelolaan dan penyelamatan arsip serta memperhatikan amanat Musrenbang Tahun 2022 Kecamatan Kepanjenkidul. Adapun peserta sejumlah 150 orang terdiri dari Ketua RT/RW, LPMK, Karang Taruna, UKM, Pokmas, Pengurus Posyandu, Dharma Wanita, PKK dan Ormas di Wilayah Kecamatan Kepanjenkidul.
  - Fasilitasi Bimbingan dan Konsultasi Karsipan OPD baik secara tatap muka, maupun melalui media telepon (Whatsapp).
  - Fasilitasi Penerimaan Kunjungan Studi Orientasi Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kabupaten Badung.
  - Fasilitasi Penerimaan Kunjungan Tim Bakorwil Malang dalam rangka Koordinasi Pelaksanaan Penyelamatan Arsip Aset Desa/Kelurahan.
  - Fasilitasi Penerimaan Kunjungan Tim Pembinaan Dinas Perpustakaan dan Karsipan Provinsi Jawa Timur dalam rangka Koordinasi Penilaian Angka Kredit Arsiparis.
  - Fasilitasi Penerimaan Kunjungan Studi Orientasi Karsipan dari mahasiswa Akademi Komunitas Negeri (AKN) Kota Blitar Prodi Operasionalisasi Perkantoran

Digital dan Prodi Administrasi Server dan Jaringan Komputer Kekhususan Administrasi Perkantoran.

- Fasilitasi Penerimaan Kunjungan Magang Mahasiswa Universitas Negeri Malang Jurusan Ilmu Perpustakaan.
- b) Fasilitasi Penyusunan Rancangan Kebijakan Kearsipan
- Kegiatan ini merupakan tindak lanjut amanat Perda Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
  - Berdasarkan surat Kepala ANRI Nomor B-PK.02.09/14/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif dan Substantif Pemerintah Kota Blitar, telah disetujui sejumlah 8 (delapan) urusan JRA dan selanjutnya melalui fasilitasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar diterbitkan 8 (delapan) Peraturan Walikota Blitar sebagai berikut :
- (1) Peraturan Walikota Blitar No. 37 Tahun 2022 tentang JRA Urusan Urusan Kebudayaan di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
  - (2) Peraturan Walikota Blitar No. 38 Tahun 2022 tentang JRA Urusan Perencanaan Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
  - (3) Peraturan Walikota Blitar No. 39 Tahun 2022 tentang JRA Urusan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
  - (4) Peraturan Walikota Blitar No. 40 Tahun 2022 tentang JRA Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
  - (5) Peraturan Walikota Blitar No. 41 Tahun 2022 tentang JRA Urusan Keaparaturan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
  - (6) Peraturan Walikota Blitar No. 42 Tahun 2022 tentang JRA Urusan Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
  - (7) Peraturan Walikota Blitar No. 43 Tahun 2022 tentang JRA Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
  - (8) Peraturan Walikota Blitar No. 44 Tahun 2022 tentang JRA Urusan Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

c) Peningkatan Kapasitas SDM Kearsipan.

- Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk Fasilitasi Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Arsiparis dan Personil Bidang Kearsipan melalui partisipasi dalam berbagai kegiatan Peningkatan Kapasitas yang diselenggarakan oleh ANRI, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur maupun Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI) Wilayah Jatim.
- Adapun kegiatan peningkatan kapasitas yang diikuti Arsiparis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun 2022 adalah Bimtek Aplikasi Srikandi pada Bulan Juli 2022 dan berbagai Webinar dengan tema Kearsipan yang diikuti oleh Pejabat Struktural, Arsiparis dan segenap personil Bidang Kearsipan non Arsiparis.

d) Sosialisasi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Internal

- Kegiatan dengan Materi Teknis Pengawasan /Audit Kearsipan Internal ini sebagai tindak lanjut Peraturan Walikota Blitar Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengawasan serta Surat Walikota Blitar Nomor 069.5/1663/410.020.5/2022 Tanggal 25 April 2022 perihal Pelaksanaan Rekomendasi KEMENPAN dan RB terhadap hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2021.
- Kegiatan yang dilaksanakan pada Bulan Juni 2022 tersebut, diikuti oleh 29 perangkat daerah dengan masing-masing menugaskan 1 (satu) orang pejabat struktural/JFT yang setara.
- Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah guna meningkatkan apresiasi, pemahaman dan kesiapan OPD Pencipta Arsip dalam pelaksanaan Pengawasan/Audit Kearsipan Internal dan sebagai upaya untuk mendorong kesinambungan pencipta arsip dan lembaga karsipan untuk menyelenggarakan karsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar karsipan, dan peraturan perundang- undangan.

e) Indeks Karsipan, Pengawasan Karsipan Internal dan Asistensi Karsipan diwujudkan dalam beberapa kegiatan sebagai berikut :

- *Zoom Meeting Rakor Program Kerja Pengawasan Karsipan (PKPKT)* Tahun 2022 pada Bulan Februari berdasarkan Surat ANRI Nomor : B-AK.01.02/442/2022

Tanggal 15 Februari 2022 dilanjutkan Rakor Persiapan Pengawasan Kearsipan Tahun 2022 pada Bulan April berdasarkan Surat ANRI Nomor : B-AK.01.02/924/2022 Tanggal 28 Maret 2022.

- Rakor Timwas Kearsipan Internal Pemerintah Kota Blitar yang diikuti oleh Unsur BKPSDM, Inspektorat Daerah, Bagian Hukum, Bagian Organisasi serta Unsur Lembaga Kearsipan Daerah Kota Blitar ini bertujuan untuk mempersiapkan, memperoleh kesepahaman mengenai arsip dan karsipan, urgensi, teknis pengawasan/audit karsipan internal serta penyiapan instrument pengawasan karsipan internal.
- Pengawasan/Audit Karsipan Internal pada 29 OPD dilaksanakan bulan Juni–November 2022 yang bertujuan untuk menjamin bahwa penyelenggaraan karsipan dinamis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Karsipan Internal dengan Sekretaris Daerah Kota Blitar sebagai Pengarah dan keanggotaan tim terdiri dari Unsur Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Blitar, Inspektorat Daerah, BKPSDM, Bagian Hukum dan Bagian Organisasi.
- Adapun teknis pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Karsipan, Keputusan Kepala ANRI Nomor 92 Tahun 2021 tentang Instrumen dan Nilai Pengawasan Karsipan serta Peraturan Walikota Blitar Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Karsipan.
- Kegiatan pengawasan karsipan tersebut selaras dengan amanat Permenpan RB Nomor 30 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi bahwa, kinerja Bidang Karsipan (Indeks Karsipan) menjadi salah satu elemen pengungkit keberhasilan Reformasi Birokrasi dari Unsur Penataan Tata Laksana, dimana pengukuran indikatornya dilakukan dengan melihat kesesuaian kondisi pengelolaan arsip pada instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Karsipan.

- Sejalan dengan kegiatan pengawasan Kearsipan Internal, dilaksanakan Pembinaan melalui Sosialisasi dan Asistensi Kearsipan pada OPD sasaran Pengawasan Kearsipan, berupa Sosialisasi dan Asistensi Penataan Arsip Aktif dengan sarana simpan *Hanging folder* dan penataan arsip *personal file* pada *document keeper*.

### **3.2 SASARAN**

Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Sedangkan sasaran kegiatan adalah pelayanan masyarakat yang maksimal melalui masing-masing OPD baik pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, pelaksanaan urusan pilihan dan pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan.

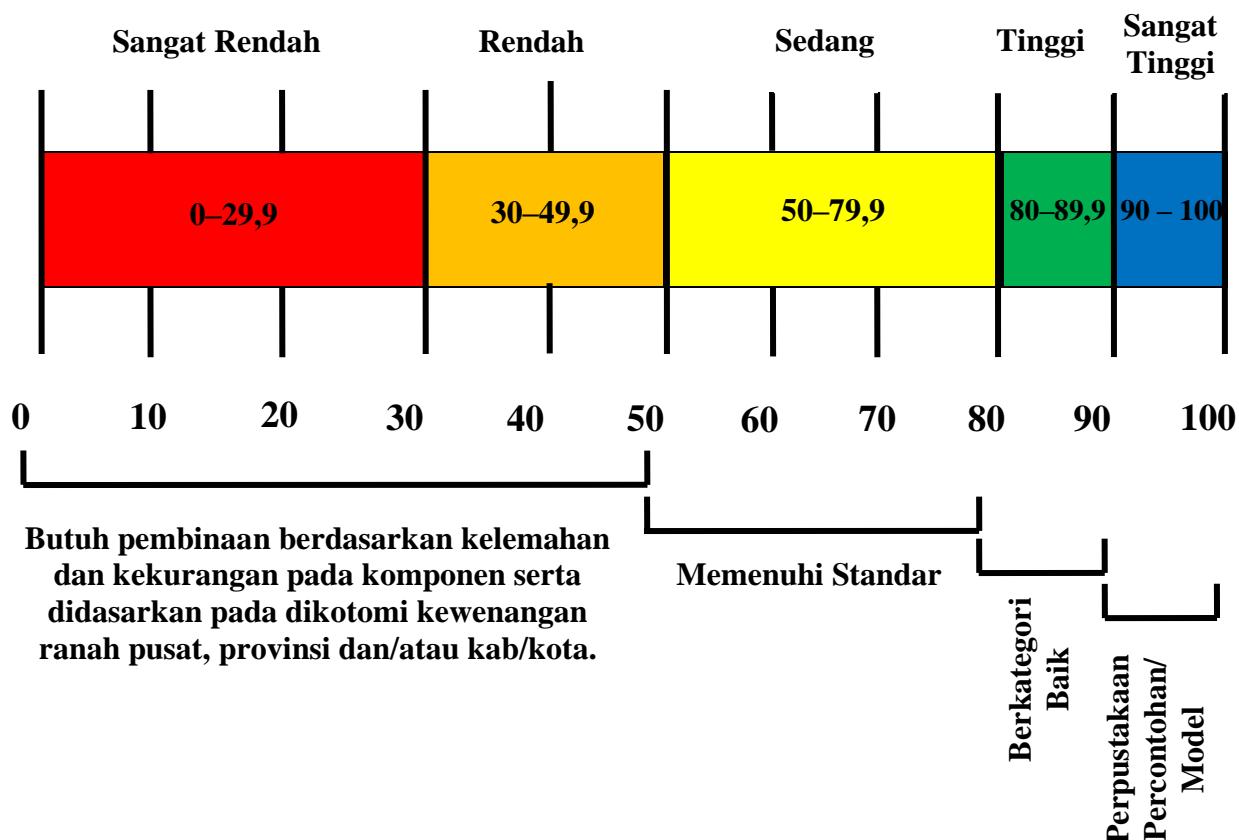
Sebagai bagian tidak terpisahkan dari Tingkat Kegemaran Membaca adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat dengan pengukuran pada Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) dan Aspek Masyarakat (AM).

Keduanya merupakan Indikator Kinerja Kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang perpustakaan. Karakteristik Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) lebih memfokuskan pada sisi hulu yakni pengembangan dan penguatan kelembagaan dan infrastruktur perpustakaan. Hal inilah yang membedakannya dengan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) yang lebih memfokuskan pada sisi hilir yakni pengembangan budaya baca, kegemaran membaca dan literasi masyarakat.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah data tingkat pembangunan yang diperoleh dari Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) dan Aspek Masyarakat (AM) yang terdiri sebagai berikut :

Kriteria	Unsur Pembangun
Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM)	1. Pemerataan pelayanan perpustakaan (UPLM1) 2. Ketersediaan koleksi perpustakaan (UPLM2) 3. Ketercukupan tenaga perpustakaan (UPLM3) 4. Kunjungan masyarakat (UPLM4) 5. Perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan (UPLM5) 6. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Sosialisasi Perpustakaan (UPLM6) 7. Pemustaka yang terdaftar (UPLM7)
Aspek Masyarakat (AM)	Jumlah penduduk wilayah setempat (jumlah penduduk menurut BPS, jumlah penduduk yang bekerja, jumlah civitas sekolah yang terdiri dari siswa dan guru dari jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/K/MA serta jumlah civitas akademika)

Tingkatan skor Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) sesuai yang telah ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) tahun 2021 dengan skor indeks menggunakan skala level 100 sebagai berikut :



Adapun Sasaran Renstra Urusan Perpustakaan tahun 2021-2026 yaitu Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dengan capaian tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)**  
**Kota Blitar Tahun 2022**

<b>INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT (IPLM) TAHUN 2022</b>		<b>11,37</b>
UPLM 1	Pemerataan layanan perpustakaan	0,002846
UPLM 2	Ketercukupan koleksi	0,059917
UPLM 3	Ketercukupan tenaga perpustakaan	0,001978
UPLM 4	Tingkat kunjungan masyarakat/hari	0,031306
UPLM 5	Perpustakaan ber-SNP	0,168404
UPLM 6	Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Sosialisasi Perpustakaan	0,000501
UPLM 7	Anggota perpustakaan	0,351408
AM	Jumlah penduduk semester 1 tahun 2022  Penduduk usia sekolah tahun 2022 (5-19 tahun)  Penduduk usia perguruan tinggi tahun 2022 (20-24 tahun)	158.244  47.732  23.773

*Sumber: IPLM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, 2022*

**Tabel 3.4**  
**Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Intrepretasi**  
**Kota Blitar Tahun 2022**

<b>Indikator Indeks Pembangunan</b>		<b>Nilai</b>	<b>Intrepretasi</b>
1.	Rasio ketersediaan perpustakaan		
a.	Rasio ketersediaan perpustakaan umum	0,000006	Terdapat 6 perpustakaan per 100.000 penduduk
b.	Rasio ketersediaan perpustakaan sekolah	0,002660	Terdapat 26 perpustakaan sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah

Indikator Indeks Pembangunan		Nilai	Intrepretasi
c.	Rasio ketersediaan perpustakaan perguruan tinggi	0,000252	Terdapat 25 perpustakaan perguruan tinggi per 100.000 penduduk usia perguruan tinggi
2.	Presentase perpustakaan ber-SNP	19,4%	Terdapat 19,4% perpustakaan yang dipresensi memenuhi standar nasional perpustakaan
3.	Rasio ketercukupan koleksi Perpustakaan berdasarkan IFLA/ UNESCO	0,059917	Belum memenuhi
4.	Kekurangan jumlah koleksi berdasarkan IFLA/UNESCO	313.477	Kekurangan jumlah koleksi di Kota Blitar sebanyak 313.477
5.	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan	6085	Setiap 1 tenaga perpustakaan melayani 6085 penduduk: Tidak Mencukupi
6.	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	0,78%	Presentase jumlah kunjungan per hari dibagi penduduk sebanyak 0,78% belum ideal
7.	Tingkat keaktifan pemanfaatan Perpustakaan	0,94%	Keaktifan pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat sebesar 0,94%
8.	Tingkat engagement anggota perpustakaan	18,6%	Terdapat 18,6% penduduk Kota Blitar yang merupakan anggota perpustakaan

*Sumber: IPLM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, 2022*

**Tabel 3.5.**  
**Capaian Indikator Sasaran Urusan Perpustakaan**  
**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Rumus Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	%	Interpretasi Capaian Sasaran
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Hasil Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	6,5	11,37	174,92	Tercapai

*Sumber: IPLM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, 2022*

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Blitar mulai dilakukan penghitungan pada tahun 2022 dengan target 6,5 dan realisasi 11,37. Meskipun realisasi tahun 2022 telah melebihi target yang ditetapkan, namun masih termasuk dalam skor **SANGAT RENDAH**.

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Blitar tahun 2022, rekomendasi yang harus dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Blitar adalah :

1) Ketercukupan koleksi

Kekurangan jumlah koleksi perpustakaan disebabkan oleh pengadaan bahan bacaan di tiap perpustakaan yang masih rendah, kurangnya anggaran pengadaan bahan pustaka baru bagi perpustakaan, sehingga mayoritas perpustakaan di Kota Blitar mengandalkan bahan bacaan yang dihibahkan oleh berbagai pihak sehingga tingkat ketersediaan koleksi perpustakaan tidak memiliki nilai yang signifikan baik. Oleh sebab itu, Dinas Perpustakaan dan Karsipan dapat melakukan evaluasi sebagai tindakan awal untuk memperkaya koleksi perpustakaan dan penambahan anggaran khusus pengadaan koleksi bahan pustaka sekaligus turut menyuplai perpustakaan binaan dengan sistem Bulkloan ataupun LTPS (Terpadu Perpustakaan Sekolah).

2) Ketercukupan tenaga perpustakaan

Ketercukupan tenaga perpustakaan di Kota Blitar masih melebihi nilai standar yang ditentukan IFLA/UNESCO, sehingga perlu perhatian khusus. Peningkatan kuantitas tenaga perpustakaan dapat dilakukan secara bertahap diimbangi dengan peningkatan kualitas petugas perpustakaan. Kedua hal tersebut hendaknya dilakukan secara kolaboratif mengingat kebutuhan perpustakaan di Kota Blitar tidak hanya jumlah tetapi juga pada kemampuan dan profesionalitas yang dimiliki.

Peningkatan kualitas tenaga perpustakaan dapat diupayakan melalui pelatihan/ workshop berkala dengan materi yang mencakup urusan perpustakaan secara komprehensif.

3) Peningkatan pemanfaatan perpustakaan

Rendahnya tingkat pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat dapat dipengaruhi oleh berbagai sebab. Peningkatan jumlah pemanfaatan perpustakaan tentunya memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Perencanaan operasional penting untuk memastikan aktiitas dari perpustakaan fokus untuk mencapai prioritas dan tujuan dari perencanaan dan strategi untuk menarik pemustaka berkunjung ke perpustakaan.

4) Peningkatan sarana prasarana

Kurangnya sarana prasana perpustakaan menjadi akar masalah terhambatnya pengembangan perpustakaan. Peningkatan sarana prasarana dan fasilitas perpustakaan dapat dilaksanakan dengan menambah anggaran pada tahun anggaran selanjutnya dengan fokus pada perbaikan sarana prasarana perpustakaan. Gedung/ruang perpustakaan yang dianggap tidak representatif dan lokasi perpustakaan yang tidak strategis dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perencanaan perbaikan/pembangunan perpustakaan.

Rekomendasi dan hasil evaluasi ini dapat dijadikan referensi dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut, khususnya dalam peningkatan kegemaran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kota Blitar.

***Urusan Kearsipan***

Sasaran strategis Urusan Kearsipan adalah Persentase Arsip Daerah yang Dilakukan Penyelamatan dan Pelestarian, yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Urusan Kearsipan.

Adapun capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Kearsipan sebagai berikut :

**Tabel 3.6.**

**Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU Eselon II)**

**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022**

**Urusan Kearsipan**

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Rumus Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	%	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6		7
1	Persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian	Jumlah arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian pada tahun n dibagi Jumlah arsip daerah yang harus dilakukan penyelamatan dan pelestarian	%	100	100	100	Tercapai

		pada tahun n x 100%					
--	--	------------------------	--	--	--	--	--

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, 2022*

Persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian merupakan Sasaran dari Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar tahun 2021-2026 Urusan Kearsipan, dengan target arsip yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 (5 tahun) sebanyak 100.000 lembar. Sedangkan target arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian tahun 2022 sebesar 100% (20.000 lembar) dan terealisasi sebesar 100% (20.000 lembar).

Upaya-upaya untuk meningkatkan penyelamatan dan pelestarian arsip daerah pada Pemerintah Kota Blitar telah banyak dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar.

Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Kearsipan sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kab/Kota melalui JIKN diwujudkan dalam beberapa kegiatan yaitu :
  - a) Pengembangan Sistem Informasi, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
    - Selaras dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pasal 43 bahwa Kearsipan merupakan salah satu Komponen Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik. Relevan dengan hal tersebut, melalui Keputusan Menteri PAN RB RI Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis, ditetapkan SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) sebagai Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis yang mana merupakan salah satu indikator penilaian dan pengungkit Indeks SPBE dalam Evaluasi SPBE.
    - Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan SPBE dilingkungan Pemerintah Kota Blitar pasal 23 bahwa “Aplikasi Kearsipan merupakan salah satu Aplikasi Umum Pengolah Data dalam

*SPBE.*“ Pada evaluasi SPBE tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, Layanan Kearsipan termasuk dalam **Domain 4** (Layanan) **Aspek Ke 7** ( Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ) dan **Indikator ke 37** (Layanan Kearsipan Dinamis) dengan **Kuesioner** : Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan

- Menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan arsip dinamis harus menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). Sehubungan dengan itu, telah ditetapkan SK Walikota Blitar Nomor : 188/165/HK/410.010.2/2022 tentang Tim Percepatan Penerapan Aplikasi SRIKANDI di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar dan kewajiban Penerapan Srikandi tertuang dalam SK Walikota Blitar Nomor : 188/249/HK/410.010.2/2022 tentang Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi.
- Guna percepatan implementasi Srikandi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bersama perangkat daerah terkait telah melaksanakan Orientasi dan *Sharing Knowledge* ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar, Rakor Persiapan Implementasi, Penyusunan Instrumen Kearsipan, Bimtek dan Uji Coba Aplikasi SRIKANDI.
- Adapun untuk pemenuhan instrumen Kearsipan pada Srikandi, telah diterbitkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 82 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Arsip dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 83 Tahun 2022 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis.
- Di tahun 2022 Pemerintah Kota Blitar telah mengajukan Permohonan Akun Live Srikandi kepada ANRI melalui surat Walikota Blitar Nomor : 045/430/410.114.3/2022 tanggal 11 November 2022. Sehubungan dengan telah terpenuhinya 4 (empat) pilar kearsipan berupa instrumen kearsipan pada Srikandi maka, melalui surat ANRI tanggal 30 Nopember 2022 Nomor : B-PK.02.08/4602/2022 diberikan Akun Live Srikandi bagi Pemerintah Kota Blitar.

➤ Adapun terkait dengan pelaksanaan tugas Pemerintah Kota Blitar sebagai Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang tergabung dalam Simpul JIKN telah mengikuti Diseminasi Hasil Evaluasi Pilot Project Simpul Jaringan yang dilaksanakan pada Bulan November 2022. Hal ini selaras dengan upaya evaluasi dan penyebarluasan hasil dari seluruh proses kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Kearsipan oleh Simpul Jaringan Pilot Project sebagai amanat Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan pemenuhan target Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tahun 2020-2024 yaitu 50.600 berkas arsip dan untuk tahun 2022 sebesar 12.825 arsip, yang diakses oleh publik serta dimanfaatkan sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai Pusat Jaringan Nasional.

b) Penyediaan Sarana Penyimpanan Data dan Layanan Informasi

Guna peningkatan kapasitas *Server Storage sebagai* pusat penyimpanan data dan informasi bidang karsipan, maka dilaksanakan *upgrade* melalui penyediaan sarana penunjang berupa *Hardisk External* dengan kapasitas 2TB.

2) Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis diwujudkan dalam beberapa kegiatan yaitu:

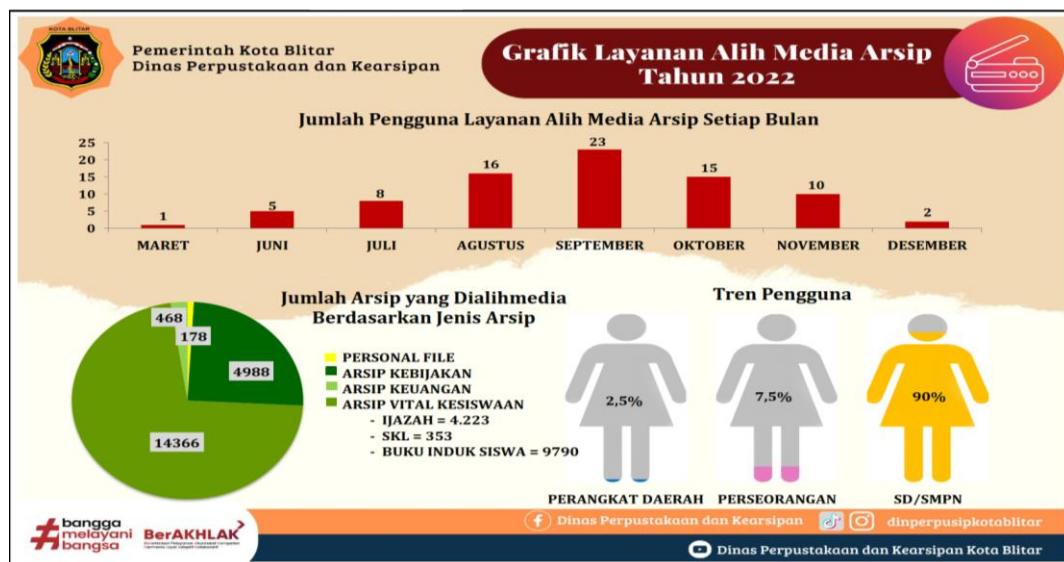
a) Alih Media Arsip Vital

- Merupakan upaya Preservasi Arsip Vital melalui Alih Media (*scanning*) Dokumen Buku Induk Siswa. Hal ini dimaksudkan guna penyelamatan arsip vital di lingkungan kependidikan yang bertujuan menjamin ketersediaan dan keselamatan data siswa yang autentik dan terpercaya.
- Pada tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Karsipan melakukan *scanning*/alih media buku induk siswa SMPN 8 Kota Blitar Tahun Angkatan 1985 s/d 1999 dan 2000 s/d 2014 sejumlah 9790 lembar.
- Selain kegiatan tersebut, dilaksanakan kegiatan PRO ARVITA (Program Arsip Vital), yaitu penyelamatan arsip vital sebagai kegiatan Non Proyek melalui LYDIA ARVITA (Layanan Alih Media Arsip Vital) berupa *scanning* Ijazah dan SKL

(Surat Keterangan Lulus) siswa SMPN dan SDN se-Kota Blitar tahun kelulusan 2022.

- Kegiatan tersebut merupakan upaya implementasi “*Saving and Restoring Student Vital File Program*” yang menjamin ketersediaan dan keselamatan data siswa yang autentik dan terpercaya dalam hal ini ketersediaan file digital ijazah dan SKL (Surat Keterangan Lulus) bagi SMPN dan SDN se-Kota Blitar yang bertujuan untuk mengelola, melindungi, mengamankan, menyelamatkan Ijazah dan SKL siswa dari kemungkinan kerusakan, kehilangan, dan kemusnahan baik fisik maupun informasinya.
- Kegiatan ini dilaksanakan secara *cross cutting* oleh *team work* Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar dengan Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar serta personil yang ditugaskan dari SMPN dan SDN terkait.
- Pada tahun 2022 dilakukan alih media Ijazah dan SKL (Surat Keterangan Lulus) pada 9 (sembilan) SMPN dan 45 (empat puluh lima) SDN se Kota Blitar tahun kelulusan 2022 sejumlah 4.576 lembar. Selain kegiatan preservasi arsip vital kesiswaaan, pada tahun 2022 juga dilaksanakan layanan alih media (*scanning*) arsip vital berupa dokumen *personal file* bagi ASN sejumlah 178 lembar serta arsip keuangan dan kebijakan sejumlah 5.456 lembar.

Adapun grafik layanan preservasi arsip vital kurun waktu tahun 2022 adalah sebagai berikut :



b) Fasilitasi Sarana Kearsipan dan Sarana Protokol Kesehatan :

- Pada tahun 2022 dilaksanakan fasilitasi sarana penyimpanan arsip inaktif sejumlah 1.100 Box Arsip bagi OPD yang membutuhkan.
- Guna antisipasi dan meminimalisir dampak dan penularan Covid-19, maka dilaksanakan penyediaan sarana dan bahan protokol kesehatan berupa masker, hand sanitizer bagi pengelola arsip di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar.

c) Fumigasi, Termit Control, Pengolahan dan Penataan Arsip Kacau

- Sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan kearsipan adalah "*menjamin keselamatan dan keamanan arsip Pemerintah Daerah sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara*" dan amanat Pasal 25 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 bahwa "*Lembaga Kearsipan Daerah bertanggungjawab melakukan pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota*".
- Pada bulan Juni dilaksanakan Fumigasi dan *Termit Control Arsip* yang disimpan di Depo Arsip dengan volume 460 M3.
- Selanjutnya dilakukan pengolahan dan penataan arsip (pembentahan arsip kompleks) yang disimpan di Depo Arsip Pemerintah Kota Blitar sejumlah 100 ML' (Meter Linier) terdiri dari Arsip Statis dan Arsip Inaktif.

d) Penyediaan Sarana Preservasi, Pengolahan dan Penataan Arsip

- Guna optimalisasi upaya penataan dan preservasi arsip melalui pemenuhan rekomendasi Pengawasan Kearsipan Eksternal Tahun 2021, dilaksanakan penyediaan sarana penunjang kelengkapan depo yaitu : 1 (satu) Unit Dehumidifier, 2 (satu) Unit Smoke Detector, 2 (dua) Unit Thermohygrometer, dan 3 (tiga) Troli.

e) Penyusutan Arsip

- Dalam upaya pengamanan informasi dan fisik arsip melalui penyusutan arsip, berpedoman pada ketentuan Pasal 11 ayat 2 Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusutan Arsip, ditetapkan Panitia Penilai Arsip melalui Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/195/HK410.010.2/2022 tanggal 22 Juni 2022.
- Menindaklanjuti keputusan tersebut, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan telah dilaksanakan tahapan penyusutan arsip rekam medis RSUD Mardi Waluyo serta arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang akan disusutkan melalui pemusnahan.
- Usul pemusnahan arsip tersebut dikirmkan kepada ANRI melalui surat Walikota Blitar Nomor : 045/4451/410.114.3/2022 tanggal 17 November 2022. Dan selanjutnya terbit Persetujuan Pemusnahan Arsip melalui Surat ANRI Nomor : B-KN.00.03/445/2022 tanggal 30 Desember 2022 untuk arsip sebagai berikut:
  - (1) Arsip Rekam Medis Rawat Inap RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar periode 1995 s/d 2007 sejumlah 27.108 berkas.
  - (2) Arsip fasilitasi karsipan (prasarana dan sarana) Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Blitar kurun waktu 2010 s/d 2012 sejumlah 10 berkas.

### **3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Blitar menangani dua urusan wajib non pelayanan dasar, yaitu Urusan Perpustakaan dan Urusan Karsipan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah diuraikan diatas, Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Blitar menetapkan program yang selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Blitar pada tahun 2022 didukung anggaran sebagai berikut :

**Tabel 3.7**  
**Rekapitulasi Anggaran Tahun 2022**  
**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar**

NO.	URAIAN	PAGU (Rp)
	Belanja Daerah (Belanja Operasi dan Belanja Modal) :	5.671.064.862,00
1.	Sekretariat	4.499.782.828,00
	- Gaji dan Tunjangan ASN	3.498.916.576,00
	- Operasional Sekretariat	1.000.866.252,00
2.	Bidang Perpustakaan	781.824.100,00
3.	Bidang Kearsipan	389.457.934,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.671.064.862,00</b>

*Sumber : Badan Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kota Blitar, 2022*

Berdasarkan evaluasi RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026, terdapat penyederhanaan program/kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar dari 4 program menjadi 3, dari 12 kegiatan menjadi 10 kegiatan dan terdiri dari 27 sub kegiatan.

Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan dari masing-masing urusan sebagai berikut:

#### **URUSAN PERPUSTAKAAN**

##### **A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
  - 1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
  - 2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
- 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
  - 3.1. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan
- 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- 4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4.3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 4.4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- 4.5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
- 4.6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  - 5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  - 6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  - 7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 7.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 7.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - 7.4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

***B. Program Pembinaan Perpustakaan***

- 1. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
  - 1.1. Sub Kegiatan Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - 1.2. Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
  - 1.3. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

- 1.4. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
- 1.5. Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota

**2. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten /Kota**

- 2.1. Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat

**Tabel 3.8**  
**Realisasi Penyerapan Anggaran Urusan Perpustakaan**  
**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022**

Uraian / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<b>4.499.782.828</b>	<b>4.422.412.690</b>	<b>98,28</b>
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>7.639.900</b>	<b>7.639.900</b>	<b>100,00</b>
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.537.800	2.537.800	100,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.102.100	5.102.100	100,00
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.500.116.576</b>	<b>3.451.009.336</b>	<b>98,60</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.498.916.576	3.449.809.336	98,60
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	1.200.000	1.200.000	100,00
<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>51.511.550</b>	<b>50.689.500</b>	<b>98,40</b>
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan	51.511.550	50.689.500	98,40

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKpj) TAHUN 2022**

---

<b>Uraian / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>533.144.384</b>	<b>528.635.122</b>	<b>99,15</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.519.400	2.519.400	100
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.975.800	18.975.800	100
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	328.211.184	325.897.772	99,30
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.507.500	12.506.100	99,99
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	6.480.000	6.480.000	100
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	164.450.500	162.256.050	98,67
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>27.700.000</b>	<b>27.650.000</b>	<b>99,82</b>
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.700.000	27.650.000	99,82
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>69.959.638</b>	<b>67.726.908</b>	<b>96,81</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700.000	700.000	100
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.259.638	67.026.908	96,78
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>309.710.780</b>	<b>289.061.924</b>	<b>93,33</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	131.264.300	111.570.824	85,00

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKpj) TAHUN 2022**

---

<b>Uraian / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.092.195	16.741.900	97,95
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	139.416.285	138.811.200	99,57
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.938.000	21.938.000	100
<b>Program Pembinaan Perpustakaan</b>	<b>781.824.100</b>	<b>774.155.799</b>	<b>99,02</b>
<b>Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>543.725.700</b>	<b>537.952.599</b>	<b>98,94</b>
Sub Kegiatan Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.344.200	69.211.600	98,39
Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	33.032.700	32.862.400	99,48
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	18.698.900	18.002.800	96,28
Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	138.409.700	138.263.400	99,89
Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	283.240.200	279.612.399	98,72

<b>Uraian / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten /Kota</b>	<b>238.098.400</b>	<b>236.203.200</b>	<b>99,20</b>
Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	238.098.400	236.203.200	99,20

### **URUSAN KEARSIPAN**

#### **C. Program Pengelolaan Arsip**

##### **1. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**

- 1.1. Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
- 1.2. Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota

##### **2. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**

- 2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN

**Tabel 3.9**  
**Realisasi Penyerapan Anggaran Urusan Kearsipan**  
**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022**

<b>Uraian / Program / Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Program Pengelolaan Arsip</b>	<b>389.457.934</b>	<b>388.333.659</b>	<b>99,71</b>
<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>335.397.584</b>	<b>334.639.059</b>	<b>99,77</b>
Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	227.502.284	227.195.684	99,87
Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	107.895.300	107.443.375	99,58
<b>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi</b>	<b>54.060.350</b>	<b>53.694.600</b>	<b>99,32</b>

<b>Uraian / Program / Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</b>			
Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	54.060.350	53.694.600	99,32

### **3.4 CAPAIAN KINERJA PROGRAM SESUAI TARGET KINERJA YANG DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN KINERJA**

#### **3.4.1 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

##### ***Urusan Perpustakaan***

Program Renstra yang mendukung Sasaran Strategis Renstra Urusan Perpustakaan terdapat 1 sasaran program yaitu Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan dengan 2 indikator yaitu :

- 1) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pemustaka terhadap pelayanan perpustakaan;
- 2) Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk.

**Tabel 3.10**  
**Capaian Indikator Program Urusan Perpustakaan**  
**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>Rumus Perhitungan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Interpretasi Capaian Sasaran</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		<b>7</b>
1.	Nilai SKM pemustaka terhadap pelayanan perpustakaan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,2	81,55	100,43	Tercapai

No	Indikator Program	Rumus Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	%	Interpretasi Capaian Sasaran
1	2	3	4	5	6		7
2.	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Jumlah koleksi perpustakaan dibagi jumlah penduduk tahun n	Rasio	3,2 : 1	3,7 : 1	115,6	Tercapai

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, 2022*

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKpj) TAHUN 2022**

---

**Tabel 3.11**  
**Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022**  
**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022**  
**Urusan Perpustakaan**

No.	Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD 2021
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1.	Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan	indeks	81,2	781.824.100	81,55	774.155.799	100,43	99,02			Pada Tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar tidak ada Rekomendasi dari DPRD
			Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	ratio	3,2:1		3,7:1		115,63				
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	80,9	4.499.782.828	81,13	4.422.412.690	100,28	98,28			

## **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKpj) TAHUN 2022**

---

Dari hasil tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pada Urusan Perpustakaan yang melaksanakan sebanyak 2 Program, meliputi: Program Pembinaan Perpustakaan Capaian Kinerja Program rata-rata mencapai 108,03%, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Capaian Kinerja Program rata-rata mencapai 100,28%.

Analisis Kesesuaian antara Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Perpustakaan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022:

Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Predikat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan	Jumlah Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan (%)	Predikat Kesesuaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2	108,03	2	280,69	38,49	Sangat Rendah	20	107,8	260,38	Sangat Tinggi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1	100,28	7	100	100,28	Sangat Tinggi	22	99,95	100,33	Sangat Tinggi

Kategori tingkat kesesuaian :

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| 91 %         | : Sangat Tinggi |
| 76 – 90,99 % | : Tinggi        |
| 66 – 75,99 % | : Sedang        |
| 51 – 65,99 % | : Rendah        |
| < 50,99      | : Sangat Rendah |

**1) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pemustaka terhadap pelayanan perpustakaan**

Sebagai penyelenggara pelayanan publik, maka salah satu upaya yang harus dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada penerima dan/atau pengguna layanan dengan melakukan pengukuran kepuasan penerima dan/atau pengguna layanan melalui kegiatan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017, ada 9 unsur layanan perpustakaan yang diukur dengan hasil sebagai berikut :

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
1	Persyaratan (U1)	3,28
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2)	3,21
3	Waktu Penyelesaian (U3)	3,16
4	Tarif dan Biaya (U4)	4,00
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5)	3,15
6	Kompetensi Pelaksana (U6)	3,19
7	Perilaku Pelaksana (U7)	3,04
8	Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan (U8)	3,09
9	Sarana dan Prasarana (U9)	3,19
Bobot tertimbang		<b>0,11</b>
Total Nilai Rata-rata		<b>3,26</b>
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		<b>81,55</b>

Sasaran Survei Kepuasan Masyarakat pengguna layanan perpustakaan berjumlah 298 orang terdiri dari para pemustaka yang dilayani mobil perpustakaan keliling, pemustaka Bulk Loan (paket pinjam buku), pemustaka yang berkunjung ke ruang Blitar Corner, pemustaka yang berkunjung ke ruang Layanan Umum, pemustaka layanan e-book, dan pemustaka layanan pesan antar/ambil.

Dari hasil Survei tahun 2022 pada Unsur Tarif dan Biaya (U4) menjadi yang tertinggi atau berkonversi nilai **Sangat Baik**, dimana hasil ini sama dengan tahun

2021. Sedangkan Unsur Perilaku Pelaksana (U7) dalam memberikan pelayanan terkait dengan kesopanan dan keramahan menjadi yang terendah atau berkonversi **Baik**, dimana nilai terendah tahun 2022 ini berbeda dengan tahun 2021. Tahun 2021 yang terendah adalah Unsur Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan (U8) mendapat nilai IKM terendah, dimana unsur ini pada tahun 2022 sudah mengalami peningkatan.

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pemustaka terhadap pelayanan perpustakaan tahun 2022 memiliki target sebesar 81,2 dan terealisasi 81,55 atau termasuk kategori **Baik**. Diantara faktor penentu peningkatan capaian kinerja tersebut selain adanya kerjasama dan jalinan koordinasi yang baik antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan OPD terkait adalah adanya kesesuaian antara jenis layanan yang diberikan dengan kebutuhan layanan yang diharapkan oleh pemustaka.

Sedangkan rekomendasi yang harus dilaksanakan sesuai hasil Survei adalah :

- a. Perilaku petugas dalam memberikan pelayanan terkait dengan kesopanan dan keramahan masih perlu ditingkatkan dengan cara melakukan Pelatihan Etika Pelayanan.
- b. Meng-upgrade kembali untuk layanan online agar pengguna/anggota lebih mudah dalam mengakses online.
- c. Meningkatkan konsistensi dalam memberikan pelayanan, contohnya pelayanan peminjaman online.
- d. Memaksimalkan layanan online/pesan antar.
- e. Menambah jumlah jenis-jenis buku bacaan anak SD yang terbaru agar anak tertarik untuk membaca.
- f. Menambah ketersediaan komik pendidikan dan cerita bergambar, mengingat terdapat karakter siswa yang juga lebih menyukai dan lebih paham disajikan dalam bentuk gambar.
- g. Meningkatkan jumlah e-book dengan koleksi terbaru.

**2) Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk.**

Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayangkan kepada pemustaka. Koleksi yang dimaksud yang juga dipakai sebagai indikator ke-2 dalam Program Pembinaan Perpustakaan adalah banyaknya judul buku yang dimiliki oleh perpustakaan. Koleksi perpustakaan memberikan gambaran terkait ketersediaan bacaan yang akan memberikan wawasan yang lebih luas bagi pemustaka. Koleksi perpustakaan dapat terdiri dari berbagai jenis buku seperti ilmu pengetahuan sosial, teknologi, komputer, sastra, agama, sains, geografi dan sejarah, kesenian, serta filsafat dan psikologi.

Perhitungan ketercukupan koleksi perpustakaan mengacu pada standar yang dikeluarkan oleh Federasi Internasional Asosiasi dan Lembaga Perpustakaan (International Federation of Library Associations and Institutions, disingkat IFLA). Berdasarkan IFLA/UNESCO, jumlah koleksi dikatakan mencukupi apabila setiap 1 (satu) orang penduduk membaca 2 (dua) koleksi. Dua koleksi yang dimaksud adalah dua judul buku yang dapat dibaca oleh masyarakat atau pemustaka. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan berdasarkan IFLA/UNESCO dihitung dengan rumusan jumlah koleksi dibagi 2 (dua) kali jumlah penduduk.

Sedangkan rasio ketercukupan koleksi perpustakaan berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Perpustakaan dengan rumus penghitungan berikut :

$$\text{Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk} = \frac{\text{Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (eksemplar) di Kota Blitar pada tahun n}}{\text{Jumlah penduduk di Kota Blitar pada tahun n}}$$

<b>3,7 : 1</b>	<b>=</b>	583.056 eksemplar
		158.558 jiwa

Hasil penghitungan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 berasal dari koleksi Perpustakaan Kota Blitar dan perpustakaan binaan yaitu perpustakaan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Blitar. Data jumlah koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayah Kota Blitar pada semester 2 tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

NO.	INSTANSI	JUMLAH	
		PERPUSTAKAAN	KOLEKSI (EKSEMPLAR)
1	SD	72 SD	500.548
2	SMP	25 SMP	56.455
3	DINPERPUSIP	1	26.053
<b>JUMLAH KOLEKSI</b>			<b>583.056</b>
<b>Jumlah Penduduk (semester 2 tahun 2022)</b>		158.558	
<b>Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk</b>		<b>583.056 : 158.558 = 3,7 : 1</b>	

*Sumber : IKK LPPD Urusan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Karsipan  
Kota Blitar Tahun 2022*

Target rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk di Kota Blitar tahun 2022 sebesar 3,2 : 1 dan terealisasi sebesar 3,7 : 1. Hal ini berarti 1 buku dibaca oleh 3,7 orang penduduk.

Dari penghitungan rasio ini, ketercukupan koleksi perpustakaan sudah melebihi target yang direncanakan. Namun jika didasarkan pada standart IFLA/UNESCO, jumlah koleksi perpustakaan di Kota Blitar dapat dikatakan mencukupi apabila setiap 1 (satu) orang penduduk membaca 2 (dua) koleksi atau 2 (dua) judul buku. Sedangkan hasil rasio penghitungan koleksi perpustakaan dengan penduduk sebesar 3,7 : 1 sehingga dapat dikatakan **belum mencukupi** atau masih kurang.

***Urusan Karsipan***

Program Renstra yang mendukung Sasaran Strategis Renstra Urusan Karsipan terdapat 1 sasaran program yaitu Meningkatnya Pengelolaan Arsip dengan 1 indikator yaitu Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pengguna pelayanan arsip terhadap pelayanan karsipan daerah dengan capaian sebagai berikut :

**Tabel 3.12**  
**Capaian Indikator Program**  
**Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Blitar Tahun 2022**  
**Urusan Karsipan**

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Rumus Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	%	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6	7	
1	Nilai SKM pengguna pelayanan arsip terhadap pelayanan karsipan daerah	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Indeks	80,5	80,71	100,26	Tercapai melebihi target

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Blitar, 2022*

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKpj) TAHUN 2022**

---

**Tabel 3.13**  
**Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022**  
**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022**  
**Urusan Kearsipan**

No	Urusan Pemerintahan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD 2021
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1.	Kearsipan	Program Pengelolaan Arsip	Nilai kepuasan pengguna layanan karsipan	indeks	80,50	389.457.934	80,71	388.333.659	100,26	99,71			Pada Tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar tidak ada Rekomendasi dari DPRD
		Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase arsip dinamis yang dilakukan pengelolaan	%	100	335.397.584	100	334.639.059	100	99,77			

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2022**

No	Urusan Pemerintahan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD 2021
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		<i>Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</i>	Persentase arsip yang dimasukkan dalam SIKN (Sistem Informasi Kearsipan Nasional) melalui JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional)	%	20	54.060.350	20	53.694.600	100	99,32		

Dari hasil tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pada Urusan Kearsipan yang melaksanakan sebanyak 1 Program, meliputi: Program Pengelolaan Arsip Capaian Kinerja Program mencapai 100,26%.

## **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPI) TAHUN 2022**

Analisis Kesesuaian antara Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Perpustakaan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Tahun 2022:

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Keseuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Predikat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan	Jumlah Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan (%)	Tingkat Keseuaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan (%)	Predikat Kesesuaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1	100,26	2	100,00	100,26	Sangat Tinggi	13	100	100,26	Sangat Tinggi

Kategori tingkat kesesuaian :

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| 91 %         | : Sangat Tinggi |
| 76 – 90,99 % | : Tinggi        |
| 66 – 75,99 % | : Sedang        |
| 51 – 65,99 % | : Rendah        |
| < 50,99      | : Sangat Rendah |

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar sebagai penyelenggara pelayanan publik, telah melaksanakan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan serta menjaring masukan dan penilaian pengguna/penerima yakni layanan karsipan sejumlah 201 Responden tersebar di 26 (dua puluh enam) Perangkat Daerah yaitu 6 (enam) Bagian pada Sekretariat Daerah, 3 (tiga) Kecamatan dan 21 (dua puluh satu) Kelurahan, 9 (Sembilan) SMP Negeri, 9 (Sembilan) sampling SD Negeri.

Berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017, ada 9 unsur layanan karsipan yang diukur dengan hasil sebagai berikut :

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
1	Persyaratan (U1)	3,11
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2)	3,03
3	Waktu Penyelesaian (U3)	3,00
4	Tarif dan Biaya (U4)	3,91
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5)	3,09
6	Kompetensi Pelaksana (U6)	3,16
7	Perilaku Pelaksana (U7)	3,20
8	Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan (U8)	3,55
9	Sarana dan Prasarana (U9)	3,00
<b>Bobot tertimbang</b>		<b>0,11</b>
<b>Total Nilai Rata-rata</b>		<b>3,23</b>
<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat</b>		<b>80,71</b>

Pada layanan karsipan dari unsur Tarif dan Biaya (U4) menjadi yang tertinggi atau berkonversi nilai **Sangat Baik**. Hal ini disebabkan karena untuk mendapatkan pelayanan arsip tidak dikenakan tarif (gratis). Unsur Tarif dan Biaya (U4) ini tetap menjadi yang tertinggi, sama seperti tahun 2021.

Sementara yang memberikan kontribusi paling kecil adalah dari 2 unsur yaitu Unsur Waktu Penyelesaian serta Unsur Sarana dan Prasarana yakni masing-masing sebesar 3,00. Dengan demikian, Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Blitar perlu memperbaiki kinerja pada Unsur Sistem Mekanisme dan Prosedur (U2) melalui percepatan penyediaan regulasi berupa SOP pelayanan dan optimalisasi sosialisasi

layanan melalui berbagai media dan upaya lain yang relevan. Adapun upaya perbaikan kinerja layanan pada Unsur Waktu Penyelesaian (U3) tersebut antara lain melalui layanan berbasis online, pengaturan dan penataan ulang jadwal dan waktu penyelesaian layanan, peningkatan kualitas dan kuantitas petugas layanan. Guna perbaikan pada Unsur Sarana dan Prasarana (U9) perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana layanan melalui kesinambungan pemeliharaan dan updating maupun penyediaan sarana sesuai dinamika perkembangan teknologi dan kebutuhan layanan.

Target Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pengguna pelayanan arsip terhadap pelayanan karsipan daerah tahun 2022 sebesar 80,5 terealisasi sebesar 80,71 atau dengan mutu pelayanan **B** atau “**Baik**”, dimana nilai tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang terealisasi sebesar 80,05. Peningkatan terjadi di beberapa unsur antara lain unsur Persyaratan (U1), Waktu (U3), Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5), Perilaku Pelaksana (U7), Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan (U8) dan Sarana dan Prasarana (U9).

Sedangkan yang harus dilaksanakan sesuai hasil survei adalah segera memperbaiki unsur Sarana dan Prasarana (U9) yang nilai rata-ratanya **Kurang Baik** sehingga Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Blitar perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana layanan baik melalui kesinambungan pemeliharaan dan updating maupun penyediaan sarana sesuai dinamika perkembangan teknologi dan kebutuhan layanan.

Hasil survei tahun 2022 ini masih sama seperti hasil survei tahun 2021 dimana unsur Sarana dan Prasarana (U9) juga memiliki nilai paling rendah.

Faktor-faktor penentu keberhasilan sehingga hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pengguna pelayanan arsip melebihi target adalah terdapat peningkatan capaian kinerja layanan dari yang telah ditargetkan dikarenakan sebagian dari jenis layanan yang diberikan telah memenuhi harapan OPD pengguna layanan.

Meskipun hasil Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2022 melebihi target, namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian yaitu kurangnya

kuantitas dan kualitas pelayanan kearsipan. Adapun rekomendasi sesuai hasil survei adalah :

- a) Penyediaan Standar Pelayanan Publik sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
- b) Optimalisasi koordinasi lintas sektoral guna percepatan penyediaan Record Centre dan Central File setiap OPD Pencipta Arsip sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Pasal 9), Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 (Pasal 29), Perda Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (pasal 15) bahwa “Pengelolaan Arsip Dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip”. Lebih lanjut amanat Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan yang menyebutkan bahwa : “Dalam penyelenggaraan kearsipan setiap perangkat daerah dan Lembaga Kearsipan Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana kearsipan sesuai standar”. Relevan dengan hal tersebut dalam Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat rekening bagi seluruh OPD sebagai pencipta arsip untuk melaksanakan kegiatan Pengelolaan Arsipnya yaitu pada rekening 01.2.06.10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD. Dengan Rekening kegiatan tersebut, maka setiap OPD dapat melakukan upaya optimalisasi pengelolaan arsipnya antara lain melalui percepatan penyediaan Record Center dan Central File.
- c) Penyediaan/penerbitan regulasi dan pedoman standarisasi teknis yang mewajibkan penyediaan Record Centre dan Central File pada setiap OPD.
- d) Guna pemenuhan kebutuhan SDM Kearsipan baik secara kuantitas maupun

kualitas maka direkomendasikan untuk dilakukan intensifikasi koordinasi lintas sektoral guna penciptaan dan penjaringan tenaga fungsional arsiparis baik melalui penerimaan CPNS, P3K, Inpassing, Diklat/bimtek penciptaan arsiparis, maupun tugas belajar Diploma Kearsipan yang penganggarannya dilakukan oleh BKPSDM Kota Blitar sebagai Pembina Kepegawaian di lingkup Pemerintah Kota Blitar serta melakukan penyusunan formasi kebutuhan SDM Kearsipan baik Arsiparis maupun Fungsional Umum Pranata Kearsipan (pengelola arsip).

- e) Guna optimalisasi pengelolaan dan pelayanan informasi karsipan secara elektronik, maka sejalan dengan di terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, dimana karsipan merupakan salah satu unsur layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik yang mendukung tata laksana internal birokrasi guna mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah maka diupayakan beberapa hal yaitu:
- Optimalisasi koordinasi lintas sektoral terkait guna, penyusunan dan pengembangan aplikasi karsipan guna peningkatan Indeks SPBE dan mendukung terwujudnya program e-government;
  - Peningkatan pemberdayaan PNS dengan basic keilmuan teknologi informasi dan disiplin ilmu lain yang relevan.
- f) Sejalan dengan terbitnya Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dimana Indeks Karsipan merupakan salah satu faktor pengungkit perbaikan kinerja Reformasi Birokrasi pada unsur Penataan dan Tata Laksana yang meliputi aspek : Kualitas Pengelolaan Arsip, Implementasi Manajemen Karsipan Modern dan Handal (dari Manual ke Digital) serta Digitalisasi Arsip maka direkomendasikan :
- Pertama, penguatan sumberdaya internal berupa peningkatan kepedulian, apresiasi dan kesadaran akan arsip dan karsipan bagi segenap Pimpinan dan pengambil kebijakan (decision maker) di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Blitar yang diharapkan berlanjut pada optimalisasi peningkatan apresiasi dan kesadaran akan arsip dan karsipan bagi segenap Pimpinan dan

Decision Maker di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sehingga menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berpihak bagi pengembangan pengelolaan arsip dan karsipan daerah. Upaya Kedua, memperkuat lembaga karsipan daerah dan unit-unit karsipan Perangkat Daerah, karena membangun karsipan tidak bisa hanya diserahkan pada lembaga karsipan semata tanpa dukungan dan sinergi dengan lembaga dan pihak-pihak terkait lain.

Dengan demikian diharapkan dapat menumbuhkan “gerakan sadar arsip” dan optimalisasi pengamanan dan penyelamatan arsip daerah terutama arsip keuangan dan dokumen aset guna mendukung kesinambungan pencapaian predikat WTP serta peningkatan kinerja pembangunan karsipan dan informasi di Pemerintah Kota Blitar yang bermuara pada peningkatan kualitas dan akuntabilitas kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai amanat dalam Permenpan tersebut.

## LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKpj) TAHUN 2022

### 3.4.2 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021-2026

**Tabel 3.14**  
**Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021-2026**  
**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar**  
**Urusan Perpustakaan**

No.	Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2022	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1.	Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan	indeks	83	5.224.793.155	81,55	774.155.799	98%	15%
			Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	ratio	3,6:1		3,7:1		102,8%	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	82,8	22.624.924.321	81,13	4.422.412.690	98%	20%

Dari hasil tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2021-2026 Urusan Perpustakaan melaksanakan sebanyak 2 Program, meliputi: Program Pembinaan

## **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2022**

Perpustakaan capaian kinerja rata-rata terhadap target RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 mencapai 100,4%, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota capaian kinerja rata-rata terhadap target RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 mencapai 20%.

**Tabel 3.15**  
**Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021-2026**  
**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar**  
**Urusan Kearsipan**

No	Urusan Pemerintah an	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2022	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1.	Kearsipan	Program Pengelolaan Arsip	Nilai kepuasan pengguna layanan kearsipan	indeks	82,5	3.348.435.500	80,71	388.333.659	98%	12%

Dari hasil tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2021-2026 Urusan Kearsipan melaksanakan sebanyak 1 Program, meliputi: Program Pengelolaan Arsip dengan capaian kinerja rata-rata terhadap target RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 mencapai 98%.

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKpj) TAHUN 2022**

---

**3.5. Capaian Kinerja Keluaran Masing-masing Kegiatan Sesuai Target dalam Dokumen Anggaran OPD sesuai dengan Urusan Pemerintahan**

**3.5.1 Capaian Kinerja Keluaran Masing-masing Kegiatan Sesuai Target dalam Dokumen Anggaran OPD Tahun 2022**

**Tabel 3.16**  
**Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022**  
**Urusan Perpustakaan**

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD 2021
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1.	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan	indeks	81,2	781.824.100	81,55	774.155.799	100,43	99,02			Pada Tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar tidak ada Rekomendasi dari DPRD
					Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	rasio	3,2 : 1		3,7 : 1		115,63				
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	%	0,3	543.725.700	1,06	537.952.599	353,33	98,94			
				Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pengembangan lokal content	orang	170	70.344.200	163	69.211.600	95,88	98,39			

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKpj) TAHUN 2022**

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD 2021
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
				Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/ Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah peserta rapat koordinasi monev perpustakaan sekolah	orang	95	33.032.700	95	32.862.400	100,00	99,48			
					Jumlah laporan Monev Perpustakaan Sekolah	dokumen	1		1		100,00				
					Jumlah peserta Lomba Perpustakaan Sekolah	sekolah	11		9		81,82				
				Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah SDM Perpustakaan Sekolah yang mengikuti peningkatan kompetensi perpustakaan sesuai tipologi standart	orang	95	18.698.900	95	18.002.800	100,00	96,28			
				Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang tersedia	eksemplar	860	138.409.700	1.004	138.263.400	116,74	99,89			

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2022**

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD 2021
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
				Jumlah bahan pustaka yang sudah dilakukan entry ke aplikasi perpustakaan	eksemplar	860		1.004		116,74					
				Jumlah bahan pustaka yang dilakukan pelestarian melalui alih media	lembar	0		0		0					
				Jumlah bahan pustaka yang dilakukan penyangan (weeding)	eksemplar	0		0		0					
				Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah laporan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	dokumen	1	283.240.200	1	279.612.399	100,00	98,72			
				Jumlah laporan SKM Perpustakaan	dokumen	1		1		100,00					
				Jumlah laporan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	dokumen	1		1		100,00					

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKpj) TAHUN 2022**

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD 2021
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
				Jumlah profil perpustakaan binaan yang tersusun	dokumen	1		1		100,00					
				<i>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten /Kota</i>	Persentase Peningkatan Pemustaka	%	56	238.098.400	116,51	236.203.200	208,05	99,20			
				<i>Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat</i>	Jumlah Peserta Wisata Buku	orang	1.400	238.098.400	3.422	236.203.200	244,43	99,20			
				Jumlah pemustaka yang memanfaatkan layanan ekstensi perpustakaan	pemustaka	35.360		35.470		100,31					
				Jumlah konten Layada Cedar (Cerita Anak Dalam Jaringan)	konten	12		12		100,00					
				Jumlah Parenting Literasi yang terlaksana	kali	6		6		100,00					

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKpj) TAHUN 2022**

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD 2021
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
				Jumlah peserta bimbingan pemustaka	orang	200		200		100,00					
				Jumlah peserta talkshow Peningkatan Minat Baca	orang	0		0		0					
				Jumlah peserta lomba minat baca dan lomba peningkatan minat baca	orang	56		56		100,00					
				Jumlah peserta sosialisasi Peningkatan Budaya Baca	orang	0		0		0					
				Jumlah peserta rakor pelayanan perpustakaan	orang	97		97		100,00					
				Jumlah sarana prasarana penunjang layanan perpustakaan yang tersedia	unit	0		0		0					
				Jumlah peserta Kafe Literasi	orang	150		150		100,00					
				Jumlah software perpustakaan yang tersedia	aplikasi	1		1		100,00					
				Jumlah software perpustakaan yang terpelihara	aplikasi	0		0		0					

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2022**

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD 2021
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	80,9	4.499.782.828	81,13	4.422.412.690	100,28	98,28			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	%	100	7.639.900	100	7.639.900	100,00	100,00			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	dokumen	7	2.537.800	7	2.537.800	100,00	100,00			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun	dokumen	9	5.102.100	9	5.102.100	100,00	100,00			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai standart	%	100	3.500.116.576	100	3.451.009.336	100,00	98,60			

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKpj) TAHUN 2022**

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD 2021	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	orang	31	3.498.916.576	31	3.449.809.336	100,00	98,60				
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah jenis laporan Keuangan yang disusun	dokumen	7	1.200.000	7	1.200.000	100,00	100,00				
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai standart	%	100	51.511.550	100	50.689.500	100,00	98,40				
				Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah	publikasi	3	51.511.550	3	50.689.500	100,00	98,40				
					Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	event	6		5		83,33					

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2022**

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD 2021	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
				<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Persentase ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah sesuai standar	%	100	533.144.384	100	528.635.122	100,00	99,15				
				<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor</i>	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor yang tersedia	jenis	4	2.519.400	4	2.519.400	100,00	100,00				
				<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	macam	39	18.975.800	39	18.975.800	100,00	100,00				
				<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	jenis	35	328.211.184	31	325.897.772	88,57	99,30				
				<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	dos	1230		1.230		100,00					
					Jumlah barang cetakan yang tersedia	jenis	4	12.507.500	4	12.506.100	100,00	99,99				

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2022**

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD 2021
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
					Jumlah lembar penggandaan	lembar	10000		10.000		100,00				
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	bahan bacaan	3	6.480.000	3	6.480.000	100,00	100,00			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsulstasi regional dan nasional yang diikuti	rakor	30	164.450.500	38	162.256.050	126,67	98,67			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standart	%	100	69.959.638	100	67.726.908	100,00	96,81			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis Jasa Surat Menyurat yang tersedia	jenis	1	700.000	1	700.000	100,00	100,00			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	rekening	3	69.259.638	3	67.026.908	100,00	96,78			

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2022**

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD 2021
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
				<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%	100	309.710.780	100	289.061.924	100,00	93,33			
				<i>Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	unit	11	131.264.300	11	111.570.824	100,00	85,00			
				<i>Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	unit	5		5		100,00				
				<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	macam	4	21.938.000	4	21.938.000	100,00	100,00			
						macam	4	17.092.195	4	16.741.900	100,00	97,95			

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2022**

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD 2021
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	unit	1	139.416.285	1	138.811.200	100,00	99,57			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	%	100	27.700.000	100	27.650.000	100,00	99,82			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	macam	3	27.700.000	3	27.650.000	100,00	99,82			

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKpj) TAHUN 2022**

---

**Tabel 3.17**  
**Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022**  
**Urusan Kearsipan**

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD 2021	
							K	Rp.	K	Rp.					
1.	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar		Program Pengelolaan Arsip	Nilai kepuasan pengguna layanan karsipan	indeks	80,50	389.457.934	80,71	388.333.659	100,26	99,71			Pada Tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar tidak ada Rekomendasi dari DPRD
				Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip dinamis yang dilakukan pengelolaan	%	100	335.397.584	100	334.639.059	100,00	99,77			
				Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip daerah yang dilakukan pengolahan dan penataan	meter linear	100	227.502.284	100	227.195.684	100,00	99,87			
					Jumlah box arsip untuk perangkat daerah yang tersedia	box	1.100		1.100		100,00				
					Jumlah arsip daerah yang dilakukan pemeliharaan melalui Fumigasi dan Termit Control	m3	460		460		100,00				

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2022**

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisai Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD 2021
							K	Rp.	K	Rp.				
				Jumlah arsip daerah yang dilakukan penyelamatan melalui alih media	lembar	9740		9.740		100,00				
				Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang telah mendapatkan asistensi kearsipan	OPD	29	107.895.300	29	107.443.375	100,00	99,58		
				Jumlah perangkat daerah yang telah dilakukan pengawasan kearsipan	OPD	29		29		100,00				
				Jumlah pelaporan pembinaan dan pengawasan kearsipan	dokumen	1		1		100,00				
				Jumlah peserta Sosialisasi Kearsipan	orang	150		150		100,00				
				Jumlah rancangan kebijakan kearsipan yang disusun	draft	3		3		100,00				

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2022**

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisai Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD 2021	
							K	Rp.	K	Rp.					
				Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Percentase arsip yang dimasukkan dalam SIKN (Sistem Informasi Kearsipan Nasional) melalui JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional)	%	20	54.060.350	20	53.694.600	100,00	99,32			
				Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah penerima layanan kearsipan	orang	150	54.060.350	150	53.694.600	100,00	99,32			
					Jumlah laporan SKM Kearsipan yang tersusun	dokumen	1		1		100,00				
					Jumlah arsip daerah yang diolah menjadi informasi	nomor	10.000		10.000		100,00				
					Jumlah peserta Workshop Kearsipan	orang	75		75		100,00				

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKpj) TAHUN 2022**

---

**3.5.2 Capaian Kinerja Keluaran Masing-masing Kegiatan Sesuai Target dalam Dokumen Anggaran OPD Tahun 2021-2026**

**Tabel 3.18**  
**Capaian Kinerja Keluaran Masing-masing Kegiatan**  
**Sesuai Target dalam Dokumen Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2021-2026**

**Urusan Perpustakaan**

No.	Urusan Pemerintahan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kota Blitar Tahun 2021- 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2022		
						K		K	Rp.	
1.	Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan	indeks	83	5.224.793.155	81,55	774.155.799	98%	15%
			Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	rasio	3,6:1		3,7:1		102,8%	
		Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	%	0,4	3.326.582.727	1,06	537.952.599	263%	16%

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2022**

No.	Urusan Pemerintahan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kota Blitar Tahun 2021- 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2022	
					K	Rp.	K	Rp.
		Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Peningkatan Pemustaka	%	60	1.898.210.428	116,51 236.203.200	194,18% 12%
		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	indeks	<b>82,8</b>	<b>22.624.924.321</b>	<b>81,13 4.422.412.690</b>	<b>98% 20%</b>
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	%	100	44.607.100	100 7.639.900	20% 17%
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai standart	%	100	17.979.015.354	100 3.451.009.336	20% 19%

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKpj) TAHUN 2022**

No.	Urusan Pemerintahan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2022	
					K	Rp.	K	Rp.
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai standart	%	100	349.109.250	100	50.689.500
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah sesuai standar	%	100	1.453.172.920	100	528.635.122
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standart	%	100	319.352.517	100	67.726.908
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%	100	2.131.088.480	100	289.061.924

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKpj) TAHUN 2022**

No.	Urusan Pemerintahan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2022	
					K	Rp.	K	Rp.
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	%	100 348.578.700	100 27.650.000	20%	8%

Dari hasil tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pada Urusan Perpustakaan melaksanakan sebanyak 2 Program, meliputi: Program Pembinaan Perpustakaan yang memiliki 7 Kegiatan dengan capaian kinerja kegiatan rata-rata terhadap target RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 sebesar 228,59%, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki 7 Kegiatan dengan capaian kinerja rata-rata kegiatan terhadap target RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 sebesar 20%.

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2022**

---

**Tabel 3.19**  
**Capaian Kinerja Keluaran Masing-masing Kegiatan**  
**Sesuai Target dalam Dokumen Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2021-2026**  
**Urusan Kearsipan**

No	Urusan Pemerintahan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2022			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1.	Kearsipan	Program Pengelolaan Arsip	Nilai kepuasan pengguna layanan karsipan	indeks	82,5	3.348.435.500	80,71	388.333.659	98%	12%
		<i>Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Percentase arsip dinamis yang dilakukan pengelolaan	%	100	2.309.047.900	100	334.639.059	20%	14%
		<i>Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Karsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota</i>	Percentase arsip yang dimasukkan dalam SIKN (Sistem Informasi Karsipan Nasional) melalui JIKN (Jaringan Informasi Karsipan Nasional)	%	100	103.9387.600	20	53.694.600	20%	5%

## **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2022**

---

Dari hasil tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pada Urusan Kearsipan melaksanakan sebanyak 1 Program yaitu Program Pengelolaan Arsip dan memiliki 2 Kegiatan dengan capaian kinerja kegiatan rata-rata terhadap target RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 sebesar 20%.

### **3.6. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dan solusi yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar tahun 2022 dalam mengelola urusan perpustakaan dan urusan karsipan sebagai berikut :

#### ***Urusan Perpustakaan***

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan perpustakaan adalah :

- a. Belum adanya Perda Perpustakaan.
- b. Belum terakreditasinya Perpustakaan Daerah Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Blitar.
- c. Kurangnya akses ke perpustakaan karena kondisi gedung belum memenuhi standart nasional perpustakaan, antara lain ruangan kurang luas, seluruh ruang layanan perpustakaan berada di lantai 2 serta belum adanya fasilitas untuk difabel.
- d. Kurangnya koleksi bahan pustaka terutama buku anak.
- e. Terbatasnya jumlah Mobil Perpustakaan Keliling sehingga belum bisa melakukan layanan secara cepat dan merata untuk masyarakat Kota Blitar. Saat ini masih memiliki 3 (tiga) unit mobil perpustakaan keliling dan masih terbatas melakukan pelayanan ke sekolah-sekolah dan belum semua sarana publik dapat terlayani.
- f. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang ahli dan terampil di bidang teknologi informasi (IT).
- g. Waktu pelayanan perpustakaan terbatas pada jam kerja dan belum adanya kebijakan yang mengatur pelayanan di luar jam kerja.
- h. Terbatasnya anggaran untuk kegiatan peningkatan pemustaka seperti wisata buku, bimbingan pemustaka.
- i. Belum adanya anggaran untuk mendukung kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial untuk transformasi literasi serta sarana dan prasarana pengembangan perpustakaan kelurahan.
- j. Belum adanya perpustakaan kelurahan yang terbentuk.

Beberapa solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan perpustakaan adalah :

- a. Mengusulkan Peraturan Daerah tentang perpustakaan yang mengatur regulasi, strategi, kebijakan, inovasi serta optimalisasi peningkatan kegemaran dan budaya baca.
- b. Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007, disampaikan bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan. Perpustakaan yang menyelenggarakan kegiatannya sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan akan dilakukan penilaian kesesuaian berupa akreditasi perpustakaan. Sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut, Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan-Perpustakaan Nasional RI mengirim surat kepada Walikota Blitar Nomor : 2726/4./PPM.02N.2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang Akreditasi Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota bahwa **Perpustakaan Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar termasuk yang belum diakreditasi.** Kegiatan Akreditasi Perpustakaan pada tahun 2022 dilakukan oleh Direktorat Standardisasi dan Akreditasi Perpustakaan Nasional RI. Melalui Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar dapatnya melakukan pengajuan Akreditasi Perpustakaan dengan mengirimkan instrumen yang telah diisi dengan dilengkapi bukti fisik.  
Berkaitan dengan hal tersebut, telah dilakukan pengumpulan dan penyusunan data komponen akreditasi yang harus dipenuhi (data 2 tahun terakhir) dan mengusulkan anggaran pemenuhan sarana prasarana penunjang akreditasi perpustakaan pada tahun anggaran 2023 kepada Tim Anggaran Pemerintah Kota Blitar.
- c. Mengusulkan pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Blitar melalui DAK Perpustakaan ke Perpustakaan Nasional RI sehingga Kota Blitar memiliki

Gedung Perpustakaan yang representative dan sesuai Standar Nasional Perpustakaan.

Sebagai perpustakaan yang melakukan pembinaan terhadap perpustakaan sekolah, Perpustakaan Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar akan mengikuti Akreditasi Perpustakaan secara reguler dengan target terakreditasi A sehingga diperlukan luas ruangan layanan sesuai standart nasional perpustakaan.

Luas ruangan layanan perpustakaan daerah sesuai standart nasional perpustakaan sebesar 1.194 M<sup>2</sup>, sedangkan kondisi eksisting saat ini masih seluas 724 M<sup>2</sup>, sehingga terdapat kekurangan luas 469 M<sup>2</sup>.

Guna mendukung permohonan pembangunan Gedung Perpustakaan melalui DAK Perpustakaan, maka pada P-APBD Tahun Anggaran 2022 telah ditambahkan pagu anggaran sebesar Rp 75.000.000,- untuk Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) dan Rp 100.000.000,- untuk DED (*Detail Engineering Design*) Gedung Perpustakaan.

- d. Mengusulkan penambahan anggaran penyediaan bahan pustaka terutama buku anak karena pada saat buku anak dilayankan melalui mobil perpustakaan keliling dan LTPS (Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah), buku anak yang berada di ruang Literasi Ceria akan habis.
- e. Penambahan armada layanan ekstensi dengan mengusulkan pengadaan mobil dan bus Perpustakaan Keliling sehingga dapat maksimal dalam memberikan pelayanan ke semua sekolah.
- f. Mengusulkan SDM yang berlatar belakang teknologi informasi, juga mengusulkan pelatihan berbasis IT kepada SDM perpustakaan guna memaksimalkan pelayanan perpustakaan. Melalui Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah mengusulkan formasi ASN dari CPNS sebanyak 1 orang Pengelola Teknologi Informasi dan dari PPPK yaitu Pranata Komputer jenjang Keterampilan kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Blitar.

- g. Mengusulkan penambahan jam layanan di luar jam kerja khususnya Mobil Perpustakaan Keliling di sarana publik yaitu Aloon-aloon Kota Blitar, Sport Center dan Bon Rojo serta penambahan SDM Tenaga Harian Lepas.
- h. Mengusulkan penambahan anggaran untuk kegiatan peningkatan pemustaka.
- i. Mengusulkan anggaran untuk kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial guna mewujudkan Literasi untuk Kesejahteraan.  
Pada Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2021-2026, mulai Tahun Anggaran 2023 s/d 2026 ditambahkan Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial untuk mewadahi kegiatan Transformasi Literasi.
- j. Melakukan pembinaan terhadap kelurahan untuk membentuk Perpustakaan Kelurahan beserta tenaga pengelola Perpustakaan Kelurahan.

#### ***Urusan Kearsipan***

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan urusan karsipan adalah :

- a. Minimnya apresiasi dan kesadaran mengenai arsip dan karsipan dari para pimpinan dan pengambil kebijakan, salah satu indikatornya adalah minimnya kebijakan yang berpihak pada pengembangan pengelolaan arsip. Selain itu masih terjadi kesalahan persepsi mengenai tanggung jawab karsipan yang ditandai dengan minimnya pemahaman bahwa pengelolaan dan tanggung jawab karsipan berada pada setiap perangkat daerah pencipta arsip, dan bukan hanya Lembaga Karsipan. Sehingga diperlukan upaya yang berkesinambungan guna menumbuhkan kesadaran bahwa keberhasilan mewujudkan Blitar SATRIA (Blitar Sadar Tertib Arsip) merupakan tanggung jawab dan sinergi bersama seluruh perangkat daerah pencipta arsip dan Lembaga Karsipan.
- b. Kurangnya sosialisasi dan diseminasi informasi mengenai karsipan bagi masyarakat dan lingkungan sekolah.

- c. Belum tersedianya *Record Center* pada setiap OPD mengakibatkan tingginya potensi hilang dan rusaknya arsip yang bernilai guna tinggi terutama arsip arsip keuangan dan arsip vital sebagai bahan dan bukti akuntabilitas kinerja, serta arsip statis bernilai kesejarahan.
- d. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM yang memiliki kompetensi kearsipan dan Teknologi Informasi (IT).
- e. Belum optimalnya Layanan dan Pengelolaan Informasi Kearsipan berbasis IT (e-arsip).
- f. Belum semua perangkat daerah melaksanakan penyusutan arsip secara terprogram dan sistematis sesuai peraturan perundungan yang berlaku.
- g. Belum optimalnya pengelolaan dan layanan informasi kearsipan statis.

Beberapa solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan kearsipan adalah :

- a. Guna meningkatkan apresiasi dan kesadaran para pengambil kebijakan terhadap arsip dan kearsipan, langkah yang dapat diambil adalah :

Pertama, penguatan sumberdaya internal berupa peningkatan kepedulian, apresiasi dan kesadaran akan arsip dan kearsipan bagi segenap Pimpinan dan pengambil kebijakan (decision maker) di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar yang diharapkan berlanjut pada optimalisasi peningkatan apresiasi dan kesadaran akan arsip dan kearsipan bagi segenap Pimpinan dan Decision Maker di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sehingga menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berpihak bagi pengembangan pengelolaan arsip dan kearsipan Daerah.

Kedua, memperkuat lembaga kearsipan daerah dan unit-unit kearsipan Perangkat Daerah, karena membangun kearsipan tidak bisa hanya diserahkan pada lembaga kearsipan semata tanpa dukungan dan sinergi dengan lembaga dan pihak-pihak terkait lain.

Ketiga, kesinambungan pembinaan kearsipan melalui Pengawasan/audit kearsipan internal guna memotivasi, memotret dan menilai kepatuhan penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah.

- b. Guna peningkatan kuantitas sosialisasi dan diseminasi informasi mengenai kearsipan bagi masyarakat dan lingkungan sekolah ada beberapa alternatif :

Pertama, Telah dan sedang dilaksanakan Sosialisasi dan diseminasi Kearsipan melalui publikasi Peraturan Perundangan Kearsipan dan kegiatan kearsipan pada medsos Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (FB, IG, Website) dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan pada tahun mendatang.

Kedua, Telah dan sedang dilaksanakan Sosialisasi dan diseminasi penyelamatan arsip vital kesiswaan bagi lingkup SMPN dan SDN Kota Blitar melalui layanan konsultasi kearsipan dan layanan alih media arsip vital kesiswaan (Ijazah, Surat Keterangan Lulus dan Buku Induk Siswa SMPN) dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan pada tahun mendatang.

Ketiga, Telah dilaksanakan Sosialisasi dan Diseminasi Kearsipan bagi masyarakat pada bulan Maret 2022 sebagai tindak lanjut amanat Musrenbang Kecamatan dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan pada tahun mendatang.

- c. Guna optimalisasi pelaksanaan kewajiban pengelolaan arsip dinamis pada setiap OPD dilaksanakan beberapa alternatif yaitu :

Pertama, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Pasal 9), PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 (Pasal 29) , Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (pasal 15) bahwa "Pengelolaan Arsip Dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip". Untuk itu, telah dilakukan koordinasi melalui surat kepada Bappeda Kota Blitar tentang Input Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis OPD pada RKA SKPD Tahun 2023 dan diterbitkan Surat Edaran ke seluruh OPD untuk melakukan input Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis OPD pada RKA SKPD Tahun 2023 sesuai Kepmendagri Nomor : 050-5889-2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada rekening 01.2.06.10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD.

Dengan rekening kegiatan tersebut, setiap OPD dapat melakukan upaya optimalisasi pengelolaan arsipnya antara lain melalui percepatan penyediaan Record Center.

Kedua, telah dilaksanakan sosialisasi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan serta Audit Kearsipan Internal yang didalamnya memuat kewajiban perangkat daerah untuk pengelolaan arsip dinamisnya antara lain melalui penyediaan Record Center dan Central File pada bulan Juni-September 2022. Kegiatan pembinaan melalui sosialisasi dan pengawasan/audit karsipan internal ini akan dilaksanakan secara berkesinambungan pada tahun mendatang.

- d. Untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia yang ahli dan terampil di bidang karsipan, ada beberapa solusi sebagai berikut :

Pertama, penciptaan dan penjaringan tenaga fungsional arsiparis baik melalui Inpassing, Diklat/Bimtek penciptaan arsiparis, maupun tugas belajar Diploma Karsipan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan bersama BKPSDM sebagai Pembina Kepegawaian di lingkup Pemerintah Kota Blitar.

Kedua, intensifikasi koordinasi lintas sektoral dengan Perangkat Daerah terkait guna pemenuhan kebutuhan SDM Karsipan baik Arsiparis maupun Tenaga Karsipan. Pada tahun 2022 Kota Blitar telah menerima CPNS Arsiparis sejumlah 8 (delapan) orang dan membuka formasi P3K Arsiparis sejumlah 7 (tujuh) orang.

Ketiga, peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Karsipan melalui kepesertaan Bintek, diklat dan kegiatan sejenis (online maupun offline) dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan pada tahun mendatang.

Selain itu, terbitnya Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pasal 43 dimana Karsipan merupakan salah satu Komponen Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis

Elektronik merupakan angin segar bagi upaya peningkatan kualitas dan kuantitas ketersediaan SDM yang berbasis keilmuan teknologi informasi (IT).

e. Guna optimalisasi Layanan dan Pengelolaan Informasi Kearsipan berbasis IT (e-arsip), melalui Percepatan implementasi Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis yaitu Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi), ada beberapa alternatif solusi :

Pertama, Kesinambungan dan Intensifikasi Koordinasi Lintas Sektoral guna optimalisasi Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kearsipan Daerah.

Kedua, Sejalan dengan diterimanya akun live Srikandi melalui Surat ANRI Nomor : B-PK.02.08/4602/2022 tanggal 30 November 2022 dilakukan upaya percepatan implementasi Srikandi sebagai Aplikasi Umum Kearsipan Dinamis berbasis IT (e-arsip) baik melalui rakor dengan Perangkat Daerah terkait sebagai lead sector Srikandi (Bagian Organisasi dan Dinas Kominfotik) maupun Bintek dan coaching clinic bagi pengguna Srikandi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Ketiga, dalam rangka mendukung terwujudnya program e-government akan dilakukan peningkatan pemberdayaan PNS dengan basic keilmuan teknologi informasi dan disiplin ilmu lain yang relevan serta melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan mengirimkan arsiparis untuk mengikuti peningkatan kompetensi dalam pengelolaan SIKN dan JIKN.

Keempat, Bersama OPD teknis terkait, melakukan penyusunan regulasi pengembangan aplikasi Srikandi, Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS) dan aplikasi kearsipan lainnya serta penyediaan regulasi keamanan dan hak akses informasi.

Kelima, Telah dan sedang dilaksanakan upaya penyelamatan arsip melalui Alih Media untuk menuju e-Arsip dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan pada tahun mendatang.

Sejalan dengan hal tersebut, dengan terbitnya Keputusan Mendagri Nomor 050-3707 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah, telah tersedia rekening 01.2.06.10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD. Ini merupakan dasar hukum bagi seluruh OPD sebagai pencipta arsip untuk melakukan pengembangan SPBE termasuk dalam hal ini Layanan SPBE Karsipan yang mana berdasarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pasal 43 Karsipan merupakan salah satu Komponen Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik.

f. Guna mengawal pelaksanaan penyusutan arsip yang terprogram, sistematis sesuai dengan ketentuan perundangan dilakukan upaya percepatan penyediaan produk hukum berupa JRA sebagai dasar pelaksanaan penyusutan arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Selain itu dilakukan upaya upaya peningkatan kuantitas asistensi penyusutan arsip bagi OPD.

g. Guna optimalisasi layanan karsipan statis dilakukan intensifikasi upaya penyelamatan arsip daerah dan penambahan khazanah arsip statis melalui koordinasi lintas sektoral, kegiatan penelusuran, pengolahan dan penataan serta akuisisi arsip serta penyediaan kelengkapan regulasi layanan karsipan.

### **3.7. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN**

Guna optimalisasi pelayanan perpustakaan, berbagai kegiatan inovatif tetap harus digulirkan agar kegemaran membaca dan budaya baca masyarakat Kota Blitar dapat meningkat. Kebijakan perpustakaan juga disusun sebagai strategi Dinas Perpustakaan dan Karsipan dalam meningkatkan kegemaran membaca masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas SDM yang cerdas dan berdaya saing tinggi, sehingga kehadiran pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat. Agar kualitas SDM yang cerdas dan berdaya saing tinggi dapat terwujud, seluruh pemangku kebijakan di lingkungan Pemerintah Daerah harus ikut berperan aktif dalam menumbuhkembangkan kegemaran dan budaya baca.

Salah satu upaya Dinas Perpustakaan dan Karsipan dalam turut mewujudkan Visi Kota Blitar yaitu Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur dan Bermartabat khususnya

misi pertama yaitu mewujudkan Sumber Daya Manusia yang keren, berdaya saing, sehat jasmani rohani, cerdas dan berkarakter perlu dilakukan kebijakan strategis.

Adapun kebijakan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang didasarkan peraturan, keputusan dan/atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat berkaitan dengan pengelolaan perpustakaan dan literasi yang diambil pada tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Mengusulkan Perda Perpustakaan melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar ataupun melalui inisiatif anggota DPRD Kota Blitar. Sebelum terbit Peraturan Daerah dan sebagai payung hukum pembudayaan kegemaran membaca di Kota Blitar diterbitkan Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774)	Belum adanya Perda Perpustakaan yang mengatur regulasi, strategi, kebijakan, inovasi serta optimalisasi peningkatan kegemaran membaca dan budaya baca masyarakat Kota Blitar
2	Menyiapkan data komponen akreditasi yang harus dipenuhi (data 2 tahun terakhir) dan mengusulkan anggaran pemenuhan sarana prasarana penunjang akreditasi perpustakaan tahun anggaran 2023 kepada Tim Anggaran Pemerintah Kota Blitar	1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 2. Surat dari Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional RI kepada Walikota Blitar Nomor: 2726/4./PPM.02N.2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang Akreditasi Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota bahwa Perpustakaan Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar termasuk yang belum diakreditasi	Belum terakreditasinya Perpustakaan Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
3	Mengusulkan pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Blitar melalui DAK Perpustakaan ke Perpustakaan Nasional RI sehingga Kota Blitar memiliki Gedung Perpustakaan yang representative dan sesuai Standar Nasional Perpustakaan dengan mulai menyusun Studi Kelayakan ( <i>Feasibility Study</i> ) dan DED ( <i>Detail Engineering Design</i> ) Gedung Perpustakaan pada P-APBD Tahun Anggaran 2022	1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 2. Perwali Nomor 90 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Kurangnya akses ke perpustakaan karena kondisi gedung belum memenuhi standart nasional perpustakaan
4	Mengusulkan penambahan anggaran penyediaan bahan pustaka melalui APBD dan DAK Perpustakaan, terutama buku anak	1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 2. Perwali Nomor 90 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Kurangnya koleksi bahan pustaka terutama buku anak
5	Penambahan armada layanan ekstensi dengan mengusulkan pengadaan mobil dan bus Perpustakaan Keliling ke Perpusnas RI sehingga dapat maksimal dalam memberikan pelayanan ke semua sekolah dan sarana publik		Terbatasnya jumlah Mobil Perpustakaan Keliling sehingga belum bisa melakukan layanan secara cepat dan merata untuk masyarakat Kota Blitar
6	Mengusulkan SDM yang berlatar belakang teknologi informasi, juga mengusulkan pelatihan berbasis IT kepada SDM perpustakaan guna memaksimalkan pelayanan perpustakaan. Pengusulan formasi ASN dari CPNS yaitu Pengelola Teknologi Informasi dan PPPK yaitu Pranata Komputer jenjang Keterampilan kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Blitar		Kurangnya Sumber Daya Manusia yang ahli dan terampil di bidang teknologi informasi (IT)
7	Mengusulkan penambahan jam layanan di luar jam kerja khususnya Mobil Perpustakaan Keliling di sarana publik yaitu Aloon-aloon Kota Blitar, Sport	Perwali Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Waktu pelayanan perpustakaan terbatas pada jam kerja dan belum adanya kebijakan yang mengatur pelayanan di

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	Center dan Kebon Rojo serta penambahan SDM Tenaga Harian Lepas		luar jam kerja
8	Mengusulkan anggaran untuk kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial guna mewujudkan Literasi untuk Kesejahteraan. Pada Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2021-2026, mulai Tahun Anggaran 2023 s/d 2026 ditambahkan Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial untuk mewadahi kegiatan Transformasi Literasi	1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 2. Perwali Nomor 90 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Belum adanya anggaran untuk mendukung kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial untuk transformasi literasi serta sarana dan prasarana pengembangan perpustakaan kelurahan
9	Melakukan pembinaan terhadap kelurahan untuk membentuk Perpustakaan Kelurahan beserta tenaga pengelola Perpustakaan Kelurahan dengan target 3 Perpustakaan kelurahan pada tahun 2023 berdasarkan Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2021-2026	Perwali Nomor 90 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Belum adanya perpustakaan kelurahan yang terbentuk guna mendukung program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)

Guna optimalisasi layanan karsipan, berbagai strategi dan kebijakan terus ditingkatkan untuk penyelamatan dan pelestarian arsip daerah. Kebijakan karsipan juga disusun sebagai strategi Dinas Perpustakaan dan Karsipan dalam meningkatkan tata karsipan pemerintahan daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi, sehingga kehadiran pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat. Agar tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi dapat terwujud, seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Daerah harus ikut berperan aktif dalam meningkatkan penyelamatan dan pelestarian arsip daerah pada OPD masing-masing.

Salah satu upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berpartisipasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi, perlu dilakukan kebijakan strategis guna mendukung Gerakan PeTa menuju BLITAR SATRIA (Gerakan PENyadaran Tertib Arsip menuju Blitar Sadar Tertib Arsip).

Adapun kebijakan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang didasarkan peraturan, keputusan dan/atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil pada tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Penguatan sumberdaya internal dan memperkuat lembaga karsipan daerah serta unit-unit karsipan Perangkat Daerah	1. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Karsipan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 6) 2. Perwali Kota Blitar Nomor 51 Tahun 2017 tentang Gerakan PENyadaran Tertib Arsip 3. Perwali Kota Blitar Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengawasan Karsipan 4. Perwali Kota Blitar Nomor 79 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Karsipan pada Perangkat Daerah 5. SK Walikota Blitar Nomor 188/178/HK/410.010.2/2022 Tentang Tim Pengawasan Karsipan Internal Daerah Kota Blitar 6. Surat Walkota Blitar Nomor : 069.5/ 1663 /410.020.5/2022 tanggal 25 April 2022 tentang Pelaksanaan Rekomendasi KemenPAN dan RB terhadap Hasil Evaluasi RB Tahun 2021 (Peningkatan Skor Indeks Karsipan) 7. Surat Walikota Blitar Nomor : 045/0991/410.117.2/2022	1. Minimnya apresiasi dan kesadaran mengenai arsip dan karsipan dari para pimpinan dan pengambil kebijakan 2. Kesalahan persepsi mengenai tanggung jawab karsipan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		tanggal 2 Maret 2022 tentang Input Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Perangkat Daerah	
2.	Optimalisasi dan peningkatan kuantitas sosialisasi dan diseminasi kearsipan bagi masyarakat dan lingkungan sekolah	1. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 6) 2. Perwal Kota Blitar Nomor 51 Tahun 2017 tentang Gerakan Penyadaran Tertib Arsip	Kurangnya sosialisasi dan diseminasi informasi mengenai kearsipan bagi masyarakat dan lingkungan sekolah
3.	Optimalisasi pengelolaan arsip melalui percepatan penyediaan <i>Record Center</i> dan <i>Central File</i> di tiap OPD	1. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 6) 2. Perwal Kota Blitar Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan 3. SK Walikota Blitar Nomor : 188/178/HK/410.010.2/2022 tentang Tim Pengawasan Kearsipan Internal Daerah Kota Blitar 4. Surat Walkota Blitar Nomor : 069.5/1663/410.020.5/2022 tanggal 25 April 2022 tentang Pelaksanaan Rekomendasi KemenPAN dan RB terhadap Hasil Evaluasi RB Tahun 2021 (Peningkatan Skor Indeks Kearsipan ) 5. Perwal Kota Blitar Nomor 79 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Kearsipan pada Perangkat Daerah 6. Surat Walikota Blitar Nomor : 045/0991/410.117.2/2022 Tanggal 2 Maret 2022 tentang	Belum tersedianya <i>Record Center</i> dan <i>Central File</i> pada setiap OPD sehingga pengelolaan arsip aktif dan inaktif OPD termasuk arsip keuangan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		Input Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Perangkat Daerah	
4.	Pemenuhan Sumber Daya Manusia yang ahli dan terampil di bidang kearsipan dan Teknologi Informasi	Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 6)	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM yang memiliki kompetensi kearsipan dan Teknologi Informasi (TI)
5.	Optimalisasi Layanan dan Pengelolaan Informasi Kearsipan berbasis IT (e-arsip) melalui Percepatan implementasi Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis yaitu SriKandi (Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi)	1. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 6) 2. Perwali Kota Blitar Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis 3. Perwali Kota Blitar Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perwal Kota Blitar Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis 4. SK Walikota Blitar Nomor : 188/165/HK/410.010.2/2022 tentang Tim Percepatan Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar 5. SK Walikota Blitar Nomor : 188/249/HK/410.010.2/2022 tentang Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi 6. Surat Walikota Blitar Nomor : 045/4361/410.114.3/2022 tanggal 11 November 2022 tentang Permohonan Akun SRIKANDI Live 7. Surat ANRI Nomor : B-PK.02.08/4602/2022 tanggal	Belum optimalnya Layanan dan Pengelolaan Informasi Kearsipan berbasis IT (e-arsip)

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		30 November 2022 tentang Pemberian Akun Live Srikandi	
6.	Optimalisasi penyusutan arsip secara terprogram dan sistematis sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 6) 2. Perwali Kota Blitar Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusutan Arsip 3. Perwali Kota Blitar Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip 4. Perwali Kota Blitar tentang : JRA (sejumlah 32 Urusan) 5. SK Walikota Blitar Nomor : 188/195/HK/410.010.2/2022 tentang Panitia Penilai Arsip 6. Surat Walikota Blitar Nomor : 045/4452/410.114.3/2022 tanggal 17 November 2022 tentang Permohonan Persetujuan Pemusnahan Arsip Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah serta Rekam Medis RSUD Mardi Waluyo 7. Surat ANRI Nomor : B-KN.00.03/445/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Persetujuan Pemusnahan Arsip Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah serta Rekam Medis RSUD Mardi Waluyo	Belum terlaksananya penyusutan arsip secara terprogram dan sistematis sesuai peraturan perundangan yang berlaku
7	Intensifikasi upaya penyelamatan arsip daerah dan penambahan khazanah arsip statis	1. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 6) 2. Perwali Kota Blitar Nomor 54 Tahun 2017 tentang : Penyelamatan Arsip Penggabungan / Pembubaran Organisasi Peraangkat Daerah 3. Perwali Kota Blitar Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara	Belum optimalnya pengelolaan dan layanan informasi karsipan statis

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		Akuisisi Arsip Statis	

### **3.8. PENGHARGAAN YANG DITERIMA**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar pada tahun 2022 telah menerima beberapa penghargaan sebagai berikut :

No	Penghargaan	Tingkat	Diberikan Oleh
1	Berdasarkan Pengumuman ANRI Nomor : AK.01.02/2.5/20.22 tentang Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022, Indeks Kearsipan Kota Blitar memperoleh nilai sebesar 80,17 dengan Kategori "A" (Memuaskan)	Nasional	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
2	Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 dengan Predikat A (Memuaskan) Terbaik Ke 8 dari 29 OPD	Kota Blitar	Walikota Blitar
3	Peringkat Kedua Organisasi Perangkat Daerah dengan Jumlah Rekomendasi Statistik Terbanyak Tahun 2022	Kota Blitar	Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Blitar

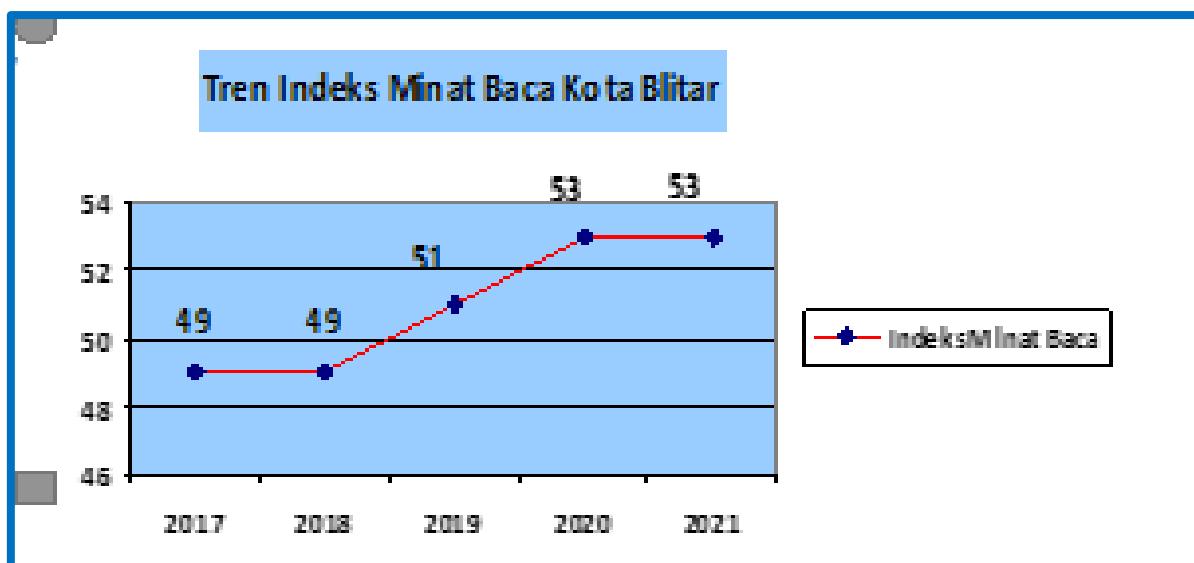
**BAB IV**  
**TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD KOTA BLITAR**  
**ATAS LKPJ WALIKOTA BLITAR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar tidak memiliki catatan strategis dan rekomendasi secara khusus dari DPRD Kota Blitar terhadap capaian kinerja pada tahun 2021 karena seluruh target kinerja telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

Pada Rekomendasi Strategis DPRD Kota Blitar terhadap LKPJ Walikota tahun 2021 terkait permasalahan atas capaian kinerja tujuan per Misi Daerah tahun 2021, pada Capaian Misi Daerah ke 2 yaitu Meningkatkan Kualitas SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing Tinggi dengan Indikator Tujuan yaitu Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat dengan indikator tujuan Indeks Pendidikan telah tercapai.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar melalui indikator Indeks Minat Baca Masyarakat yang masuk ke dalam Sasaran untuk Misi ke 2 RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021 telah terealisasi melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2021 yang merupakan akhir periode RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021, target Indeks Minat Baca sebesar 48, terealisasi sebesar 53.

**Grafik 4.1**  
**Grafik Tren Indeks Minat Baca Kota Blitar**



Berdasarkan RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar melalui indikator Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat yang masuk ke dalam Sasaran RPJMD untuk Misi ke 2, telah terealisasi melebihi target yang ditetapkan. Target Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat tahun 2022 sebesar 47, terealisasi sebesar 47,49.



Pada Rekomendasi Strategis DPRD Kota Blitar terhadap LKPJ Walikota tahun 2021 terkait permasalahan atas capaian kinerja tujuan per Misi Daerah tahun 2021, pada Capaian Misi Daerah ke 6 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional dengan Indikator Tujuan yaitu Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Tidak Tercapai.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar melalui indikator Persentase Arsip Daerah yang Dilakukan Penyelamatan dan Pelestarian yang masuk ke dalam Sasaran Misi ke 6 RPJMD Kota Blitar tahun 2016-2021, telah terealisasi melebihi target yang ditetapkan.

Target Persentase Arsip Daerah yang Dilakukan Penyelamatan dan Pelestarian sampai dengan tahun 2021 sebesar 100% (150.000 lembar), terealisasi 100% (150.000 lembar),

Persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian merupakan Sasaran dari Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar tahun 2021-2026 Urusan Kearsipan, dengan target arsip yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian mulai

tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 (5 tahun) sebanyak 100.000 lembar. Sedangkan target arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian tahun 2022 sebesar 100% (20.000 lembar) dan terealisasi sebesar 100% (20.000 lembar) sehingga arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian sampai dengan tahun 2022 telah terealisasi sebanyak 170.000 lembar.

**Tabel 4.1**  
**Target dan Realisasi Arsip yang Diselamatkan**  
**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022**

No.	Tahun	Target arsip yang diselamatkan		Realisasi arsip yang diselamatkan		Capaian (%)
		%	Lembar	%	Lembar	
1.	2016	28,29	42.327	28,29	42.327	100,00
2.	2017	41,55	62.327	42,16	63.239	101,47
3.	2018	54,88	82.327	55,49	83.239	101,11
4.	2019	68,22	102.327	68,85	103.281	100,92
5.	2020	81,55	122.327	82,18	123.281	100,77
6.	2021	100	150.000	100	150.000	100
7.	2022	100	170.000	100	170.000	100

**Grafik 4.3**  
**Grafik Tren Arsip Daerah yang Diselamatkan dan Dilestarikan**  
**(akumulasi lembar/tahun)**



Sejalan dengan terbitnya Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, dimana Indeks Kearsipan merupakan salah satu faktor pengungkit perbaikan kinerja Reformasi Birokrasi pada unsur Penataan dan Tata Laksana yang meliputi aspek : Kualitas Pengelolaan Arsip, Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari Manual ke Digital) serta Digitalisasi Arsip.

Berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Blitar Tahun 2021 oleh Kementerian PAN dan RB bahwa hasil kualitas pengelolaan arsip (Indeks Kearsipan) pada tahun 2021 dengan predikat **KURANG** yaitu sebesar 35,64 dari skala 0-100 sehingga direkomendasikan untuk **peningkatan predikat dan skor Indeks Kearsipan** pada tahun 2022.

Berdasarkan RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar melalui indikator Indeks Kearsipan yang masuk ke dalam Sasaran RPJMD untuk Misi ke 6, telah terealisasi melebihi target yang ditetapkan. Indeks Kearsipan belum menjadi Sasaran RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021 dan baru menjadi Sasaran RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026. Target Indeks Kearsipan Kota Blitar tahun 2022 sebesar 35, terealisasi dengan nilai sebesar 80,17 dengan kategori “A” (Memuaskan).

Capaian Indeks Kearsipan tahun 2022 melampaui yang ditargetkan dengan keterangan sebagai berikut :

1. Tercapainya pemenuhan bukti dukung pada aspek kebijakan, pengelolaan arsip inaktif, dan aspek Sumber Daya Manusia dan kearsipan (terpenuhinya Arsiparis pada 8 OPD);
2. Indeks Kearsipan tahun 2022 diperoleh dari agregrat nilai Pengawasan Internal (40%), dan Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal (60%), sedangkan Indeks Kearsipan pada tahun 2021 hanya diambil dari nilai pengawasan kearsipan eksternal.

Dalam kerangka evaluasi capaian indikator kinerja pembangunan daerah pada akhir pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dalam indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan

menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) masing-masing OPD Mitra kerja Komisi DPRD Kota Blitar pada APBD Tahun Anggaran 2021.

Berikut adalah hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

NO.	URAIAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
A.	<b>URUSAN PERPUSTAKAAN</b>				
1.	Indeks Minat Baca	48	53	NA	NA
2.	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	NA	NA	47	47,49
B.	<b>URUSAN KEARSIPAN</b>				
1.	Nilai SKM pengguna pelayanan arsip terhadap pelayanan karsipan daerah	80	80,05	80,5	80,71
2.	Persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian	100%	100%	100%	100%

Adapun capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Blitar sebagai berikut :

NO.	URAIAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
A.	<b>URUSAN PERPUSTAKAAN</b>				
1.	IKK Outcome : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	NA	NA	6,5	11,37 (Sangat Rendah)
2.	Rasio ketercukupan koleksi dengan penduduk	NA	3 : 1	3,2 : 1	3,7 : 1
3.	Persentase ketermanfaatan perpusatakaan oleh masyarakat	NA	0,36%	0,3%	1,06%
4.	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	NA	1 : 1.083	1 : 962,2	1 : 1.101

NO.	URAIAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
5.	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpusatakaan	0	63,54%	0	62%
6.	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	NA	14	15	16
7.	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	0	0	0	0
8.	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	0	0	0
9.	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	0	84	0	96
<b>B. URUSAN KEARSIPAN</b>					
1.	Indeks Kearsipan	NA	35,64	35	80,17 (A)
2.	IKK Outcome : Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban (nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	NA	59,25%	58,8%	62,5%
3.	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	20%	20%	30%	30%
4.	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	17%	17%	20%	20%
5.	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100%	100%	100%	100%
6.	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	100%	100%	100%	100%
7.	IKK Outcome : Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa	NA	33,33%	33,8%	83%

NO.	URAIAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
	dan bernegera untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat				
8.	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	0%	0%	100%	100%
9.	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0%	0%	10%	10%
10.	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	0%	0%	100%	100%
11.	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	0%	100%	100%	100%
12.	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	0%	100%	100%	100%
13.	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	0%	0%	100%	100%

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar tidak mengampu SPM (Standart Pelayanan Minimal) sehingga tidak melakukan pengukuran terhadap SPM (Standart Pelayanan Minimal).

**BAB V**  
**PENUTUP**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang telah dipergunakan selama satu tahun. Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar disajikan informasi keberhasilan dan kegagalan serta evaluasi terhadap pelaksanaan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut merupakan tolok ukur untuk melaksanakan perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar di tahun-tahun selanjutnya.

**1. KESIMPULAN**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022 disusun berdasarkan dokumen Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Kota Blitar Tahun 2021-2026, dokumen Renja Tahun 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun 2022 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Dalam laporan ini memuat hasil penyelenggaraan urusan perpustakaan dan karsipan serta mengukur peningkatan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Blitar. Berdasarkan analisis kinerja dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada masing-masing Kinerja Utama dan kinerja program masuk dalam kategori **berhasil**. Meskipun terdapat capaian kinerja pada tahun 2022 yang belum ada realisasinya, namun secara umum menunjukkan hasil yang memadai. Keberhasilan capaian kinerja tersebut tidak terlepas dari keterlibatan pihak-pihak yang terkait, yang telah memberikan asistensi dan konsultansi serta kerja keras dari seluruh jajaran Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Blitar untuk pencapaian indikator tersebut.

Secara umum dapat disimpulkan pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022 berdasarkan masing-masing urusan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut :

### **1. URUSAN PERPUSTAKAAN**

Tujuan/ Sasaran/ Program Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	47	47,49	101,04 %	781.824.100,00	774.155.799,00	99,02%
Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	6,5	11,37	174,92 %			
Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan	Nilai kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan	81,2	81,55	100,43 %			
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84 (A)	85,56 (A)	101,86 %	4.499.782.828,00	4.422.412.690,00	98%
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,9 (Baik)	81,13 (Baik)	100,28 %			

### **2.URUSAN KEARSIPAN**

Tujuan/ Sasaran/ Program Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya tata kearsipan pemerintah daerah	Indeks Kearsipan	35	80,17 (A)	229,06%	389.457.934,00	388.333.659,00	99,71%
Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip daerah	Persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian	100 %	100%	100%			

Tujuan/ Sasaran/ Program Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Reali sasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas pelayanan arsip daerah	Nilai kepuasan pengguna layanan kearsipan	80,5	80,71	100,26 %			

## 2. SARAN PERBAIKAN

Keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja telah dilakukan analisis dan evaluasi sehingga diketahui langkah-langkah strategis yang harus dilaksanakan dalam meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya. Koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait akan terus ditingkatkan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya antara lain :

1. Pada sasaran strategis Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat, meskipun capaian indikator Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat telah melebihi target yang ditetapkan, namun masuk kategori SEDANG, sehingga masih diperlukan regulasi dan kebijakan yang mengarah pada peningkatan kegemaran membaca masyarakat dengan mengusulkan Perda Perpustakaan serta optimalisasi Program Pembinaan Perpustakaan bekerjasama dengan sekolah dan OPD terkait dengan mengimplementasikan Peraturan Walikota Blitar Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.
2. Pada sasaran strategis Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip daerah telah mencapai target yang ditetapkan, namun tetap harus ditingkatkan agar terlaksana koordinasi yang baik antara seluruh perangkat daerah dalam upaya penyelamatan dan pelestarian arsip daerah dan secara berkesinambungan melakukan upaya optimalisasi pelaksanaan Program Pengelolaan Arsip.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022 yang menggambarkan capaian kinerja secara utuh. Semoga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2022 ini dapat berguna bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar khususnya sebagai evaluasi untuk perbaikan di masa depan, serta bagi segenap pihak yang berkepentingan.

Blitar, 10 Februari 2023  
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KOTA BLITAR  
DINAS PERPUSTAKAAN  
DAN KEARSIPAN  
BLITAR  
  
Drs. SUYATNO  
Pembina  
NIP. 19730430 199303 1 004

**LAMPIRAN**

**CAPAIAN KINERJA SEKRETARIS  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BLITAR**

**A. Analisis Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Blitar Tahun 2022**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	Tahun 2022		Percentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
Meningkatnya Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,9 Indeks	81,13 Indeks	100,28%

Penjelasan : Sekretariat memiliki 1 program dan 7 kegiatan yang keseluruhannya mencapai kinerja 100%

**B. Realisasi Pelaksanaan Program Sekretariat pada Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Blitar tahun 2022**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.499.782.828	4.422.412.690	98,28
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.639.900	7.639.900	100,00
1.1.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.537.800	2.537.800	100,00
1.2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.102.100	5.102.100	100,00
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.500.116.576	3.451.009.336	98,60
2.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.498.916.576	3.449.809.336	98,60
2.2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	1.200.000	1.200.000	100,00
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	51.511.550	50.689.500	98,40
3.1.	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan	51.511.550	50.689.500	98,40
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	533.144.384	528.635.122	99,15
4.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.519.400	2.519.400	100
4.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.975.800	18.975.800	100
4.3.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	328.211.184	325.897.772	99,30

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4.4.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.507.500	12.506.100	99,99
4.5.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	6.480.000	6.480.000	100
4.6.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	164.450.500	162.256.050	98,67
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.700.000	27.650.000	99,82
5.1.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.700.000	27.650.000	99,82
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.959.638	67.726.908	96,81
6.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700.000	700.000	100
6.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.259.638	67.026.908	96,78
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	309.710.780	289.061.924	93,33
7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	131.264.300	111.570.824	85,00
7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.092.195	16.741.900	97,95
7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	139.416.285	138.811.200	99,57
7.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.938.000	21.938.000	100

Penjelasan :

1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 4.499.782.828,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.422.412.690,00 atau 98,28% untuk mendukung 7 kegiatan dengan capaian realisasi penyerapan anggaran di atas 90%.
2. Kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 7.639.900,00 dan terealisasi sebesar Rp 7.639.900,00 atau 100,00% untuk mendukung 2 sub kegiatan dengan capaian realisasi penyerapan anggaran di atas 90%.
3. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 3.500.116.576,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.451.009.336,00 atau 98,60% untuk mendukung 2 sub kegiatan dengan capaian realisasi penyerapan anggaran di atas 90%.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 51.511.550,00 dan terealisasi sebesar Rp 50.689.500,00 atau 98,40% untuk

mendukung 1 sub kegiatan dengan capaian realisasi penyerapan anggaran di bawah 90%.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 533.144.384,00 dan terealisasi sebesar Rp 528.635.122,00 atau 99,15% untuk mendukung 6 sub kegiatan dengan capaian realisasi penyerapan anggaran di atas 90%.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp 27.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 27.650.000,00 atau 99,82% untuk mendukung 1 sub kegiatan dengan capaian realisasi penyerapan anggaran di atas 90%.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp 69.959.638,00 dan terealisasi sebesar Rp 67.726.908,00 atau 96,81% untuk mendukung 2 sub kegiatan dengan capaian realisasi penyerapan anggaran di atas 90%.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp 309.710.780,00 dan terealisasi sebesar Rp 289.061.924,00 atau 93,33% untuk mendukung 4 sub kegiatan dengan capaian realisasi penyerapan anggaran di atas 90%.

**C. Permasalahan Dan Solusi : -**

Sekretaris



SUNARTI, SE., MM.  
NIP. 19660226 198903 2 006

**CAPAIAN KINERJA KEPALA BIDANG PERPUSTAKAAN  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BLITAR**

**A. Analisis Capaian Indikator Kinerja Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022**

<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>Tahun 2021</b>		<b>Persentase (%)</b>
		<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
Meningkatnya pembinaan perpustakaan	Nilai Kepuasaan pemustaka terhadap layanan perpustakaan	81,2	81,55	100,43
	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	3,2 : 1	3,7 : 1	115,63

Penjelasan :

1. Bidang Perpustakaan memiliki 1 program dengan 2 indikator kinerja dan rata-rata capaian kinerja sebesar 108,03%.
2. Nilai Kepuasaan pemustaka terhadap layanan perpustakaan berasal dari Hasil survei SKM Perpustakaan.
3. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk berasal dari rumus penghitungan berikut :

$$\text{Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk} = \frac{\text{Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (eksemplar) di Kota Blitar pada tahun n}}{\text{Jumlah penduduk di Kota Blitar pada tahun n}}$$

<b>3,7 : 1</b>	<b>=</b>	583.056 eksemplar
		158.558 jiwa

**B. Realisasi Pelaksanaan Program Bidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar tahun 2022**

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>A.</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>781.824.100</b>	<b>774.155.799</b>	<b>99,02</b>
1.	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	543.725.700	537.952.599	98,94

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>%</b>
a.	Sub Kegiatan Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.344.200	69.211.600	98,39
b.	Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	33.032.700	32.862.400	99,48
c.	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	18.698.900	18.002.800	96,28
d.	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	138.409.700	138.263.400	99,89
e.	Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	283.240.200	279.612.399	98,72
2.	<b>Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten /Kota</b>	<b>238.098.400</b>	<b>236.203.200</b>	<b>99,20</b>
a.	Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	238.098.400	236.203.200	99,20

Penjelasan :

1. Program Pembinaan Perpustakaan dengan anggaran sebesar Rp **781.824.100,00** dan terealisasi sebesar Rp **774.155.799,00** atau 99,02% untuk mendukung 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan capaian realisasi penyerapan anggaran di atas 90%.

**C. Permasalahan Dan Solusi :**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan perpustakaan adalah :

1. Belum adanya Perda Perpustakaan.
2. Belum terakreditasinya Perpustakaan Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar.
3. Kurangnya akses ke perpustakaan karena kondisi gedung belum memenuhi standart nasional perpustakaan, antara lain ruangan kurang luas, seluruh ruang layanan perpustakaan berada di lantai 2 serta belum adanya fasilitas untuk difabel.
4. Kurangnya koleksi bahan pustaka terutama buku anak.
5. Terbatasnya jumlah Mobil Perpustakaan Keliling sehingga belum bisa melakukan layanan secara cepat dan merata untuk masyarakat Kota Blitar. Saat ini masih memiliki 3 (tiga) unit mobil perpustakaan keliling dan masih terbatas melakukan pelayanan ke sekolah-sekolah dan belum semua sarana publik dapat terlayani.
6. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang ahli dan terampil di bidang teknologi informasi (IT).
7. Waktu pelayanan perpustakaan terbatas pada jam kerja dan belum adanya kebijakan yang mengatur pelayanan di luar jam kerja.
8. Terbatasnya anggaran untuk kegiatan peningkatan pemustaka seperti wisata buku, bimbingan pemustaka.
9. Belum adanya anggaran untuk mendukung kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial untuk transformasi literasi serta sarana dan prasarana pengembangan perpustakaan kelurahan.
10. Belum adanya perpustakaan kelurahan yang terbentuk.

Beberapa solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan perpustakaan adalah :

1. Mengusulkan Peraturan Daerah tentang perpustakaan yang mengatur regulasi, strategi, kebijakan, inovasi serta optimalisasi peningkatan kegemaran dan budaya baca.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007, disampaikan bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan. Perpustakaan yang menyelenggarakan kegiatannya sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan akan dilakukan penilaian kesesuaian berupa akreditasi perpustakaan. Sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut, Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan-Perpustakaan Nasional RI mengirim surat kepada Walikota Blitar Nomor : 2726/4./PPM.02N.2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang Akreditasi Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota bahwa Perpustakaan Daerah Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Blitar termasuk yang belum diakreditasi. Kegiatan Akreditasi Perpustakaan pada tahun 2022 dilakukan oleh Direktorat Standardisasi dan Akreditasi Perpustakaan Nasional RI. Melalui Kepala Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Blitar dapatnya melakukan pengajuan Akreditasi Perpustakaan dengan mengirimkan instrumen yang telah diisi dengan dilengkapi bukti fisik. Berkaitan dengan hal tersebut, telah dilakukan pengumpulan dan penyusunan data komponen akreditasi yang harus dipenuhi (data 2 tahun terakhir) dan mengusulkan anggaran pemenuhan sarana prasarana penunjang akreditasi perpustakaan pada tahun anggaran 2023 kepada Tim Anggaran Pemerintah Kota Blitar.
3. Mengusulkan pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Blitar melalui DAK Perpustakaan ke Perpustakaan Nasional RI sehingga Kota Blitar memiliki Gedung Perpustakaan yang representative dan sesuai Standar Nasional Perpustakaan. Sebagai perpustakaan yang melakukan pembinaan terhadap perpustakaan sekolah, Perpustakaan Daerah Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Blitar akan mengikuti

Akreditasi Perpustakaan secara reguler dengan target terakreditasi A sehingga diperlukan luas ruangan layanan sesuai standart nasional perpustakaan.

Luas ruangan layanan perpustakaan daerah sesuai standart nasional perpustakaan sebesar 1.194 M<sup>2</sup>, sedangkan kondisi eksisting saat ini masih seluas 724 M<sup>2</sup>, sehingga terdapat kekurangan luas 469 M<sup>2</sup>.

Guna mendukung permohonan pembangunan Gedung Perpustakaan melalui DAK Perpustakaan, maka pada P-APBD Tahun Anggaran 2022 telah ditambahkan pagu anggaran sebesar Rp 75.000.000,- untuk Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) dan Rp 100.000.000,- untuk DED (*Detail Engineering Design*) Gedung Perpustakaan.

4. Mengusulkan penambahan anggaran penyediaan bahan pustaka terutama buku anak karena pada saat buku anak dilayangkan melalui mobil perpustakaan keliling dan LTPS (Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah), buku anak yang berada di ruang Literasi Ceria akan habis.

Berdasarkan surat Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional RI Indonesia Nomor : 6830/4/PPM.00.00/XII.2022 tanggal 8 Desember 2022 perihal Hibah Pojok Baca Digital (POCADI) dan Surat Keputusan Kepala Perpusnas RI Nomor 234 Tahun 2022 tentang Penetapan Perpustakaan Provinsi/Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Pojok Baca Digital Tahap II Tahun 2022 bahwa Kota Blitar termasuk salah satu dari 30 daerah yang menerima hibah Pojok Baca Digital (POCADI) dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Blitar khususnya bidang literasi. Sesuai hasil rapat koordinasi di Ruang Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar bersama Dinas Pendidikan Kota Blitar tanggal 14 Desember 2022, Pojok Baca Digital ini diletakkan di Taman Baca (Manca) Kebon Rojo Kota Blitar.

5. Penambahan armada layanan ekstensi dengan mengusulkan pengadaan mobil dan bus Perpustakaan Keliling sehingga dapat maksimal dalam memberikan pelayanan ke semua sekolah.

6. Mengusulkan SDM yang berlatar belakang teknologi informasi, juga mengusulkan pelatihan berbasis IT kepada SDM perpustakaan guna memaksimalkan pelayanan perpustakaan.
7. Mengusulkan penambahan jam layanan di luar jam kerja khususnya Mobil Perpustakaan Keliling di sarana publik yaitu Aloon-aloon Kota Blitar, Sport Center dan Bon Rojo serta penambahan SDM Tenaga Harian Lepas.
8. Mengusulkan penambahan anggaran untuk kegiatan peningkatan pemustaka.
9. Mengusulkan anggaran untuk kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial guna mewujudkan Literasi untuk Kesejahteraan. Pada Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2021-2026, mulai Tahun Anggaran 2023 s/d 2026 ditambahkan Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial untuk mewadahi kegiatan Transformasi Literasi.
10. Melakukan pembinaan terhadap kelurahan untuk membentuk Perpustakaan Kelurahan beserta tenaga pengelola Perpustakaan Kelurahan.

Kepala Bidang Perpustakaan



**PUJIASIH, S.Sos.,M.Eng.,M.Sc.**  
NIP. 19780628 199703 2 001

**CAPAIAN KINERJA KEPALA BIDANG KEARSIPAN  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BLITAR**

**A. Analisis Capaian Indikator Kinerja Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Blitar Tahun 2022**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Tahun 2021		Percentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
Meningkatnya Pengelolaan Arsip	Nilai kepuasan pengguna layanan karsipan	80,5	80,71	100,26

Penjelasan : Bidang Karsipan memiliki 1 program dan 2 kegiatan yang keseluruhan capaian kinerjanya sebesar 100%.

**B. Realisasi Pelaksanaan Program Bidang Karsipan pada Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Blitar Tahun 2022**

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
A.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	<b>389.457.934</b>	<b>388.333.659</b>	<b>99,71</b>
1.	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>335.397.584</b>	<b>334.639.059</b>	<b>99,77</b>
a.	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	227.502.284	227.195.684	99,87
b.	Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	107.895.300	107.443.375	99,58
2.	<b>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Karsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</b>	<b>54.060.350</b>	<b>53.694.600</b>	<b>99,32</b>
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Karsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	54.060.350	53.694.600	99,32

Penjelasan :

1. Program Pengelolaan Arsip dengan anggaran sebesar Rp **389.457.934,00** dan terealisasi sebesar Rp **388.333.659,00** atau 99,71% untuk mendukung 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan capaian realisasi penyerapan anggaran di atas 90%.

**C. Permasalahan Dan Solusi :**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan urusan karsipan adalah :

1. Minimnya apresiasi dan kesadaran mengenai arsip dan karsipan dari para pimpinan dan pengambil kebijakan, salah satu indikatornya adalah minimnya kebijakan yang berpihak pada pengembangan pengelolaan arsip. Selain itu masih terjadi kesalahan persepsi mengenai tanggung jawab karsipan yang ditandai dengan minimnya pemahaman bahwa pengelolaan dan tanggung jawab karsipan berada pada setiap perangkat daerah pencipta arsip, dan bukan hanya Lembaga Karsipan. Sehingga diperlukan upaya yang berkesinambungan guna menumbuhkan kesadaran bahwa keberhasilan mewujudkan Blitar SATRIA (Blitar Sadar Tertib Arsip) merupakan tanggung jawab dan sinergi bersama seluruh perangkat daerah pencipta arsip dan Lembaga Karsipan.
2. Kurangnya sosialisasi dan diseminasi informasi mengenai karsipan bagi masyarakat dan lingkungan sekolah.
3. Belum tersedianya *Record Center* pada setiap OPD mengakibatkan tingginya potensi hilang dan rusaknya arsip yang bernilai guna tinggi terutama arsip arsip keuangan dan arsip vital sebagai bahan dan bukti akuntabilitas kinerja, serta arsip statis bernilai kesejarahan.
4. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM yang memiliki kompetensi karsipan dan Teknologi Informasi (IT).
5. Belum optimalnya Layanan dan Pengelolaan Informasi Karsipan berbasis IT (e-arsip).
6. Belum semua perangkat daerah melaksanakan penyusutan arsip secara terprogram dan sistematis sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
7. Belum optimalnya pengelolaan dan layanan informasi karsipan statis.

Beberapa solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan karsipan adalah :

1. Guna meningkatkan apresiasi dan kesadaran para pengambil kebijakan terhadap arsip dan kearsipan, langkah yang dapat diambil adalah :

Pertama, penguatan sumberdaya internal berupa peningkatan kepedulian, apresiasi dan kesadaran akan arsip dan kearsipan bagi segenap Pimpinan dan pengambil kebijakan (decision maker) di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar yang diharapkan berlanjut pada optimalisasi peningkatan apresiasi dan kesadaran akan arsip dan kearsipan bagi segenap Pimpinan dan Decision Maker di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sehingga menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berpihak bagi pengembangan pengelolaan arsip dan kearsipan Daerah.

Kedua, memperkuat lembaga kearsipan daerah dan unit-unit kearsipan Perangkat Daerah, karena membangun kearsipan tidak bisa hanya diserahkan pada lembaga kearsipan semata tanpa dukungan dan sinergi dengan lembaga dan pihak-pihak terkait lain.

Ketiga, kesinambungan pembinaan kearsipan melalui Pengawasan/audit kearsipan internal guna memotivasi, memotret dan menilai kepatuhan penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah.

2. Guna peningkatan kuantitas sosialisasi dan diseminasi informasi mengenai kearsipan bagi masyarakat dan lingkungan sekolah ada beberapa alternatif :

Pertama, Telah dan sedang dilaksanakan Sosialisasi dan diseminasi Kearsipan melalui publikasi Peraturan Perundangan Kearsipan dan kegiatan kearsipan pada medsos Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (FB, IG, Website) dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan pada tahun mendatang.

Kedua, Telah dan sedang dilaksanakan Sosialisasi dan diseminasi penyelamatan arsip vital kesiswaan bagi lingkup SMPN dan SDN Kota Blitar melalui layanan konsultasi kearsipan dan layanan alih media arsip vital kesiswaan (Ijazah, Surat Keterangan Lulus dan Buku Induk Siswa SMPN) dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan pada tahun mendatang.

Ketiga, Telah dilaksanakan Sosialisasi dan Diseminasi Kearsipan bagi masyarakat pada bulan Maret 2022 sebagai tindak lanjut amanat Musrenbang Kecamatan dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan pada tahun mendatang.

3. Guna optimalisasi pelaksanaan kewajiban pengelolaan arsip dinamis pada setiap OPD dilaksanakan beberapa alternatif yaitu :

Pertama, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Pasal 9), PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 (Pasal 29) , Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (pasal 15) bahwa “Pengelolaan Arsip Dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip”. Untuk itu, telah dilakukan koordinasi melalui surat kepada Bappeda Kota Blitar tentang Input Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis OPD pada RKA SKPD Tahun 2023 dan diterbitkan Surat Edaran ke seluruh OPD untuk melakukan input Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis OPD pada RKA SKPD Tahun 2023 sesuai Kepmendagri Nomor : 050-5889-2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi, Ppemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada rekening 01.2.06.10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD.

Dengan rekening kegiatan tersebut, setiap OPD dapat melakukan upaya optimalisasi pengelolaan arsipnya antara lain melalui percepatan penyediaan Record Center.

Kedua, telah dilaksanakan sosialisasi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan serta Audit Kearsipan Internal yang didalamnya memuat kewajiban perangkat daerah untuk pengelolaan arsip dinamisnya antara lain melalui penyediaan Record Center dan Central File pada bulan Juni-September 2022. Kegiatan pembinaan melalui sosialisasi dan pengawasan/audit kearsipan internal ini akan dilaksanakan secara berkesinambungan pada tahun mendatang.

4. Untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia yang ahli dan terampil di bidang kearsipan, ada beberapa solusi sebagai berikut :

Pertama, penciptaan dan penjaringan tenaga fungsional arsiparis baik melalui Inpassing, Diklat/Bimtek penciptaan arsiparis, maupun tugas belajar Diploma Kearsipan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan bersama BKPSDM sebagai Pembina Kepegawaian di lingkup Pemerintah Kota Blitar.

Kedua, intensifikasi koordinasi lintas sektoral dengan Perangkat Daerah terkait guna pemenuhan kebutuhan SDM Kearsipan baik Arsiparis maupun Tenaga Kearsipan. Pada tahun 2022 Kota Blitar telah menerima CPNS Arsiparis sejumlah 8 (delapan) orang dan membuka formasi P3K Arsiparis sejumlah 7 (tujuh) orang.

Ketiga, peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Kearsipan melalui kepesertaan Bintek, diklat dan kegiatan sejenis (online maupun offline) dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan pada tahun mendatang.

Selain itu, terbitnya Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pasal 43 dimana Kearsipan merupakan salah satu Komponen Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan angin segar bagi upaya peningkatan kualitas dan kuantitas ketersediaan SDM yang berbasis keilmuan teknologi informasi (IT).

5. Guna optimalisasi Layanan dan Pengelolaan Informasi Kearsipan berbasis IT (e-arsip), melalui Percepatan implementasi Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis yaitu Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi), ada beberapa alternatif solusi :

Pertama, Kesinambungan dan Intensifikasi Koordinasi Lintas Sektoral guna optimalisasi Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kearsipan Daerah.

Kedua, Sejalan dengan diterimanya akun live Srikandi melalui Surat ANRI Nomor : B-PK.02.08/4602/2022 tanggal 30 November 2022 dilakukan upaya percepatan implementasi Srikandi sebagai Aplikasi Umum Kearsipan Dinamis berbasis IT (e-arsip) baik melalui rakor dengan Perangkat Daerah terkait sebagai lead sector Srikandi (Bagian Organisasi dan Dinas Kominfotik) maupun Bintek dan coaching clinic bagi pengguna Srikandi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Ketiga, dalam rangka mendukung terwujudnya program e-government akan dilakukan peningkatan pemberdayaan PNS dengan basic keilmuan teknologi informasi dan disiplin ilmu lain yang relevan serta melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan mengirimkan arsiparis untuk mengikuti peningkatan kompetensi dalam pengelolaan SIKN dan JIKN.

Keempat, Bersama OPD teknis terkait, melakukan penyusunan regulasi pengembangan aplikasi Srikandi, Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS) dan aplikasi karsipan lainnya serta penyediaan regulasi keamanan dan hak akses informasi.

Kelima, Telah dan sedang dilaksanakan upaya penyelamatan arsip melalui Alih Media untuk menuju e-Arsip dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan pada tahun mendatang.

Sejalan dengan hal tersebut, dengan terbitnya Keputusan Mendagri Nomor 050-3707 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah tersedia rekening 01.2.06.10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD. Ini merupakan dasar hukum bagi seluruh OPD sebagai pencipta arsip untuk melakukan pengembangan SPBE termasuk dalam hal ini Layanan SPBE Kearsipan yang mana berdasarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pasal 43 Kearsipan merupakan salah satu Komponen Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik.

6. Guna mengawal pelaksanaan penyusutan arsip yang terprogram, sistematis sesuai dengan ketentuan perundangan dilakukan upaya percepatan penyediaan produk hukum berupa JRA sebagai dasar pelaksanaan penyusutan arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Selain itu dilakukan upaya upaya peningkatan kuantitas asistensi penyusutan arsip bagi OPD.
7. Guna optimalisasi layanan kearsipan statis dilakukan intensifikasi upaya penyelamatan arsip daerah dan penambahan khazanah arsip statis melalui koordinasi lintas sektoral, kegiatan penelusuran, pengolahan dan penataan serta akuisisi arsip serta penyediaan kelengkapan regulasi layanan kearsipan.

Kepala Bidang Kearsipan



**FARRIDA RATNANINGTYAS, S.Sos.**  
NIP. 19721205 199202 2 002